



UNIVERSITAS INDONESIA

PENGARUH NILAI-NILAI CIVIC CULTURE DAN KONSUMSI
INFORMASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK WARGA
(Survei pada Warga Jawa Tengah yang Telah Memiliki Hak Pilih)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains dalam bidang Ilmu Komunikasi

Wahyutama
0606016911

Kekhususan Manajemen Komunikasi Politik
Departemen Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Jakarta, 2008

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

NAMA : Wahyutama
NPM : 0606016911
JUDUL TESIS : Pengaruh Nilai-Nilai Civic Culture dan
Konsumsi Informasi Politik terhadap
Partisipasi Politik Warga
(Survey pada Warga Jawa Tengah yang
Telah Memiliki Hak Pilih)

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program
Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia pada Jum'at, 27 Juni 2008 dan telah
dinyatakan : **L U L U S**

TIM PENGUJI TESIS

Ketua Sidang :
Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA

Sekretaris Sidang :
Effendi Gazali, Ph.D, MPS.ID

Pembimbing :
Dedy N. Hidayat, Ph.D

Penguji Ahli :
Dr. Sunarto, MSi

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCA SARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : WAHYUTAMA
NPM : 0606016911
JUDUL TESIS : PENGARUH NILAI-NILAI CIVIC CULTURE DAN
KONSUMSI INFORMASI POLITIK TERHADAP
TINGKAT PARTISIPASI POLITIK (Survei pada Warga
Jawa Tengah yang Memiliki Hak Pilih)

Dosen Pembimbing

Dr. Dedy Nur Hidayat

LEMBAR ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Wahyutama

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, hanya karena izinNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Meskipun hasil yang diperoleh sangat jauh dari harapan, penulis tetap berhutang ucapan terima kasih kepada beberapa nama sebagai berikut:

1. Bapak Dedy Nur Hidayat, selaku dosen pembimbing, yang pendapat serta otoritas keilmuannya sangat penulis hormati;
2. Mas Eriyanto, yang telah membimbing penulis, memberikan sejumlah bahan referensi, membantu penyebaran kuesioner, serta meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menerima konsultasi penulis. Dapat dikatakan, sebagian besar atas jasa beliau lah penyusunan tesis ini dapat terlaksana;
3. Pak Marwan dan teman-teman kantor yang kadang turut disusahkan selama penulis “menghilang” untuk menyelesaikan tesis ini;
4. Teman-teman seperjuangan di kelas: Mas Raga, Agung, Nyarwi, Mbak Zita, Zakina, Astri, Mbak Ami, dan teman-teman lain yang sama pentingnya namun agak terlalu panjang kalau disebutkan satu persatu di sini;
5. Pihak-pihak lain yang turut berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini maupun dalam menjalani keseluruhan rangkaian perkuliahan.

Terakhir, terima kasih secara khusus tentunya penulis berikan kepada orang tua dan keluarga yang telah mempercayai dan mendukung penuh pilihan penulis untuk menempuh perkuliahan di jenjang pasca sarjana ini.

Penulis berharap, penyelesaian tesis ini hanya menjadi awal bagi kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu, khususnya ilmu komunikasi politik, pada waktu-waktu mendatang. Insya Allah.

Jakarta, 13 Juli 2008
Wahyutama

ABSTRAK

Nama : Wahyutama
Program Studi : Manajemen Komunikasi Politik
Judul : Pengaruh Nilai-Nilai *Civic Culture* dan Konsumsi Informasi Politik terhadap Partisipasi Politik (Survey terhadap Warga Jawa Tengah yang Telah Memiliki Hak Pilih)

Penelitian ini hendak menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang, terutama dari aspek budaya politik (yaitu nilai-nilai *civic culture* yang dimilikinya) dan keaktifannya dalam mencari/ mengkonsumsi informasi politik. Hal ini terutama bermaksud menguji apakah partisipasi politik yang dilakukan warga benar-benar berakar dari budaya politik demokratis yang dimiliki warga, yang antara lain ditunjukkan dengan dimilikinya nilai-nilai partisipatif dan rasionalitas. Jika partisipasi politik memiliki korelasi signifikan dengan berbagai faktor tersebut, maka partisipasi itu memiliki landasan nilai-nilai partisipatif dan rasionalitas seperti yang diharapkan. Jika tidak, maka kesimpulannya adalah sebaliknya.

Penelitian menggunakan metode kuantitatif, yaitu melalui survey terhadap warga Jawa Tengah yang telah memiliki hak pilih. Pengambilan sampel dilakukan secara *multistage random sampling*.

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah: tingkat partisipasi politik yang dibagi atas partisipasi politik konvensional dan non konvensional (serta *voting* yang diperlakukan sebagai variabel tersendiri); nilai-nilai *civic culture* yang terdiri antara lain atas *civic engagement*, *interpersonal trust*, *solidarity*, *political tolerance*, *political equality*, *support for gradual reform*, *political trust*, dan *political efficacy*; serta tingkat konsumsi informasi politik (frekuensi mengikuti berita-berita politik di surat kabar, televisi, dan radio).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah *bivariate correlations* dan *multiple regression analysis*. Dengan *bivariate correlations*, variabel-variabel *civic culture* dan konsumsi informasi politik masing-masing dikorelasikan dengan variabel partisipasi politik (partisipasi politik konvensional dan non konvensional) untuk diketahui kekuatan hubungan masing-masing variabel tersebut terhadap partisipasi politik. Dengan *multiple regression analysis*, sejumlah variabel *civic culture* dan konsumsi informasi politik dimasukkan dalam sebuah persamaan untuk menentukan apakah mereka berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan nilai partisipasi politik.

Hasil korelasi bivariat menemukan, tingkat partisipasi politik seseorang ternyata tidak banyak berkorelasi dengan nilai-nilai *civic culture* yang dimilikinya. Hanya *civic engagement* dan *political efficacy* yang diketahui memiliki korelasi signifikan, meski lemah, dengan partisipasi politik. Ditemukan pula konsumsi

informasi politik memiliki korelasi signifikan dengan partisipasi politik yang dilakukan.

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis regresi, sejumlah nilai *civic culture* juga tidak terbukti berkontribusi terhadap pembentukan nilai partisipasi politik. Variabel-variabel yang kemudian ditemukan memiliki kontribusi terhadap pembentukan nilai partisipasi politik hanyalah *civic engagement*, *political trust*, keaktifan berbincang-bincang mengenai politik, dan keaktifan mengonsumsi berita politik di surat kabar.

ABSTRACT

Name : Wahyutama
Department : Political Communication
Title : The Influence of Civic Culture Values and Information Consumption to Citizen Political Participation (Survey on Citizen Lived in Central Java)

This research investigate factors that affect citizen political participation, focusing especially on their political culture (the civic culture values believed by them) and their consumption of political information. The aim is to test whether the political participation practiced by the citizen are based on their democratic culture or not (as shown by the participatory and rationality aspects contained in the civic culture values).

The significant and strong correlation between the level of political participation and the civic culture values indicate that citizen political participation are rooted in their belief on democratic norms and in their rational behavior. In contrary, the zero result of these correlations indicate there are problem of content in the political participation practiced by the public (that is not democratic).

The methodology used in this research is quantitative. The questionnaires were distributed to respondents that represented citizen who lived in Central Java and had right to vote. The sampling technique is multi stage random sampling.

Among variables measured in this research are: the level of political participation (voting, conventional participation, and unconventional participation); the level of citizen's engagement on civic culture values (civic engagement, interpersonal trust, solidarity, political tolerance, political equality, support for gradual reform, political trust, and political efficacy); and the level of political information (the frequency of following political news in newspaper, radio, and television) consumed by the citizen.

The analysis techniques used in this research are bivariate correlations and multiple regression analysis. By bivariate correlations, the research found that most of civic culture values indicators do not correlate with the level of political participation. Only civic engagement and political efficacy correlate significantly (but weakly) with the level of political participation. Bivariate correlations also found that the level of political information consumption correlate with the level of political participation.

By multiple regression analysis, the research found that *civic engagement*, *political trust*, *frequency in informal political discussion*, and *frequency reading political news in newspaper* contributed weakly to political participation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Permasalahan	4
1.3. Signifikansi Masalah	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
2. KERANGKA TEORI	8
2.1. Partisipasi Politik	8
2.2. <i>Voting</i>	15
2.3. Konsep tentang Budaya Politik dan <i>Civic Culture</i>	31
2.4. <i>Civic Culture</i> dan Keberlangsungan Demokrasi	35
2.5. Beberapa Dimensi dari <i>Civic Culture</i>	41
2.6. Konsep <i>Social Capital</i>	42
2.7. Konsep <i>Democratic Engagement</i>	43
2.8. Efek Konsumsi Media pada Partisipasi Politik	47
3. METODOLOGI PENELITIAN	51
3.1. Metode Penelitian	51
3.2. Populasi Penelitian	51
3.3. Teknik Pengambilan Sampel	52
3.4. Formula Penentuan Jumlah Sampel	56
3.5. Metode Pengumpulan Data	57
3.6. Metode Pengukuran	57
3.7. Validitas dan Reliabilitas Pengukuran	64
3.8. Metode Analisis	67
3.9. Hipotesis	69
4. TEMUAN DAN ANALISIS DATA	72
4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas	72
4.2. Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik	75
4.3. Tingkat Keaktifan Warga dalam Mencari Informasi Politik	84
4.4. Nilai-Nilai Budaya Politik Warga	87
4.5. Hubungan antara Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik dengan Corak Budaya Politik Warga	99
4.6. Hubungan antara Tingkat Keaktifan Warga dalam Mencari Informasi Politik dengan Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik	102
4.7. Analisis Regresi Linear Berganda terhadap Model Pengaruh Budaya Politik terhadap Partisipasi Politik	103

5. INTERPRETASI DATA	105
6.1 Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik	105
6.2 Tingkat Keaktifan Warga dalam Mencari Informasi Politik	107
6.3 Nilai-Nilai Budaya Politik Warga	108
6.4 Hubungan antara Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik dengan Nilai- Nilai Budaya Politik Warga	115
6.5 Hubungan antara Tingkat Keaktifan Warga dalam Mencari Informasi Politik dengan Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik	117
6.6 Analisis Regresi Linear Berganda atas Model Pengaruh Budaya Politik terhadap Partisipasi Politik	118
6. PENUTUP	
6.1 Kesimpulan dan Saran	121
6.2 Keterbatasan Penelitian	124
6.3 Implikasi Teoritis dan Studi Lebih Lanjut	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang? Faktor apa yang membuat seseorang untuk memutuskan aktif dalam berpolitik? Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini telah lama diselidiki para ilmuwan, namun jawaban yang diperoleh ternyata memiliki banyak ragam versi. Jawaban yang ditemukan juga tak selalu konsisten di setiap konteks waktu dan tempat yang berbeda. Hal ini menunjukkan banyaknya faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, sehingga membuat kajian menyeluruh terhadap topik ini juga bukan pekerjaan mudah.

Kesulitan mencari jawaban akan pertanyaan tentang partisipasi politik, juga disebabkan luasnya cakupan dari konsep ini. Partisipasi politik didefinisikan secara umum sebagai tindakan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun, dengan luasnya cakupan tindakan sebagaimana yang dikategorikan tersebut, maka bentuk-bentuk partisipasi politik juga sangat beragam.

Partisipasi politik pertama-tama banyak dikaitkan dengan keikutsertaan dalam kegiatan politik seperti kampanye atau secara lebih khusus memberikan suara dalam pemilihan umum. Melalui pemilu seseorang masuk ke bilik suara untuk memberikan suaranya. Dengan demikian, keikutsertaan dalam pemilu menjadi bentuk partisipasi politik yang paling mendasar.

Selanjutnya, partisipasi politik terdapat dalam bentuk keikutsertaan dalam kampanye-kampanye politik. Termasuk dalam tindakan ini adalah menghadiri kampanye, menyebarkan atribut, serta ikut dalam pawai yang diselenggarakan partai politik.

Selain itu, masih terdapat lagi aktivitas-aktivitas yang dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik. Hal itu diantaranya penyampaian aspirasi politik yang dilakukan dalam bentuk protes atau demonstrasi. Jenis tindakannya mencakup penyampaian protes, turun ke jalan, pemboikotan, hingga bahkan aksi-aksi kekerasan.

Partisipasi politik juga dapat dikaitkan dengan aspek yang lebih luas, termasuk partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti keterlibatan dalam kepengurusan RT/RW dan sebagainya. Meski demikian, bentuk yang terakhir ini lebih sering disebut sebagai *civic participation* atau partisipasi kewargaan yang dikaitkan dengan konsep *civic engagement* atau *civic duty*.

Penelitian ini akan mencoba mengeksplorasi berbagai ragam bentuk partisipasi politik tersebut. Secara umum, ada dua kategori bentuk partisipasi politik yang lazim digunakan, yaitu *conventional political participation* (partisipasi politik konvensional) dan *unconventional political participation* (partisipasi politik non konvensional). Partisipasi politik konvensional merujuk pada bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan proses pemilu. Termasuk diantaranya *voting* (memilih dalam pemilu), berkampanye, mengikuti kegiatan kepartaian, dan sebagainya. Sedangkan, partisipasi politik non konvensional merujuk pada bentuk-bentuk tindakan politik yang berada di luar norma hukum, kebiasaan, atau peraturan yang berlaku di sebuah negara. Termasuk di dalam kategori ini adalah aksi-aksi demonstrasi, pembuatan petisi, blokade jalan, pemboikotan produk-produk tertentu karena (alasan politis), dan sebagainya. Bentuk-bentuk partisipasi politik ini sebagaimana dinyatakan oleh Barnes & Kaase (1979) dalam *Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies* (Watts, 1990, p. 311).

Salah satu bentuk partisipasi politik yang banyak memperoleh perhatian adalah *voting*. Perhatian yang lebih banyak ini disebabkan beberapa hal. Diantaranya karena *voting* kerap dinilai sebagai standar minimal keikutsertaan warga dalam politik. *Voting* merupakan bentuk partisipasi politik yang secara massal dapat dilakukan warga, terutama karena relatif kecilnya pengorbanan yang diberikan warga untuk ikut dalam *voting* (dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya). Di lain pihak, *voting* juga bernilai sangat esensial bagi demokrasi karena ia merupakan sumber legitimasi bagi pemerintahan demokratis untuk berkuasa. Karena hal-hal itu, *voting* kerap dijadikan sebagai objek utama penelitian tentang partisipasi politik. Bahkan, dalam banyak kasus, *voting* telah disinonimkan dengan partisipasi politik itu sendiri (Sapiro: 1996).

Setelah menyelidiki tingkat partisipasi politik warga dalam beberapa bentuk seperti disebutkan di atas, penelitian ini kemudian akan mencoba untuk mempertanyakan faktor-faktor yang kemungkinan mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Untuk membuka semua kemungkinan, tentu akan sangat banyak jawaban yang diperoleh, dan dengan demikian juga akan sangat banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Karena itu, penelitian ini akan memfokuskan upaya pencarian jawaban itu pada beberapa variabel saja.

Dari sejumlah kemungkinan, penelitian ini tertarik untuk menyelidiki pengaruh nilai-nilai *civic culture* terhadap tingkat partisipasi politik seseorang. Hal ini karena *civic culture* atau keberadaban politik merupakan fondasi kultural bagi berlangsungnya demokrasi. *Civic culture* merupakan praktik nyata dari demokrasi di tingkat warganya, yang menentukan berfungsi atau tidaknya demokrasi. Tanpa profil *civic culture* yang memadai, demokrasi hanya berwujud seperangkat institusi dan prosedur, tanpa kualitas hidup berdemokrasi itu sendiri.

Seperti dikatakan Gabriel Almond dan Sidney Verba, "Perkembangan pemerintahan demokrasi yang stabil dan efektif bergantung tidak hanya pada struktur pemerintahan dan politik; ia juga bergantung pada orientasi rakyat terhadap proses politik, yaitu terhadap kebudayaan politik (*civic culture*). Apabila kebudayaan politik tidak dapat mendukung sistem demokrasi, peluang bagi keberhasilan sistem itu menjadi kecil" (Almond & Verba: 1984).

Lebih jauh, *civic culture* pulalah yang ditemukan di berbagai tempat sebagai salah satu penentu bagi terus berlangsung atau tidaknya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Keberlangsungan demokrasi yang sukses dalam jangka waktu lama ditemukan berkorelasi dengan *civic culture* yang kuat dari warganya. Sedangkan sebaliknya, demokrasi yang hanya berumur pendek, juga ditemukan berhubungan dengan lemahnya *civic culture* yang dimiliki warga-warganya (Muller & Selligson: 1994).

Selanjutnya, penelitian ini hendak menyelidiki juga pengaruh perilaku konsumsi media terhadap tingkat partisipasi politik seseorang. Di era *mediated political communication* seperti saat ini, pengetahuan seseorang terhadap realitas politik, juga realitas sosial lainnya, kian tak bisa dilepaskan dari pengaruh media yang menjejalnya berbagai informasi dan pesan. Media merupakan sumber rujukan informasi utama bagi banyak orang tentang realitas dunia luar. Seseorang kini dapat memiliki persepsi, pemahaman, dan bahkan keyakinan

tertentu tentang sebuah realitas politik (misalnya tentang partai politik) tanpa harus berinteraksi langsung dengan realitas politik tersebut.

Persoalannya, menyelidiki pengaruh media terhadap perilaku juga tidak sederhana. Hal ini karena sangat beragamnya jenis, muatan (*content*), juga efek yang ditimbulkan media terhadap khalayak. Jenis dan muatan media yang sama, bahkan dapat memiliki efek yang berbeda bagi khalayak yang berbeda.

Selain itu, kesulitan lain dalam menyelidiki pengaruh media juga diakibatkan sulitnya mengisolasi pengaruh media tertentu kepada khalayak. Khalayak umumnya mengkonsumsi berbagai jenis media pada saat yang bersamaan, sehingga pengaruh media tersebut kepada khalayak sangat sulit dilacak.

Meski demikian, bukan berarti pengaruh media tak dapat diukur sama sekali. Menggunakan indikator-indikator tertentu yang menunjukkan kecenderungan umum perilaku khalayak dalam mengkonsumsi media, jejak-jejak pengaruh media itu masih dapat kita telusuri.

1.2. Rumusan Permasalahan

Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah deskripsi tentang kondisi beberapa aspek terkait budaya politik pada warga masyarakat (khususnya warga Jawa Tengah) saat ini. Aspek-aspek yang dimaksud adalah tingkat partisipasi politik, nilai-nilai *civic culture*, dan tingkat keaktifan dalam mencari/ mengkonsumsi informasi politik

Selanjutnya, hendak diselidiki hubungan antara komponen-komponen tersebut, yaitu hubungan antara tingkat partisipasi politik dengan nilai-nilai *civic culture*; dan hubungan antara tingkat partisipasi politik dengan keaktifan dalam mencari/ mengkonsumsi informasi politik. Ada-tidaknya serta kuat-lemahnya hubungan yang terdapat pada variabel-variabel tersebut dapat memberikan gambaran umum kepada kita tentang kondisi partisipasi politik yang dilakukan warga saat ini.

Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kondisi tingkat partisipasi politik, nilai-nilai *civic culture* (tingkat keterikatan pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai demokrasi), serta tingkat keaktifan warga dalam mencari/ mengkonsumsi informasi politik?

2. Seberapa kuatkah pengaruh nilai-nilai *civic culture* yang dimiliki seseorang tersebut terhadap tingkat partisipasi politiknya?
3. Bagaimanakah pengaruh konsumsi seseorang atas informasi politik terhadap tingkat partisipasi politiknya?
4. Apa saja nilai-nilai *civic culture* yang secara nyata mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang?
5. Seberapa besar kontribusi dari variabel-variabel *civic culture* dan konsumsi seseorang akan informasi politik membentuk nilai partisipasi politik yang dilakukannya?
6. Atas jawaban dari berbagai pertanyaan tersebut, apa yang selanjutnya dapat diinterpretasikan dalam konteks makna partisipasi politik yang dilakukan warga? Apakah partisipasi tersebut bersumber dari nilai-nilai partisipatif dan rasionalitas sebagaimana dikehendaki dalam karakter warga negara yang demokratis?

1.3. Signifikansi Masalah

1.3.1. Akademis

Secara akademik, kontribusi yang hendak diberikan penelitian ini adalah pembuktian keberlakuan sekaligus penajaman atas teori-teori yang telah ada sebelumnya mengenai hubungan antara *civic culture*, partisipasi politik, dan perilaku konsumsi media. Hubungan antara *civic culture* dan partisipasi politik memang telah banyak dikaji, namun penelitian-penelitian itu umumnya menggunakan indikator nilai-nilai *civic culture* yang berbeda-beda. Sedangkan, penelitian ini berupaya menghimpun beberapa nilai *civic culture* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik, baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan. Karena itu, penelitian ini juga akan mencoba memetakan nilai-nilai *civic culture* yang benar-benar secara signifikan berkorelasi dengan tingkat partisipasi politik dan nilai-nilai *civic culture* yang korelasinya tidak signifikan.

Penelitian ini juga hendak menyumbangkan kajian tentang dampak perilaku konsumsi media seseorang terhadap tingkat partisipasi politiknya. Meskipun studi semacam ini diakui telah cukup banyak dilakukan, namun

dampak media nyaris selalu memiliki hasil yang berbeda untuk setiap konteks tempat dan waktu. Karena itu, penelitian ini mencoba untuk memperkaya daftar kemungkinan dampak yang diakibatkan media terhadap khalayak, khususnya terhadap partisipasi politik yang dilakukannya.

1.3.2. Sosial

Salah satu pertanyaan penting yang layak diajukan bagi Indonesia setelah melalui lebih dari satu dasawarsa reformasi adalah seberapa jauh demokratisasi telah berhasil dicapai? Pencapaian demokratisasi itu, selain dilihat dari kinerja institusi-institusi demokrasi, juga perlu dilihat dari bagaimana khalayak menjalani kehidupan demokrasi tersebut berupa nilai-nilai yang mereka pegang dan budaya politik yang mereka praktikkan.

Civic culture pada dasarnya merupakan kondisi ideal nilai-nilai politik yang dikehendaki dimiliki sebuah masyarakat yang demokratis. Tingkat *civic culture* yang tinggi dari sebuah masyarakat akan menjadi indikator bagi berlangsungnya demokrasi yang berkualitas yang dijalani masyarakat tersebut. Di samping itu, tingkat *civic culture* juga dapat menunjukkan seberapa langgeng demokrasi akan bertahan. Atau dengan kata lain, *civic culture* turut menentukan keberlangsungan sebuah sistem demokrasi.

Atas hal-hal itulah, kajian tentang *civic culture* relevan dilakukan, termasuk terhadap kondisi di Indonesia, untuk menilai pencapaian demokratisasi terjadi pada tingkat khalayak.

1.3.3. Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diberikan penelitian ini adalah prediksi atas potensi partisipasi politik khalayak pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang akan datang. Secara khusus, penelitian ini memfokuskan pada Pilkada di Provinsi Jawa Tengah yang akan dilangsungkan. Pengetahuan akan potensi ini cukup memiliki arti penting untuk mengukur seberapa kuat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang tengah berlangsung. Rendahnya potensi partisipasi politik khalayak, jika ditemukan demikian, akan menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi sistem politik yang berlangsung. Hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan sistem politik untuk

merespon, menampung, dan mengakomodasi aspirasi politik yang diberikan khalayak.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan atas penelitian ini akan disusun dalam sistematika sebagai berikut.

Bab 1 membahas latar belakang, konteks, rumusan, hingga signifikansi dari permasalahan yang diteliti. Pada intinya, dalam bab ini hendak diuraikan fenomena permasalahan yang hendak diangkat oleh penulis dalam penelitian dan mengapa penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut.

Bab 2 membahas konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah penelitian. Dalam bab ini dipaparkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta sejumlah studi yang pernah dilakukan terhadap permasalahan serupa. Bab ini juga hendak menunjukkan kerangka berpikir yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Bab 3 membahas metodologi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Termasuk di sini, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan (diantaranya metode pengambilan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data), serta operasionalisasi konsep-konsep penelitian. Diuraikan juga, validitas dan reliabilitas dari penelitian yang dilakukan.

Bab 4 membahas temuan-temuan penelitian dan analisis teknis (pembacaan statistik) terhadap hasil-hasil penelitian tersebut.

Bab 5 akan membahas interpretasi penulis terhadap hasil-hasil temuan, dengan menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis juga akan menyimpulkan/ membandingkan kerangka berpikir teoritik yang telah disusun pada bagian sebelumnya dengan hasil temuan penelitian.

Bab 6 akan membahas kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian ini dan implikasi teoritis yang dimilikinya. Juga disampaikan kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1. Partisipasi Politik

Dalam pengertian apa pun, partisipasi politik memainkan peranan sentral dalam demokrasi. Sebagaimana dikatakan Sidney Verba dkk, *“Citizen participation is at the heart of democracy. Indeed, democracy is unthinkable without the ability of citizens to participate freely in the governing process”* (Verba, et. al. : 1995). Tentu saja, hal ini juga turut mempertimbangkan kenyataan bahwa bentuk partisipasi politik dapat sangat beragam.

Dalam konteks demokrasi, bahkan tetap ada pertanyaan tentang bentuk partisipasi politik apa yang sesungguhnya dikehendaki dari warga negara. Apakah semua bentuk partisipasi politik memang dikehendaki dan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan atau keberlangsungan demokrasi? Ataukah ada bentuk-bentuk partisipasi politik tertentu yang justru tidak dikehendaki karena tidak berkorelasi dengan cita-cita demokrasi atau bahkan berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri? Lalu apa bentuk partisipasi politik yang sesungguhnya diharapkan dari warga negara sehingga harus didorong kemunculannya?

Dalam sejarah demokrasi sendiri, partisipasi politik bahkan dipandang dan diperlakukan secara berbeda-beda. Pernah pada suatu masa, partisipasi politik dianggap sebagai tindakan sekerumunan massa yang dilakukan tanpa arah, tanpa aturan dan disiplin, serta tanpa prinsip sehingga membuatnya rawan menjadi permainan para dalang politik atau penguasa tiran. Dalam perspektif ini, partisipasi politik, serta demokrasi, merupakan sesuatu yang buruk dan negatif, yang memberikan legitimasi bagi keseluruhan sistem untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Namun sebagaimana dikatakan Winston Churchill, *“No one pretends that democracy is a perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those others that have been tried from time to time.”* Demokrasi, yang di dalamnya bersemayam konsep partisipasi politik, merupakan bentuk pemerintahan terbaik yang bisa dihasilkan dari percobaan demi percobaan sepanjang zaman, meskipun mungkin bukan sistem yang sempurna.

Sejumlah pakar saat ini menyatakan, dalam banyak hal, demokrasi bersandar pada eksistensi pemilihan yang kompetitif. Melalui mekanisme inilah warga negara memilih orang-orang yang menduduki berbagai jabatan politik dan di pihak lain membuat para pejabat itu harus mempertanggungjawabkan jabatan mereka berdasarkan ancaman untuk tidak terpilih lagi pada pemilihan berikutnya.

Menurut Anthony Birch, demokrasi dalam pengertian modern adalah, *"a system of representative government in which the representatives are chosen by free competitive elections and most male citizens are allowed to vote"*. Sehingga, asumsi bahwa pemilihan yang kompetitif merupakan arena mendasar bagi aktivitas politik publik secara massal adalah pengetahuan dasar dalam demokrasi.

Seiring dengan kecenderungan di banyak negara akan menurunnya partisipasi politik warga dalam pemilu, muncul upaya-upaya untuk memperbaiki partisipasi pemilih. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran akan mundurnya kualitas demokrasi bersamaan dengan menurunnya keterlibatan warga dalam pemilu tersebut. Ini wajar, karena jika keunggulan demokrasi terletak pada keterlibatan rakyat sebagai pemangku kepentingan untuk menentukan keputusan politik, termasuk memilih pejabat pemerintahan melalui pemilu, maka apa jadinya demokrasi tanpa partisipasi warga dalam pemilu?

Memang ada pandangan lain yang menyatakan bahwa seorang warga negara seharusnya memainkan peranan politik yang lebih konstan dan langsung dalam pemerintahan dibanding sekedar mengikuti kampanye atau mencoblos dalam pemilu. Namun, ukuran wilayah pemerintahan yang besar secara realistis harus diakui membatasi dilakukannya bentuk-bentuk partisipasi politik warga yang lebih langsung. Partisipasi harus dilakukan melalui mekanisme keterwakilan, dimana warga mendelegasikan sebagian hak dan wewenang politiknya kepada kelompok orang yang lebih kecil, yang mewakili mereka dalam melakukan deliberasi politik secara langsung.

Hal-hal di atas pada gilirannya mengarahkan studi tentang partisipasi politik terutama berfokus pada isu-isu pemilu, *voting*, dan keterwakilan. Bahkan, *voting* dan pemilu kerap dianggap sebagai sinonim dari kata partisipasi politik itu sendiri. Sekurang-kurangnya, *voting* dinilai sebagai standar minimal bagi partisipasi seorang warga negara dalam demokrasi.

Partisipasi warga negara merupakan esensi dan tujuan dari demokrasi itu sendiri. Sebuah pandangan menarik ditawarkan Benjamin Barber (1984), yang menyatakan bahwa aktivitas politik tidak harus selalu diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi. Melainkan, ia merupakan cara hidup dan kebutuhan alamiah manusia. Dalam kata-kata Barber, "*The need for politics arises when some action of public consequence becomes necessary and when men must thus make a public choice that is reasonable in the face of conflict despite the absence of an independent ground of judgment*".

Sehingga, bagi Barber, politik melekat pada semua aspek kehidupan manusia dimana terdapat unsur keputusan atau pilihan publik. Sementara adanya keputusan publik merupakan suatu hal yang niscaya, mendelegasikan wewenang atas dibuatnya keputusan-keputusan publik itu juga tak bisa dihindari. Dan ini artinya menyerahkan sejumlah derajat kebebasan, serta dengan demikian hak kewarganegaraan seseorang. Bebas adalah memiliki kesempatan untuk memilih. Dinyatakan Barber, "*what is crucial is not consent pure and simple, but the active consent of participating citizen.*" Selanjutnya Barber menyatakan partisipasi dalam demokrasi itu sendiri menciptakan dan menjaga kewarganegaraan.

Pada era sekarang, otoritas hukum dan kebijakan telah diserahkan kepada pemerintah lokal. Sehingga, arena bagi aktivitas politik menjadi berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat. Hal ini juga menyediakan kesempatan bagi warga negara untuk melakukan intervensi yang bertingkat hingga ke level pemerintahan yang terdekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Struktur pemerintahan seperti ini pada akhirnya menciptakan cermin dari organisasi partisipasi warga.

Dalam sejarah Amerika Serikat, partisipasi politik ditandai dengan upaya-upaya partisipasi dari warga yang lebih langsung dan pro aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini yang misalnya ditemukan pada gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh para petani, buruh, atau berbagai kumpulan kolektif warga lainnya. Pendekatan yang lebih luas menandai dan menekankan partisipasi ini terutama dilakukan oleh kelompok orang yang secara ekonomi, sosial, dan politik tidak berada dalam posisi yang dominan. Sehingga partisipasi dilakukan oleh kelompok orang tersebut untuk menekan kelompok yang berkuasa untuk mengubah kebijakannya.

Dalam pendekatan mutakhir, bentuk partisipasi politik lain yang ditekankan adalah apa yang disebut Jürgen Habermas sebagai deliberasi atau demokrasi komunikatif (*communicative democracy*). Partisipasi ini juga dinyatakan sebagai bentuk tindakan politik yang konstan dilakukan warga negara. Dalam pandangan ini, warga mengamati, berbincang-bincang, mendengarkan, merefleksikan, dan membuat kesepakatan tentang bagaimana pemerintahan dijalankan.

Jika deliberasi dan tindakan komunikatif ini dilakukan pada arena dimana kebijakan dan keputusan-keputusan publik dibuat, maka keputusan-keputusan itu menjadi sesuatu yang otoritatif. Secara formal, mekanisme deliberasi ini disediakan melalui *public hearing* atau referendum. Juga, beberapa politisi menggunakan instrumen seperti *polling* atau *focus group discussion* dalam rangka memenuhi asas deliberasi ini.

Wacana mengenai deliberasi demokrasi ini sebagian besarnya juga terkait dengan satu bentuk tindakan politik yang disebut dengan *active stance*. Yaitu merupakan sikap aktif warga negara terhadap berbagai isu dan persoalan publik. Hal inilah yang disebut Schudson sebagai karakter dari *monitorial citizen* atau warga negara yang siaga melakukan pengawasan.

Jadi pada intinya, meskipun tindakan politik warga negara merupakan elemen yang sangat penting dalam teori demokrasi, pada kenyataannya terdapat beragam penafsiran mengenai peran dan sifat dari tindakan politik, dampaknya terhadap orang, dan dampaknya terhadap sistem politik. Ditekankan pula bahwa ketakutan-ketakutan mengenai partisipasi politik massal warga pada masa terdahulu kini telah tergantikan oleh pandangan yang terus menguat bahwa partisipasi politik memang diperlukan.

Dari uraian mengenai perkembangan bentuk-bentuk partisipasi politik di atas, lantas apa yang didefinisikan sebagai partisipasi politik itu sendiri? Dapat dinyatakan, mencari definisi yang lengkap, jelas, sekaligus operasional atas konsep partisipasi politik merupakan hal yang sangat sulit. Karena pada kenyataannya, konsep ini terus mengalami perubahan, khususnya mengalami perluasan makna, seiring dengan perkembangan penafsiran orang tentang apa yang dimaksud sebagai tindakan politik. Bahkan, terus terjadi perkembangan penafsiran atas apa yang dimaksud sebagai politik itu sendiri.

Dalam kaitan itu, Virginia Sapiro menyatakan agak mustahil untuk mencari dan menemukan definisi terbaik bagi partisipasi politik. Menurutnya, upaya yang

setidaknya cukup masuk akal dilakukan adalah mencari definisi sekaligus metode yang layak dalam mendefinisikan partisipasi politik (Sapiro, 1996, p. 6).

Dalam literatur umum tentang partisipasi politik, konsep ini cenderung diterjemahkan sebagai berbagai proses pemerintahan dimana warga negara biasa dapat terlibat. Misalnya Anthony Birch, mendefinisikan partisipasi politik secara sederhana sebagai partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa konsep ini dapat dilukiskan melalui serangkaian daftar tindakan yang terbuka untuk dilakukan warga negara dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Daftar tindakan-tindakan itu adalah:

1. memilih dalam pemilu lokal atau nasional (voting)
2. memilih dalam referendum
3. memberi dukungan atau ikut berkampanye dalam pemilu
4. menjadi anggota aktif dari suatu partai politik
5. menjadi anggota aktif dari sebuah kelompok penekan (pressure group)
6. ambil bagian dalam demonstrasi politik, unjuk rasa, atau berbagai aktivitas serupa lainnya yang ditujukan untuk mengubah atau mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah
7. berbagai bentuk pembangkangan publik (*civil disobedience*) seperti menolak membayar pajak
8. menjadi anggota pada lembaga-lembaga pemberi rekomendasi bagi pemerintah
9. menjadi anggota pada lembaga-lembaga konsumen atau lembaga-lembaga lain yang dimiliki publik
10. terlibat atau berpartisipasi dalam implementasi kebijakan-kebijakan sosial tertentu
11. berbagai bentuk aksi komunitas, seperti aksi-aksi terkait persoalan sosial di lingkungan tempat tinggal

Meski demikian, kategori-kategori partisipasi politik di atas dianggap tidak cukup berguna untuk kepentingan pengembangan teoritik lebih lanjut. Asumsi-asumsi yang mendasari kategori-kategori itu dinilai terlalu berfokus pada adanya pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, kategori-kategori partisipasi politik tersebut tidak cukup dapat menjawab bentuk-bentuk partisipasi politik pada beragam sistem pemerintahan di dunia dengan berbagai kompleksitasnya.

Bahkan ia mungkin juga tidak cukup berguna untuk menganalisis bentuk partisipasi pada situasi-situasi politik kontemporer.

Dalam kaitan itu, untuk mendefinisikan partisipasi politik, Sapiro mengalamatkan dua pertanyaan penting. Pertama, apa yang seharusnya kita anggap sebagai aktivitas politik? Kedua, apa yang akan kita anggap sebagai aktivitas politik?

Atas pertanyaan di atas, Sapiro mengutip pendapat Sidney Verba, Kay Schlozman, dan Henry Brady dalam karya mereka *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics* (1995) bahwa *"We focus on activity: We are concerned with doing politics rather than with being attentive to politics"* (Sapiro, 1996, p. 7). Mereka mengarahkan perhatian mereka pada aktivitas dan tindakan-tindakan politik, bukan sekedar memperhatikan persoalan-persoalan politik. Artinya, berdasarkan definisi tersebut, mereka akan kurang menganggap kegiatan-kegiatan pencarian informasi sebagai bentuk aktivitas politik. Menurut mereka, upaya seseorang untuk membuat dirinya mengetahui persoalan-persoalan politik tidak dengan sendirinya memiliki tujuan-tujuan politis.

Namun demikian, jika mempertimbangkan lebih jauh tentang makna pencarian informasi sebagai salah satu tahap yang dilakukan seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam politik, maka tindakan ini dianggap harus masuk dalam kategori tindakan politik. Dalam banyak kasus, bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan seseorang bahkan akan sangat tergantung pada informasi dan pengetahuan yang dimilikinya tentang politik. Bahkan, aktivitas seorang warga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan tentang politik dapat menjadi tindakan yang memiliki makna politik sangat penting, yang dapat mempengaruhi otoritas politik yang berkuasa, seperti yang terjadi saat pemerintah membatasi akses terhadap informasi.

Dalam studi yang lebih klasik, partisipasi politik dinyatakan terdiri dari rangkaian hirarki sebagai berikut (Rush, M. & Althoff, P. : 1971):

1. total apathy, yaitu kondisi dimana seseorang tidak memiliki ketertarikan atau kepedulian sama sekali terhadap aktivitas-aktivitas politik
2. voting, sering dianggap sebagai bentuk partisipasi politik minimal dan merupakan bentuk partisipasi paling umum yang dilakukan warga negara.
3. partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik
4. partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya

5. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi semu politik/ kelompok kepentingan (quasi political)
6. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik/ kelompok kepentingan (quasi political)
7. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik
8. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik
9. mencari jabatan politik atau administratif
10. menduduki jabatan politik atau administratif

Tentu saja, studi-studi yang dilakukan belakangan telah mengembangkan lebih jauh konsep partisipasi di atas. Pengembangan itu dilakukan misalnya dengan membedakan partisipasi dalam dua kelompok besar, yaitu **partisipasi politik konvensional** dan **partisipasi politik non konvensional**.

Partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang relatif rutin dilakukan, menggunakan saluran-saluran yang terinstitusionalisasi dalam sebuah sistem pemerintahan yang berasaskan keterwakilan. Termasuk dalam jenis partisipasi ini misalnya memilih dalam pemilu.

Sedangkan, partisipasi politik non konvensional merujuk pada tindakan-tindakan politik tak lazim yang ditujukan terutama untuk melawan atau menentang saluran-saluran politik yang disediakan pemerintah. Seseorang yang melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional cenderung menolak atau tidak mempercayai sistem politik yang ada. Di sisi lain, mereka juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi akan dampak dari aktivitas politik yang mereka lakukan dan umumnya juga memiliki tingkat kesadaran/ keeratan kelompok yang tinggi. Termasuk dalam jenis partisipasi ini adalah demonstrasi-demonstrasi dan berbagai aksi protes.

Mengembangkan lebih lanjut dua model partisipasi tersebut, Ogris dan Westphal (2006) mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam tiga domain utama, yaitu:

1. Partisipasi politik yang dilakukan dalam kerangka sistem perwakilan (***participation within the representative system***) atau disebut juga dengan *institutional participation*.

Termasuk dalam domain ini, aktivitas-aktivitas terkait pemilu seperti voting, berpartisipasi dalam kerja-kerja kepartaian, serta partisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye (formal dan informal) pada masa pemilu.

2. Aktivitas yang dilakukan dalam kerangka demokrasi-partisipatif (*participation within participatory democracy*) atau disebut dengan *protest politics*.

Termasuk dalam kategori ini adalah partisipasi dalam diskusi dan debat-debat publik, partisipasi dalam aksi-aksi demonstrasi secara damai, aksi pemboikotan produk-produk tertentu (dengan alasan politis), aksi-aksi politik yang melibatkan kekerasan (blokade jalan, pendudukan kantor-kantor pemerintahan, dan sebagainya), dan aktivitas pencarian informasi politik (seperti mengkonsumsi berita di media massa).

3. **Value oriented activities**, yaitu aktivitas yang berorientasi pada sosialisasi atau promosi prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi tertentu seperti hak asasi manusia, hak kelompok minoritas, kesetaraan pria dan wanita, dan sebagainya.

Termasuk dalam domain ini berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam menyosialisasikan agenda-agenda demokratisasi.

2.2. Voting

Ada banyak pilihan aktivitas yang dapat dilakukan seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Ia dapat bergabung dengan salah satu partai politik, bergabung dengan kelompok-kelompok oposisi, melakukan tuntutan hukum, atau bahkan hal-hal yang lebih agresif seperti demonstrasi dan boikot. Namun, kenyataannya kebanyakan orang cukup berpartisipasi dalam politik dengan memberikan hak suara pada pemilihan umum.

Dalam setiap sistem demokrasi modern, *votes* adalah hal yang paling mendasar dari segala macam bentuk kekuatan politik. Pada akhirnya, kelompok yang dapat meraih suara terbanyak yang akan memiliki kesempatan untuk memerintah. Karena itu, pemilih sebagai pemberi *votes* adalah unit dasar dari kekuatan politik. Seorang kandidat tidak akan berhasil menjadi pemenang, meskipun ia memiliki semua kompetensi kepemimpinan, kecuali ia juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi *voters*.

Voter turnout atau keikutsertaan dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sekaligus bentuk partisipasi yang paling dasar. Model yang paling umum untuk menjelaskan voter turnout adalah model status sosial ekonomi atau penggunaan faktor-faktor sosiodemografis, yaitu penjelasan bahwa

voter turnout akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, kelompok umur, agama, jenis kelamin, dan gender (Verba, et. al. : 1978).

Menurut model ini, partisipasi seseorang dalam pemilu disebabkan oleh kesadaran tentang arti penting pemilu bagi kepentingan dirinya dan kepentingan publik. Hasil pemilu akan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang akan berlaku pada semua warga negara, termasuk dirinya. Karena itu, faktor sosial ekonomi berperan dalam menentukan apakah seseorang memutuskan untuk ikut pemilu atau tidak. Publik yang secara sosial ekonomi paling berkepentingan dengan pemilu, akan memiliki kesadaran tentang arti penting pemilu, sehingga selanjutnya akan cenderung untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Kesadaran tentang arti penting pemilu sendiri akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Semakin terdidik suatu individu, diasumsikan akan memiliki kesadaran yang lebih baik tentang arti penting pemilu bagi dirinya. Karena itu, individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik akan cenderung untuk berpartisipasi dalam pemilu dibandingkan dengan mereka yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Status pekerjaan juga mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam pemilu. Orang yang tidak memiliki pekerjaan diasumsikan lebih terfokus perhatiannya pada upaya mencari pekerjaan, sehingga cenderung tidak berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan sebaliknya, orang yang memiliki pekerjaan diasumsikan akan cenderung berpartisipasi dalam pemilu.

Jenis pekerjaan juga dianggap mempengaruhi partisipasi seseorang dalam pemilu. Individu yang bekerja pada sektor-sektor yang gampang terpengaruh dengan kebijakan pemerintah cenderung akan terdorong untuk mengikuti pemilu dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang lebih sedikit terpengaruh dengan kebijakan pemerintah. Sektor-sektor yang mudah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah itu misalnya adalah pegawai negeri (dan mereka yang bekerja di sektor pemerintahan lainnya), pekerja kerah putih, dan pengusaha. Mereka inilah yang dianggap pekerjaannya ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang berkuasa, sehingga akan cenderung terdorong untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemerintah yang akan berkuasa tersebut.

Sementara untuk tingkat penghasilan, orang dengan tingkat penghasilan lebih baik akan diasumsikan cenderung berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini

karena mereka lebih memiliki kesempatan untuk mengakses informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pemilu, termasuk informasi mengenai kebijakan publik yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk menyadari arti penting pemilu.

Dalam hal jenis kelamin, laki-laki dianggap memiliki partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki dinyatakan cenderung lebih aktif melakukan aktivitas-aktivitas politik seperti mengikuti demonstrasi atau menyatakan pendapatnya tentang persoalan-persoalan publik tertentu. Keaktifan mereka yang berjenis kelamin laki-laki ini dinyatakan sebagai akibat kesempatan yang lebih mereka miliki untuk berpartisipasi dalam politik dibandingkan mereka yang berjenis kelamin perempuan.

Meski demikian, seperti juga telah diungkapkan pada awal tulisan, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik ini tidak selalu berlaku sama pada semua konteks waktu dan tempat. Pada masyarakat yang berbeda, hasil yang diperoleh bahkan mungkin akan bertentangan. Misalnya saja, untuk faktor pendidikan, terutama di negara-negara berkembang, bahwa mereka yang berpendidikan rendah justru lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini disebabkan mereka lebih mudah dimobilisasi untuk mengikuti pemilu.

Hasil ini seperti yang misalnya ditemukan Saiful Mujani (2007) dalam penelitiannya tentang perilaku pemilih dalam pemilu legislatif dan presiden di Indonesia pada tahun 2004. Menurutnya, untuk konteks Indonesia, terdapat fenomena yang disebutnya kemunculan "pemilih naif". Pemilih naif tersebut ditandai oleh pola bahwa partisipasi dalam pemilu secara positif dipengaruhi oleh sikap partisan dan keterlibatan dalam kehidupan sosial keagamaan dan kelompok warga yang lebih berumur. Sedangkan, warga yang lebih berpendidikan, lebih baik pendapatannya, dan tinggal di perkotaan, justru cenderung absen dalam pemilu.

Jocelyn Evans dalam "Voters and Voting: An Introduction (2004) juga menyatakan bahwa dibanding sebagai *predictor* yang dapat memperkirakan 100% faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berpartisipasi dalam politik, faktor-faktor sosiodemografis lebih tepat digunakan untuk memperkirakan siapa yang lebih memiliki kemungkinan untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam politik.

Terkait dengan ketidakikutsertaan seseorang dalam pemilu (golongan putih/golput) atau *abstention*, Evans menyatakan bahwa hal itu umumnya dipandang sebagai tindakan negatif yang menunjukkan adanya masalah dalam sistem. Pemilih yang memutuskan tidak memilih dalam pemilu dinyatakan sebagai seseorang yang "***disenfranchised***". ***Disenfranchisement*** adalah proses peminggiran hak-hak seseorang sebagai seorang pemilih dan bahkan secara lebih luas sebagai warga negara.

Dalam konteks *abstention* atau golput, hal ini menunjukkan situasi ketika seorang pemilih merasa dipinggirkan dari proses-proses politik. Atau, merupakan situasi ketika seorang pemilih merasa bahwa sistem dan mekanisme politik yang tersedia tidak dapat mewakili kepentingannya. Mereka umumnya merupakan kelompok masyarakat yang secara sosial dan ekonomi tidak beruntung, dan tidak memiliki cukup saluran (seperti organisasi dan sebagainya) untuk menyuarakan kepentingannya. Fenomena *abstention* di Amerika Serikat, adalah contoh yang umum akan hal ini.

Dalam konteks *abstention* pula, sistem politik dinyatakan tidak memperhatikan kepentingan mereka yang memutuskan abstain dalam pemilu ini. Mereka tidak merasa menjadi bagian dari proses politik, sehingga merasa sistem politik yang ada tidak demokratis, korup, dan tidak ada gunanya. Karena itulah, mereka tidak memberikan suara mereka, dengan maksud tidak memberi legitimasi pada sistem politik yang ada.

Terlepas dari hal-hal itu, menarik juga untuk mencatat bahwa keikutsertaan seorang pemilih dalam pemilu, tidak selalu perlu ditafsirkan sebagai hal yang sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Evans menyatakan, bahkan terdapat analisis bahwa voter turnout yang sangat tinggi menunjukkan tingginya pula potensi konflik sosial sehingga dapat berakibat pada ketidakstabilan politik.

Di AS misalnya, tingkat *voter turnout* rendah karena konflik ideologi telah menghilang dalam masyarakat, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan mobilisasi politik tidak menyebar luas. Hal sebaliknya terjadi di beberapa negara Eropa, dimana friksi ideologi dan politik terjadi dengan tajam, sehingga berakibat pada tingginya *voter turnout*.

Di sini kita perlu menyinggung preferensi pemilih dalam pemilu. Dalam kajian budaya politik, preferensi politik merupakan bagian dari sub kultur politik, yaitu turunan dari konsep budaya politik yang lebih makro seperti orientasi seseorang

terhadap sistem politik. Dalam konteks ini, sejumlah orang dapat saja memiliki budaya politik secara makro yang sama, yaitu misalnya penerimaan dan dukungan terhadap sistem demokrasi, namun memiliki preferensi politik yang berbeda (seperti misalnya mendukung atau menolak kebijakan-kebijakan berdasarkan ideologi/ haluan tertentu). Secara ideal, keragaman sub kultur politik inilah yang kemudian membelah preferensi pemilih dalam pemilu.

Namun, kenyataannya, preferensi politik pemilih ditentukan oleh faktor-faktor yang lebih luas dibandingkan keragaman ideologi. Faktor lain yang turut menentukan itu misalnya party identification (identifikasi diri dengan partai). Party identification, walaupun sebagiannya juga ditentukan oleh ideologi, namun melibatkan pula variabel-variabel lain yang tidak selalu ideologis.

Party identification merupakan perasaan keterlibatan dan memiliki yang terdapat dalam diri seseorang terhadap sebuah partai politik. Dengan kata lain, adalah sikap dan perasaan psikologis tentang partai politik yang terdapat di dalam diri seseorang. Yang diukur oleh para ilmuwan politik biasanya adalah arah dan intensitas dari identifikasi partai yang dimiliki oleh seseorang.

Identifikasi partai pada diri seseorang diperoleh sejak ia menerima sosialisasi politik dari kedua orangtuanya. Karena itulah anak-anak di AS sudah dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang demokrat atau republik, mengikuti identifikasi partai yang dimiliki orangtuanya.

Isu lain terkait identifikasi partai adalah fluktuasi atau perubahan identifikasi partai. Di Prancis, identifikasi partai yang dimiliki seseorang cenderung labil dan berubah-ubah. Namun di sejumlah negara lain seperti AS, Swiss, atau Kanada, identifikasi partai cenderung kuat dan stabil. Meski demikian, fluktuasi tetap saja fenomena yang terjadi.

Sebagian warga negara Amerika berpindah partai karena alasan-alasan pribadi seperti misalnya pasangan hidupnya memiliki loyalitas terhadap partai yang berbeda sehingga dia kemudian pindah partai untuk menjaga kerukunan. Alasan lainnya misalnya perubahan status sosial ekonomi atau perpindahan lokasi tempat tinggal, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru tersebut. Namun, secara politis, fluktuasi yang signifikan adalah fluktuasi yang terjadi pada sejumlah besar orang sehingga kemudian mengubah keseimbangan kekuatan politis.

Identifikasi partai berfungsi sebagai alat utama yang dapat dijadikan landasan bagi orang untuk dapat mengerti dan memahami peristiwa-peristiwa politik, isu-isu, berbagai macam kepribadian, tuntutan-tuntutan, dan tuntutan-tuntutan balik yang membanjiri masyarakat melalui media komunikasi. Oleh karena itu tidak heran para ilmuwan politik telah secara konsisten menemukan hubungan antara intensitas identifikasi partai dengan hampir semua aspek dari perilaku memilih.

Faktor lainnya yang menentukan preferensi politik adalah *issue orientation* (orientasi pada partai). Hal ini merupakan persepsi pemilih tentang permasalahan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintahan.

Untuk memperoleh dampak yang terukur terhadap perilaku memilih, sebuah isu harus memenuhi tiga prasyarat. Pertama, para pemilih harus menyadari eksistensinya dan memiliki pendapat tentang hal itu. Kedua, isu tersebut harus cukup mampu menggugah sehingga mempengaruhi mereka dalam memberikan suara. Ketiga, pemilih harus mempersepsikan posisi yang diambil oleh seorang kandidat atau partai tertentu dalam isu tersebut lebih dekat ke para pemilih tadi daripada kandidat atau partai lain. Hanya ketika sebuah isu memenuhi ketiga prasyarat itulah maka jumlah suara yang besar dapat menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap hasil sebuah pemilihan politik.

Faktor penentu lainnya adalah *candidate orientation* (orientasi pada kandidat). Yaitu pendapat pemilih terhadap kualitas diri seorang kandidat, terlepas dari partai pendukung mereka atau posisi yang mereka ambil terhadap suatu isu.

Yang perlu diperhatikan, orientasi kandidat tidak pernah menjadi satu-satunya pertimbangan orang dalam memilih dan seringkali bahkan tidak menjadi sesuatu yang penting. Kekuatannya tergantung pada beberapa hal seperti tipe pemilihan yang diadakan, apakah keadaan dipersepsikan akan bertambah baik atau buruk, dan sebagainya.

Sementara di AS orientasi kandidat merupakan sesuatu yang cukup signifikan pengaruhnya, di beberapa negara lain terutama yang menganut demokrasi parlementer, faktor ini kurang memiliki pengaruh. Hal ini kemungkinan disebabkan para pemimpin negara tersebut tidak dipilih secara langsung tetapi melalui kerja partainya yang memperoleh kedudukan mayoritas di parlemen. Meski demikian, di beberapa negara dengan sistem parlementer, ternyata kepribadian para calon pemimpin terlihat kian menjadi hal yang penting dalam kampanye pemilihan. Gejala ini sering dikatakan sebagai *Amerikanisasi politik*.

Studi pemilihan di beberapa negara demokrasi telah memaparkan sejumlah pola tingkah laku para pemilih yang banyak membuka informasi tentang bagaimana demokrasi bekerja di dunia modern. Berikut adalah sejumlah faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi selera pemilih.

Pertama, adalah faktor status sosial . Faktor selera pemilih yang berlaku secara umum di hampir seluruh negara demokrasi adalah status sosial. Termasuk di dalamnya pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Di hampir semua negara demokrasi, masyarakat dengan kelas sosial bawah akan memilih partai yang berafiliasi pada ideologi kiri (marxisme atau komunisme), sedangkan masyarakat dengan kelas sosial atas akan berafiliasi pada partai dengan ideologi kanan (liberal).

Di Amerika Serikat sendiri, mayoritas kelompok orang yang lebih kaya pada umumnya memilih partai Republik, dan mayoritas orang yang lebih rendah posisinya pada umumnya memilih partai Demokrat.

Faktor kedua, adalah jenis kelamin. Sampai dengan tahun 70 an, perbedaan politik yang signifikan antara pria dan wanita di AS dan negara-negara demokrasi lainnya adalah jumlah pemilih wanita 10 - 20 % lebih sedikit dari pemilih pria. Perbedaan ini mencapai tingkat tertinggi di golongan yang memiliki tingkat pendidikan terendah, dan perbedaan terkecil terdapat pada mereka yang berpendidikan setingkat universitas. Hal ini sebagian disebabkan oleh keharusan wanita mengurus rumah tangga dan anak-anak, sehingga lebih menyulitkan untuk pergi keluar dan memilih. Tapi sebenarnya, lebih utama, perbedaan itu disebabkan pemikiran yang memandang politik itu adalah urusan kasar dan kotor para pria, sehingga apabila wanita berpolitik dipandang tidak feminin. Namun demikian, pada akhir tahun 70an perbedaan tersebut telah hilang dan sekarang jumlah pemilih wanita sama besarnya dengan pemilih pria.

Sampai dengan akhir tahun 70an, mayoritas studi tingkah laku pemilih dan opini publik tidak menemukan perbedaan yang berarti dalam hal selera politik antara pria dan wanita. Namun kemudian studi-studi berikutnya menunjukkan bahwa dalam pemilihan presiden tahun 1980, 55 % pria lebih memilih Reagan dibandingkan Carter yang hanya mencapai 36 %, sedangkan pemilih wanita yang mendukung Reagan mencapai 47 % dan Carter 45 %.

Faktor ketiga adalah agama. Beberapa negara seperti Italia dan Israel, memiliki partai-partai politik berbasis agama yang didukung secara loyal oleh

pemilihnya. Namun, negara demokratis lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris, tidak mempunyai partai-partai keagamaan. Meski demikian, para pengikut sebuah keyakinan ditemukan cenderung mendukung partai tertentu.

Di Amerika Serikat pada awal-awal tahun 30an sampai dengan 80an mayoritas pengikut Katolik Roma dan Yahudi biasanya mendukung partai Demokrat, sedangkan mayoritas pengikut Protestan mendukung partai Republik. Pada pemilihan presiden tahun 1928 dan 1960 afiliasi Katolik Roma dengan Alfred E. Smith and John F. Kennedy mempunyai peran yang besar.

Kecenderungan politik berdasarkan agama seperti ini memudar di tahun 80an, tetapi para pendukung kuat konservatif dan simpatisan Republik dari berbagai kelompok protestan evangelical memainkan peran yang makin besar. Dan di Inggris, para pengikut Gereja Inggris pada umumnya mendukung partai Konservatif, sedangkan partai Buruh mendapatkan dukungan besarnya dari pengikut Protestan (selain Anglican), Yahudi, dan non agama.

Faktor lainnya yang mempengaruhi preferensi politik adalah kecenderungan ticket splitting (pemilih yang membelah dukungannya). Yaitu pemilih yang memilih kandidat dari partai berbeda untuk posisi berbeda dalam satu waktu pemilihan yang diikutinya. Fenomena ini sedikit (atau bahkan tidak) dipengaruhi oleh faktor ideologi, namun cenderung didorong oleh pertimbangan-pertimbangan yang lebih pragmatis.

Fenomena ini juga dimungkinkan oleh struktur pemerintahan dan sistem pemilihan umum Amerika yang menganut federalisme dan perpecahan kekuasaan. Sistem ini membuat para pemilih harus berhadapan dengan sejumlah kandidat untuk kursi eksekutif atau legislatif yang berbeda-beda dalam berbagai tingkatan pemilihan mulai dari nasional, negara bagian, dan tingkatan lokal.

Hal ini sangat berbeda dengan demokrasi berbasis parlementer, terutama di negara-negara seperti Kanada atau Inggris Raya. Ketika Kanada melakukan pemilihan nasional, setiap suara dari seorang pemilih hanya dapat diperuntukkan bagi anggota House of Commons yang berasal dari distrik tempat pemilih itu berada (distrik parlemen). Sehingga tidak ada kesempatan untuk memberikan suara untuk memilih perdana menteri atau menteri urusan luar negeri atau anggota Senat.

Orang seperti apa yang membelah suara mereka? Riset menunjukkan bahwa kalangan pemilih model ini merupakan orang yang sangat berpendidikan, lebih banyak bekerja pada jenis pekerjaan kerah putih dan merupakan orang-orang profesional, memiliki gaji yang lebih baik, dan memiliki umur yang lebih muda.

Sementara itu, dalam artikel yang ditulisnya, Russel Dalton (1993) menyatakan saat ini terjadi pergeseran kecenderungan politik pada publik. Kecenderungan itu adalah kian mengarahnya perilaku politik publik pada apa yang disebut sebagai individualisasi politik. Pilihan-pilihan politik seseorang kian dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat individual dibanding pengaruh-pengaruh dari lingkungan sosialnya.

Publik saat ini semakin terinformasi dan memiliki pengetahuan lebih tentang politik dibanding masa-masa sebelumnya. Hal ini mengakibatkan proses penentuan pilihan politik menjadi lebih kompleks. Isu-isu yang lebih kompleks dan teknis kini ikut mempengaruhi pertimbangan publik dalam memilih.

Secara tradisional, tingkah laku pemilih pada negara-negara demokrasi barat telah terstruktur secara kokoh dengan menonjolnya peran serikat-serikat perkumpulan dan gereja dalam mempengaruhi pilihan politik anggotanya. Hal ini karena kelompok-kelompok sosial merupakan rujukan termudah bagi khalayak untuk berpartisipasi dalam persoalan politik yang mungkin tidak terlalu diketahuinya. Namun, saat ini pengaruh kelompok-kelompok sosial tersebut terhadap pilihan politik khalayaknya semakin jelas mengalami penurunan. Keanggotaan seseorang dalam sebuah kelompok sosial kini tidak lagi secara signifikan berhubungan dengan posisi politik yang diambarnya.

Pihak yang paling terpengaruh dengan kecenderungan ini adalah partai politik. Khalayak kian menjauh dari perilaku partisan. Kecenderungan tersebut dalam beberapa hal juga dipengaruhi oleh kegagalan partai politik untuk merespon isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik. Meski demikian, pertumbuhan isu-isu baru yang non ideologis ternyata tidak juga secara baik diterjemahkan ke dalam bentuk partai politik massa.

Hal ini menjadikan tingkah laku politik khalayak menjadi kian sulit terprediksi. Fenomena seperti ticket splitting, inkonsistensi pilihan politik khalayak, dan fenomena lain yang menunjukkan melemahnya ikatan khalayak menjadi umum ditemukan.

Inilah yang disebut sebagai “individualisasi politik”. Yaitu ketika individu mencoba untuk berinteraksi langsung dengan kompleksitas persoalan politik dan memutuskan sendiri pilihan-pilihan politiknya dibanding mempercayakannya pada kelompok sosial atau partai politik tertentu. Pertimbangan yang kini dipegang khalayak adalah kebijakan, penilaian terhadap penampilan, atau citra kandidat di mata khalayak.

Media juga turut memperkuat kecenderungan individualisasi politik khalayak. Media menyajikan beragam informasi politik, yang kerap kali kritis, pada khalayak tentang partai politik, industri, atau isu-isu politik tertentu.. Sehingga, hal ini menjadikan khalayak memiliki perspektif lebih kritis atas suatu persoalan. Akses pada beragam informasi ini juga menjadikan khalayak menjadi penyeleksi yang aktif terhadap informasi politik dibandingkan hanya sebagai konsumen yang pasif.

Media yang menyajikan suatu peristiwa politik (seperti penampilan kandidat tertentu) pada khalayak secara dekat, mengakibatkan perlunya perhatian pada faktor karakteristik personal dari kandidat seperti kompetensi dan integritas sebagai factor yang turut menentukan pilihan politik khalayak.

Konsekuensi lain dari individualisasi politik adalah meningkatnya keragaman isu yang menjadi minat publik. Hal ini membuat khalayak juga menjadi terfragmentasi ke dalam beberapa isu publik tertentu.

Penting juga dicatat bahwa individualisasi politik, selain memiliki sejumlah kelebihan, namun juga menyimpan beberapa ancaman terhadap demokrasi yang sehat. Hal itu misalnya saja penekanan berlebihan pada pemunculan terkini dari suatu isu politik atau kandidat tertentu menjadikan rasionalitas politik mengalami penyempitan makna. Selain itu, komunikasi langsung antara kandidat dan khalayak (sebagai upaya yang umumnya dilakukan kandidat atau partai politik untuk menjembatani kecenderungan individualisasi politik) justru berpotensi menimbulkan ekstremisme politik.

Pada akhirnya, dipertanyakan kembali apakah voting merupakan tindakan yang sederhana, karena seperti yang terlihat, tingkah laku seseorang dalam memilih tidak sederhana dan kompleks. Juga digarisbawahi bahwa bentuk-bentuk perilaku politik khalayak pada masa lalu mungkin tidak akan pernah kita lihat lagi, karena hal itu telah berubah secara permanen.

Salah satu hal yang sangat mengejutkan, studi dari Dalton juga menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara citra tentang warga yang demokratis dengan perilaku politik pemilih yang sebenarnya. Kecerdasan politik yang dimiliki publik tidak lagi bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang ideal secara teoritis. Bagi kebanyakan orang, kepentingan dan keterlibatan politik tidak lebih dari sebuah tindakan memberikan suara pada pemilihan umum di tingkat nasional atau negara bagian. Lebih dari itu, warga negara tidak sepenuhnya memahami makna partisipasi mereka dalam politik.

Para pemilih bahkan dinyatakan hampir sepenuhnya tidak mampu menilai rasionalitas dari tindakan pemerintah; hanya sedikit tahu beberapa kebijakan tertentu dan hal yang mendorong munculnya kebijakan tersebut; serta para pemilih tidak mampu menilai tujuan politik mereka sendiri dan kecocokan pilihan mereka dengan kepentingan pencapaian tujuan tersebut.

Studi-studi politik selanjutnya, dalam rangka menjelaskan perilaku politik pemilih, perhatian banyak diarahkan pada bagaimana individu memproses dan mengolah informasi. Teori yang terkenal dalam hal ini adalah Teori Skema. Seperti dinyatakan antara lain oleh Donald Kinder dan Robert Luskin, pendekatan dari studi ini adalah pada sistem keyakinan dimana individu mengorganisasikan sikap dan perilakunya.

“Teori Skema” menjawab dua pertanyaan mengenai pemikiran politik. *Pertama*, daripada melihat sistem keyakinan ini sebagai rangkaian berbagai ragam tindakan politik yang saling berhubungan, para analis justru lebih menyakini bahwa ada jaringan atau struktur keyakinan yang hirarkis dalam suatu domain politik tertentu. *Kedua*, struktur konseptual yang biasanya digunakan untuk mengorganisasikan informasi juga mungkin berbeda antara satu individu dengan individu lain. Oleh karena itu, berkembangnya kajian mengenai teori skema berupaya untuk untuk mengidentifikasi struktur (atau skema) kognitif (tindakan) tertentu yang relevan bagi sekelompok individu; semisal skema kebijakan luar negeri, atau skema rasial atau skema untuk mengevaluasi para kandidat politik.

Skema ini membantu mengorganisasikan pengetahuan yang ada sekaligus memproses informasi baru. Detail dan jumlah dari informasi yang dapat ditampung dalam struktur seperti ini bisa jadi berbeda tiap individu, namun

kehadiran struktur tersebut menyediakan sebuah metode pengaturan informasi dan pembuatan keputusan politik bagi para pemilih.

Perdebatan mengenai kecerdasan terbatas yang dimiliki oleh para pemilih Amerika juga umumnya mengabaikan temuan kajian di berbagai negara lain bahwa level konseptualisasi dan kesadaran ideologis warga di luar AS ternyata jauh lebih tinggi. Penduduk Italia misalnya ditemukan dua kali lipat lebih ideologis dibanding Amerika. Para pemilih Jerman dan Belanda juga menunjukkan tingkatan kesadaran ideologis yang jauh lebih tinggi. Orang-orang Eropa tidak lebih maju dari orang Amerika secara kognitif, tetapi lingkungan politik dalam sistem Eropa sangat mempengaruhi bagaimana publik mereka melihat dunia politik.

Sebagian besar dari penelitian mengenai tingkah laku memilih di paruh pertama abad 20 menggunakan pendekatan sosiologis. Hal ini terutama disebabkan oleh dukungan data yang dimiliki adalah sensus demografis, yang diakui tidak bisa dengan mudah dibandingkan dengan pola memilih.

Pelopop dari pendekatan sosiologi dalam tingkah laku memilih adalah Paul Lazarsfeld. Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet berupaya untuk memahami bagaimana niat memilih bisa berubah sepanjang masa kampanye dengan mewawancarai sekelompok pemilih secara berulang-ulang pada tahun 1940 di masa pemilihan umum.

Kekurangan dari studi-studi itu adalah data mereka tidak langsung terkait dengan *primary groups* atau terkait dengan kelompok mereka dalam strata sosial. Asumsi dasarnya adalah bahwa tindakan memilih terkondisikan oleh diri orang itu sendiri dan apa yang dia percayai. Dengan kata lain, variabel sosiologis menciptakan konsep tentang kepentingan bersama dari kelompok orang yang mendukung sebuah partai dan pada akhirnya menentukan citra partai mana yang paling sesuai dengan kebutuhan berbagai macam orang.

Meskipun model sosial dari proses memilih memberikan kerangka yang berguna untuk mengidentifikasi keputusan kelompok pemilih, model ini memiliki beberapa keterbatasan. Model ini hanya mampu menjelaskan proporsi yang kecil dari suara kelompok pemilih Eropa dan proporsi yang lebih kecil mengenai suara kelompok pemilih Amerika yang kurang terpolarisasi. Lebih dari itu, pendekatan sosiologis menekankan pada kontinuitas dan stabilitas dan oleh karenanya memiliki peran yang terbatas dalam menjelaskan perubahan kelompok pemilih.

Meskipun dapat dilihat bahwa karakteristik sosiologis mempengaruhi perkembangan identifikasi partai, pendekatan psikologis berpendapat bahwa keterikatan partai (partisanship) lebih sederhana dari gambaran politik atas latar belakang dan status sosial pemilih saat ini.

Karakteristik sosial seperti itu hanya memiliki arti yang terbatas dalam menyediakan struktur evaluatif mengenai tingkatan fenomena berbeda yang dihadapi oleh para penduduk. Kelas sosial, semisal, tidak memberikan petunjuk para pemilih dalam melihat isu-isu yang tidak relevan dengan penilai "kelas"

Pandangan psikologis berpendapat bahwa tindakan identifikasi partai berfungsi untuk menyaring pandangan individu mengenai dunia politik dengan tidak hanya membantu mereka untuk membuat pilihan politik (semisal mendukung suatu partai tertentu) tetapi juga berfungsi sebagai saran untuk menilai isu-isu jangka pendek dan proses pemilihan kandidat karena partai politik adalah aktor utama dalam sebagian besar konflik politik. Lebih dari itu, variabel psikologis memiliki kedekatan langsung kepada para pemilih, karena mereka lah yang secara lebih dekat terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

Paradigma lain dalam kajian kelompok pemilih, yang bisa kita sebut sebagai "pendekatan ekonomis" paling tidak sebagian dikembangkan sebagai kelanjutan logis dari model sosiologis dan psikologis. Kedua model terdahulu sama-sama menekankan pada sumber petunjuk dari para pemilih yang relatif stabil yang dinilai sebagai model memilih yang memuaskan. Pendekatan ini berpendapat bahwa penduduk dapat mengembangkan cara yang lebih sederhana dalam menggunakan faktor-faktor tindakan, seperti opini publik terhadap satu isu dan evaluasi terhadap kandidat, sebagai dasar dari pilihan mereka.

Perspektif ini diperkenalkan oleh Anthony Downs melalui tulisannya dalam sebuah buku yang diterbitkan tahun 1957 berjudul, *An Economic Theory of Democracy*. Aksioma yang paling mendasar dari teori Downs adalah bahwa penduduk bersikap rasional dalam politik. Ketika tiba saatnya bagi mereka untuk memberikan suara, Downs menulis bahwa "aksioma ini berlaku dengan setiap penduduk akan memberikan suara mereka pada partai yang dia percaya akan memberikannya keuntungan yang lebih besar dibanding partai lain". Kunci dari proses pengambilan keputusan ini adalah persepsi para pemilih mengenai kegunaan (hasil) yang diharapkan.

Terjadi perubahan-perubahan dalam kondisi ekonomi yang kapitalis disertai dengan perubahan lain dalam struktur sosial. Semua negara industri yang demokratis sama-sama menjadi semakin makmur setelah perbaikan ekonomi pasca perang. Hal ini makin mengaburkan kelas pekerja, membuat kesenjangan hidup makin menipis, dan oleh karena itu menghapus arti penting konflik politik berdasarkan perbedaan kelas.

Dorongan perubahan tersebut dan dorongan sosial lain mentransformasikan komposisi masyarakat kontemporer menjadi berbeda secara signifikan dibanding masa sebelumnya. Pada tahun 1948, misalnya, jumlah penduduk Amerika yang hanya mengenyam pendidikan dasar berjumlah tiga kali lipat dari mereka yang bisa duduk di pendidikan tinggi. Namun pada tahun 1988 perbandingan ini sudah hampir terbalik. Perubahan yang sama atau lebih baik juga terjadi di beberapa negara demokratis lain. Basis kelas sosial, keagamaan, dan masyarakat telah mengalami perubahan yang sangat besar.

Dalam studi-studi awal tentang sistem kepartaian modern, seperti Arend Lijpart, perbedaan kelas diidentifikasi sebagai dimensi utama dalam perdebatan ideologis di hampir semua negara demokratis.

Namun demikian, salah konsep pilar perilaku memilih dalam sosiologi ini sudah retak sejak 20 tahun lalu. Penurunan tindakan memilih berdasarkan kelas sudah menjadi tren yang umum dan dapat ditemukan hampir di semua negara demokrasi dengan sistem kepartaian yang sudah mapan.

Penurunan serupa juga terlihat di beberapa negara Eropa Utara yang demokratis dimana pembedaan kelas pada awalnya juga kuat seperti Inggris, Belanda, dan Swedia. Di negara-negara dimana *voting* berdasarkan kelas sudah tidak terlalu nampak, seperti Perancis, kecenderungannya makin melemah saja. Bahkan, di sistem kepartaian Jerman yang unik sekalipun dimana dorongan sosial menyuburkan pembedaan kelas, perbedaan pemberian suara berdasarkan kelas juga semakin mengecil dalam beberapa tahun terakhir.

Di AS, pada era setelah perang, kelas sosial hanya memiliki pengaruh yang lemah dalam basis dukungan jangka panjang sebuah partai. Pengaruh kelas dalam pemilihan Presiden mengalami pasang surut namun tidak pernah mencapai tingkat popularitas yang sama dengan yang pernah terjadi di periode New Deal pada tahun 1930 an.

Prediksi mengenai menghilangnya aspek kelas sebagai faktor yang mempengaruhi pemilih telah menimbulkan perdebatan akademis. Salah satunya adalah munculnya pendapat bahwa dikotomi ukuran yang jelas mengenai kelas sosial tidak dapat mengungkap kompleksitas struktur sosial saat ini, dan oleh karenanya kehilangan relevansinya dalam menjelaskan adanya pengaruh kelas dalam pemberian suara.

Dalam kaitan itu, John Goldthrope mengajukan kategorisasi kelas sosial yang baru dimana kategorisasi tersebut memasukkan aspek otonomi pekerjaan dan kekuasaan dalam hubungan ke dalam kriteria kelas yang tradisional seperti tingkat pendapatan dan pekerjaan. Ilmuwan lain menggunakan jabatan pekerjaan untuk menciptakan daftar kategori kelas yang lebih luas yang mencakup konteks sosial baru seperti kelas menengah atau pekerja kerah-biru.

Salah satu respon atas turunnya voting berdasarkan kelas adalah upaya untuk mengeksplorasi faktor lain di luar faktor pekerjaan sebagai basis baru pembedaan sosial-ekonomi. Beberapa peneliti mengajukan faktor pendidikan sebagai faktor yang mungkin membentuk basis pembedaan politik tersebut (pemilih kaya informasi dan dari pemilih miskin informasi).

Namun, bagaimanapun berbagai pendekatan alternatif ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan perilaku voting secara seutuhnya.

Meskipun terdapat adanya bukti mengenai pilihan yang didasarkan pada agama, ada beberapa indikasi yang memperlihatkan bahwa keterikatan agama mengalami penurunan sebagaimana faktor kelas sosial. Kebanyakan negara – negara Barat mengalami penurunan keterikatan terhadap agama dalam 40 tahun terakhir secara berkala.

Pada intinya, juga terjadi tren sekularisasi, yaitu semakin sedikit para pemilih yang bergabung dalam jaringan keagamaan dan terpengaruh dengan nilai-nilai agama yang bisa mengiringnya pada satu pilihan tertentu. Selain itu, juga melemahnya hubungan antara pemimpin agama dan partai politik di negara-negara Barat.

Pada umumnya, survei-survei menunjukkan adanya hubungan yang erat antara keterikatan politik dan voting dalam pemilihan umum, terutama dalam pemilihan parlemen.

Contohnya, hanya 11% dari partisan partai di Inggris yang berpindah dari partai pilihan mereka pada pemilu 1979 dan hanya 5% dari partisan di Jerman Barat yang berpindah pada pemilu 1983. Namun, di AS, sikap partisan cenderung lebih longgar, mungkin karena luasnya pilihan yang tersedia baik di level lokal, negara bagian atau federal. Pemisahan antara identifikasi diri terhadap partai dan *voting* banyak ditemukan di pemilu Amerika.

Indikator yang sering digunakan untuk menilai hal ini adalah meningkatnya *split-ticket voting* di kalangan pemilih AS. Tren ini merupakan bukti konstannya pendapat masyarakat Amerika bahwa seseorang harus memilih karena orangnya bukan partai.

Prinsip untuk mengedepankan kandidat dibanding partai politik dalam proses pemilihan adalah bagian dari konsensus masyarakat AS. Salah satu alasannya adalah bahwa partai politik tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam politik Amerika. Analisis mengenai pola voting di Amerika sepanjang abad 20 memperlihatkan dengan jelas tren ini.

Bersamaan dengan tren peningkatan pembagian pemberian suara adalah penurunan identifikasi partai. Penelitian mengenai pemilihan umum selama periode 1952 – 1964 memperlihatkan bahwa 75 % dari para pemilih mengidentifikasi diri mereka sebagai pendukung Partai Demokrat atau Republik. Akan tetapi, presentasi ini menurun menjadi hanya 64 % pada tahun 1972.

Meskipun di negara-negara Eropa masih memiliki kecenderungan partisan yang lebih tinggi dibanding AS, namun suatu hal yang sangat menarik, perkembangan di AS ternyata memiliki pengaruh dalam menurunkan laju kecenderungan ini.

Mengendurnya ikatan partisan di sejumlah negara Eropa mulai ditemukan dalam banyak riset terakhir. Misalnya, lebih dari 40% publik Inggris yang merupakan partisan yang kuat sepanjang akhir 1960an, telah berkurang menjadi setengahnya hanya dalam kurang dari satu dekade.

Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan kecenderungan menurunnya sikap partisan ini. Salah satunya adalah penurunan peran partai sebagai institusi politik. Banyak dari fungsi yang biasa dimainkan oleh partai politik kini telah diambil alih oleh institusi lain.

Terakhir, kembali ke persoalan voter turnout, penting mempertimbangkan perspektif Michael Schudson (2001) yang menganalisis voter turnout berdasarkan bagaimana seorang warga negara memaknai aktivitas politik yang dilakukannya tersebut.

Bagi Schudson, politik bukan kategori yang statis dan tidak berubah sepanjang waktu. Politik, menurutnya, merupakan praktik budaya karena ia terdiri atas seperangkat simbol, makna, dan tindakan-tindakan ritual. Schudson mengamati, elemen-elemen budaya ini, senantiasa mengalami perubahan sepanjang perjalanan sejarah politik Amerika Serikat. Politik berubah dari bersifat antusiasme, menjadi bersifat informasional (rasional, dengan sedikit keterlibatan emosi).

Schudson juga selanjutnya menganalisa, bahwa perkembangan sistem pemilu semakin mengarahkan pada trend rasionalitas pemilih. Mekanisme pemilihan semakin rumit dan mensyaratkan tingkat intelektualitas tertentu. Hal ini membuahkan konsekuensi pada tumbuhnya model pemilih yang lebih individual, terdidik, dan rasional. Namun akibat negatifnya adalah terjadi penurunan partisipasi pemilih. Ini dikarenakan pemilu bergeser maknanya dari sesuatu yang menggairahkan dan penuh emosionalitas, menjadi sesuatu yang lebih rasional dan cenderung membosankan.

2.3. Konsep tentang Budaya Politik dan *Civic Culture*

Untuk memahami konsep mengenai civic culture, kita terutama akan merujuk pada studi klasik yang dilakukan Gabriel Almond dan Sidney Verba.

Perhatian pada budaya politik mungkin sebelumnya tidak banyak diberikan para ilmuwan sampai datangnya kajian yang dilakukan oleh Almond dan Verba. Di tengah kegandrungan para ilmuwan politik untuk mempelajari aspek-aspek pemikiran (seperti ideologi dan norma-norma politik) atau institusional dari politik (seperti lembaga-lembaga dan mekanisme demokrasi), Almond dan Verba justru memusatkan perhatiannya pada budaya politik, yaitu bagaimana karakter perilaku politik warga negara dalam sebuah sistem politik (Almond & Verba, 1984).

Menurut Almond dan Verba, sistem politik yang stabil biasanya disertai dengan budaya politik yang kongruen dengan sistem tersebut. Maksudnya, sistem politik tersebut didukung dan dilestarikan keberlangsungannya oleh nilai-

nilai dan perilaku politik yang sesuai yang dipraktikkan oleh warga negaranya. Oleh karena itu, berkali-kali keduanya menekankan pentingnya keserasian budaya politik dengan sistemnya.

Demikian pula dengan demokrasi. Menurut Almond dan Verba, sistem demokrasi dapat berjalan stabil dan bertahan di suatu negara hanya jika didukung oleh budaya politik yang sesuai dengan sistem demokrasi. Lebih jauh dinyatakan bahwa nilai-nilai dan perilaku yang bekerja mempertahankan institusi-institusi demokratis tersebut berhubungan dengan sebuah orientasi dimana orang memandang hubungan mereka dengan orang lain serta di sisi lain memandang kepentingan-kepentingan pribadi mereka sendiri.

Namun, apa saja nilai-nilai demokratis tersebut?

Sebenarnya Almond dan Verba tidak memberikan jawaban yang cukup tegas atas persoalan ini. Mereka bahkan mengakui bahwa mempelajari demokrasi berarti mempelajari perilaku dan perasaan. Dan hal ini merupakan faktor-faktor yang sangat sulit untuk diungkap secara lengkap. Mereka juga menyatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial Barat pun baru mulai mengkodifikasikan karakteristik-karakteristik dari pemerintahan yang demokratis ini.

Infrastruktur pemerintahan demokratis yang kompleks, mencakup eksistensi partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, media komunikasi, norma-norma operasi, dan prakondisi sosial psikologisnya baru disadari beberapa waktu belakangan oleh dunia Barat. Karena itu pula, citra tentang pemerintahan demokratis yang disampaikan khususnya kepada bangsa-bangsa baru umumnya bersifat tidak jelas, tidak lengkap, dan lebih ditekankan pada ideologi dan norma-norma hukum.

Selanjutnya, dinyatakan bahwa nilai-nilai demokratis tersebut merupakan hasil dari evolusi kebudayaan politik yang terjadi di negara-negara yang terlebih dulu mempraktikkan demokrasi. Kebudayaan politik itu juga bukan semata-mata budaya modern, melainkan kombinasi antara modernitas dengan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar kuat.

Contoh dari hal ini adalah Inggris. Pembangunan budaya politik di Inggris merupakan serangkaian pertemuan antara modernisasi dan tradisionalisme. Perubahan politik itu dijelaskan Almond dan Verba terdiri atas beberapa tahap berikut. Pertama, langkah sekularisasi berupa pemisahan diri dari gereja dan

munculnya sikap toleran terhadap perbedaan agama. Kedua, munculnya golongan pedagang dan keterlibatan lebih besar dari kelompok aristokrat dalam pemerintahan.

Para pedagang yang kaya dan aristokrat-aristokrat yang independen bahkan dinyatakan memainkan peranan yang penting dalam transformasi budaya politik di Inggris. Mereka tumbuh menjadi kekuatan politik penting, dan kemudian mentransformasikan tradisi feodal ke dalam tradisi parlemen. Hal ini pada gilirannya memungkinkan Inggris melewati masa absolutisme tanpa merusak keragaman budaya-budaya politik tersebut.

Civic culture sebenarnya hanyalah salah satu contoh dari budaya politik secara umum, yang diambil untuk merujuk pada orientasi politik yang khas, yaitu sebuah sikap terhadap sistem politik dan berbagai bagiannya, dan sikap terhadap peran seseorang dalam sistem tersebut. Lebih jauh, dalam posisinya sebagai nilai umum dan perilaku bersama sebuah kumpulan populasi, civic culture diformulasikan sebagai garis penghubung antara mikro politik dan makro politik.

Menurut Almond dan Verba, nilai-nilai dan perilaku yang tumbuh bersama dengan, dan kemudian sekaligus mempertahankan, institusi-institusi demokratis berhubungan dengan bagaimana orang memandang hubungan mereka dengan orang lain vis a vis dengan kepentingan pribadi mereka. Civic culture adalah nilai yang pluralistik, didasarkan pada komunikasi dan persuasi. Yaitu sebuah budaya konsensus dan keragaman, budaya yang memberikan peluang terjadinya perubahan, namun juga memoderasinya.

Terkait kebudayaan politik, Almond dan Verba mendefinisikannya sebagai orientasi sikap warga terhadap sistem politik dan berbagai elemennya serta bagaimana ia memandang peranannya dalam sistem tersebut. Mereka mengambil pengertian ini berdasarkan konsep kebudayaan secara umum yang berarti orientasi psikologis menuju berbagai obyek sosial. Pada level yang lebih luas, kebudayaan politik suatu masyarakat menunjuk pada pengertian sistem politik sebagaimana diinternalisasikan ke dalam kesadaran, perasaan, dan evaluasi penduduknya.

Kebudayaan politik suatu bangsa adalah merupakan distribusi pola-pola orientasi yang khusus dari suatu bangsa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik yang mereka miliki.

Dalam studi yang mereka lakukan tentang sikap dan nilai warga di 5 negara, Almond dan Verba mengklaim telah berhasil mengidentifikasi 3 bentuk umum dari budaya politik, yaitu:

1. parokial, yaitu dimana tidak ada perbedaan jelas antara peran politik dan harapan yang dipikirkan oleh pelaku-pelakunya
2. subyek, dimana telah muncul pembedaan antara peran politik dan institusi, namun warga secara umum masih menyikapi hubungan ini secara pasif
3. partisipan, yaitu dimana hubungan antara institusi-institusi khusus, opini warga, dan aktivitas warga berlangsung secara interaktif.

Mereka menyimpulkan skema umum ini sebagai berikut,

”Seorang partisipan diasumsikan sebagai seseorang yang memiliki kesadaran dan berpengetahuan tentang sistem politik, baik dalam aspek pemerintahan maupun aspek politik. Seorang subyek terlihat cenderung secara kognitif terorientasi terutama pada aspek-aspek output dari pemerintahan, baik eksekutif, birokrasi, dan peradilan. Sedangkan seorang parokial cenderung tidak memiliki kesadaran, atau hanya memiliki kesadaran yang samar, tentang sistem politik dalam semua aspeknya.”

Selanjutnya, suatu masyarakat pada praktiknya cenderung untuk memiliki kombinasi dari tipe-tipe atau karakteristik budaya politik ini. Civic culture misalnya, menunjukkan karakteristik partisipatif dimana tindakan partisipatif tersebut didasarkan pada asumsi mengenai rasionalitas, dimana budaya politik dan struktur politik berjalan beriringan (kongruen). Lebih jauh, dengan segala penekanannya atas partisipasi rasional dalam kehidupan politik, civic culture berkombinasi dengan (jadi bukannya menggantikan) orientasi subyek dan parokial.

Dipertahankannya perilaku-perilaku yang lebih tradisional ini dan penggabungan mereka dengan orientasi politik yang berkarakteristik partisipan telah mengarahkan pada terbentuknya sebuah budaya politik yang seimbang. Yaitu budaya politik yang di dalamnya aktivitas politik, keterlibatan warga negara, dan rasionalitas hadir tapi diseimbangkan dengan kepasifan, ketradisional, dan keteguhan pada nilai-nilai parokial.

Menyelidiki tema yang sama, Inglehart menemukan bahwa pada berbagai negara di Eropa, tingkat kepuasan terhadap hidup dan situasi politik, serta

tingkat kepercayaan antar pribadi (interpersonal trust), berkorelasi kuat dengan berlangsungnya demokrasi dalam jangka waktu relatif panjang dan stabil, serta dengan kesejahteraan masyarakatnya. Setelah menyelidiki variabel-variabel ekonomi, politik, dan budaya beberapa negara Eropa, Inglehart menyatakan bahwa praktik demokrasi tidak hanya bergantung pada faktor-faktor ekonomi saja. Beberapa faktor budaya yang spesifik adalah krusial, dan pada gilirannya mereka berkorelasi dengan pembangunan ekonomi dan kondisi makro politik. Demokrasi yang stabil merefleksikan interaksi dari faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya.

Almond dan Verba, serta kemudian Inglehart menyatakan bahwa jika sistem politik demokratis adalah sistem dimana warga negara biasa berpartisipasi dalam keputusan-keputusan politik, maka sebuah budaya politik yang demokratis seharusnya terdiri atas seperangkat keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang mendukung terjadinya partisipasi tersebut (Almond dan Verba, 1978). Lebih jauh, terkait dengan orientasi nilai partisipatif, adalah asumsi mengenai karakter perilaku yang rasional dalam berpartisipasi, yang berlawanan di sisi lain dengan perilaku emosional, yaitu keterlibatan yang didasari oleh sentimen-sentimen emosional.

Inglehart selanjutnya menyarankan adanya keterkaitan hubungan yang kuat antara institusi-institusi demokrasi dengan kesejahteraan ekonomi. Memberi perhatian pada karakteristik tentang nilai-nilai partisipasi yang rasional yang berhubungan dengan negara yang demokratis dan sejahtera sebagaimana dipikirkan Inglehart, studi saat ini yang berciri pandang mekanistik dan industrial serta berbudaya ekonomi pasar menyarankan agar cara pandang ini secara historis dan geografis dihubungkan dengan karakter demokrasi industrial dari negara Eropa dan Anglo Amerika yang dikaji Almond, Verba, dan Inglehart.

2.4. Civic Culture dan Keberlangsungan Demokrasi

Berdasarkan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba, yang selanjutnya dielaborasi oleh Inglehart, dinyatakan bahwa keberlangsungan dari institusi demokrasi sangat kuat dipengaruhi oleh faktor-faktor sikap dan perilaku warga negaranya. Faktor-faktor sikap dan perilaku yang dimaksud antara lain adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam mempengaruhi keputusan politik (*belief in one's ability to influence political decisions*); perasaan

yang positif terhadap sistem politik (*feelings of positive affect for the political system*); dan kepercayaan bahwa orang lain pada dasarnya dapat dipercaya (*belief that other citizens are basically trustworthy*). Faktor-faktor tersebut dinyatakan sebagai bagian dari konsep *civic culture* (Muller & Seligson, 1994).

Lebih lanjut, berdasarkan teori ini, dinyatakan bahwa *civic culture* merupakan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan demokrasi. Negara-negara yang memiliki tingkat *civic culture* yang tinggi, akan cenderung mampu mempraktikkan dan menjalankan sistem demokrasi lebih lama dibanding negara-negara dengan tingkat *civic culture* yang rendah.

Bertolak dari hipotesis ini, dilakukan studi lebih lanjut untuk menguji sejauh mana keberlakuan hipotesis itu pada praktiknya. Studi itu dilakukan oleh Edward N. Muller dan Mitchell Seligson dengan mempertimbangkan kemungkinan hipotesis alternatif bahwa *civic culture* justru lebih merupakan dampak atau efek dibandingkan variabel penyebab tumbuhnya demokrasi. Hipotesis ini didasarkan pada argumen bahwa tingginya tingkat *civic culture* dari warga negara justru ditentukan oleh pengalaman yang diperolehnya selama hidup di bawah pemerintahan yang demokratis.

Dinyatakan, pengalaman yang diperoleh seorang warga negara dari tinggal sekian lama di sebuah negara demokrasi yang stabil, akan menyebabkan meningkatnya atribusi-atribusi *civic culture* dari warga negara tersebut, seperti kompetensi politik subjektifnya (*subjective political competence*), kebanggaan dan rasa percaya dirinya terhadap sistem politik (*pride in the political system*), dan rasa kepercayaannya kepada orang lain (*interpersonal trust*). Meningkatnya atribusi-atribusi *civic culture* tersebut sendiri merupakan konsekuensi logis dari hasil pembelajaran yang dilakukan warga negara tersebut selama hidup di bawah pemerintahan yang demokratis.

Model Inglehart tentang pengaruh *civic culture* terhadap demokrasi, memiliki empat variabel, yaitu:

1. tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut
2. persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor tersier (untuk mengindikasikan jumlah kelas menengah)
3. indeks *civic culture* warga negaranya, yang terdiri atas variabel-variabel tingkat kepuasan hidup (*life satisfaction*), kepercayaan kepada orang lain

(interpersonal trust), dan kurangnya dukungan terhadap perubahan-perubahan yang bersifat revolusioner (lack of support for revolutionary change)

4. rentang waktu sistem demokrasi berlangsung di negara tersebut (a country's years of continuous democracy)

Seperti terlihat, model ini berupaya mencari faktor-faktor penyebab tumbuhnya demokrasi berdasarkan variabel-variabel pada level mikro (civic culture) maupun pada level makro (pertumbuhan ekonomi, jumlah kelas menengah, dan usia demokrasi). Lebih jauh, model ini mempostulatkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel anteseden yang mempengaruhi ketiga variabel lainnya. Sementara itu, jumlah kelas menengah dan tingkat *civic culture* merupakan variabel perantara (intervening variables) yang memediasi hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan usia keberlangsungan demokrasi. Artinya, lama atau singkatnya usia demokrasi sebuah negara dipengaruhi secara langsung oleh jumlah kelas menengah dan tingkat *civic culture* masyarakat di negara tersebut, dimana kedua variabel itu sebelumnya dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan.

Berdasarkan model ini pula, Inglehart menyatakan bahwa lebih dari separuh variasi usia demokrasi negara-negara di dunia dapat diprediksi hanya dari variabel budaya politiknya saja (civic culture). Sehingga, dari sini diperoleh kesimpulan tentang pengaruh budaya politik (civic culture) terhadap keberlangsungan demokrasi di suatu negara.

Namun, Muller dan Selligson selanjutnya mempertanyakan model ini dan melakukan kajian lebih lanjut. Jika Inglehart mempostulatkan pengaruh civic culture terhadap usia demokrasi, Muller dan Selligson mengajukan kemungkinan sebaliknya, yaitu bahwa usia demokrasilah yang mempengaruhi civic culture.

Untuk kepentingan itu, Muller dan Selligson menguji kembali hubungan antara variabel-variabel civic culture dengan demokratisasi. Ada 2 variabel utama yang digunakan Muller dan Selligson untuk mengukur indeks civic culture, yaitu kepercayaan terhadap orang lain (interpersonal trust) dan dukungan terhadap perubahan secara gradual (support for gradual reform).

Berdasarkan pengujian yang mereka lakukan, keduanya ternyata menemukan bahwa variabel ***interpersonal trust*** masyarakat di suatu negara

tidak memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan demokrasi di negara yang bersangkutan. Misalnya, Prancis dan Italia yang masyarakatnya memiliki tingkat interpersonal trust rendah, ternyata dapat mempertahankan kestabilan sistem demokrasinya. Sementara, Guatemala dan Panama yang masyarakatnya memiliki tingkat interpersonal trust yang tinggi, justru tidak mengalami kemajuan berarti dalam demokratisasi.

Meski demikian, keduanya juga menemukan bahwa variabel interpersonal trust bukannya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan demokratisasi. Namun, alih-alih mempengaruhi demokratisasi, variabel interpersonal trust justru dipengaruhi oleh demokratisasi. Pengalaman sebuah negara dalam menjalani demokrasi selama masa waktu yang cukup, memiliki pengaruh positif terhadap tumbuhnya *interpersonal trust* diantara warga negaranya.

Menurut Muller dan Selligson, hal ini dapat terjadi karena demokrasi memberikan kesempatan institusional kepada warga negaranya untuk melakukan kerja-kerja kolektif (dalam konteks partisipasi politik) secara damai. Dan memang melalui hal inilah demokrasi bekerja. Kerja-kerja kolektif ini, di lain pihak, hanya dapat terwujud jika terjalin hubungan interpersonal yang kuat diantara warga negaranya.

Sementara variabel interpersonal trust ditemukan sebagai dampak dari demokratisasi (bukannya penyebab demokratisasi seperti hipotesis awal), variabel civic culture lainnya, yaitu ***support for gradual reform*** (dukungan terhadap perubahan masyarakat secara bertahap), ditemukan mempengaruhi demokratisasi. Tingkat dukungan terhadap perubahan gradual berpengaruh positif terhadap perkembangan demokrasi. Semakin tinggi angka dukungan terhadap perubahan gradual pada masyarakat di suatu negara, semakin tinggi pula kecenderungan negara tersebut mempertahankan kestabilan demokrasinya.

Keduanya selanjutnya menemukan, variabel ini juga berdiri independen, dan tak terkait dengan variabel lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi atau tingkat heterogenitas budaya. Artinya, secara sendirian, variabel ini telah dapat berkontribusi terhadap perkembangan demokrasi di suatu negara, meskipun variabel-variabel makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (yang didalamnya terdapat faktor ketidakmerataan distribusi pendapatan) dan heterogenitas budaya tidak kondusif bagi demokrasi.

Contohnya Honduras. Negara ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, dan di lain pihak memiliki tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang tinggi. Namun, sebagian besar masyarakat Honduras, yaitu sejumlah 85%, ditemukan memberi dukungan pada perubahan yang dilakukan secara gradual dan cenderung membela status quo. Dengan kondisi-kondisi tersebut, negara ini memiliki tingkat perkembangan demokratisasi yang baik, yaitu adanya transisi dari bentuk pemerintahan yang otoriter kepada bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Sehingga, disimpulkan bahwa positifnya perkembangan demokrasi di Honduras dipengaruhi sangat erat oleh adanya dukungan dari masyarakatnya terhadap perubahan-perubahan secara gradual.

Temuan-temuan di atas, pada akhirnya mengantarkan Muller dan Selligson untuk menyimpulkan bahwa tesis tentang pengaruh civic culture terhadap demokratisasi dapat dibenarkan, dan hal itu tidak berlaku sebaliknya. Dengan catatan, civic culture yang dimaksud adalah variabel *support for gradual reform* (dukungan terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan secara gradual).

Meski demikian, Muller dan Selligson juga memberi catatan-catatan penting dalam menyikapi tesis ini. Yaitu, pertama, bahwa kekuatan pengaruh civic culture (dalam hal ini adalah *support for gradual reform*) relatif lebih lemah dibandingkan kekuatan pengaruh variabel makro, khususnya ketidakmerataan distribusi pendapatan. Kedua, variabel-variabel lain yang dimasukkan dalam kategori civic culture selain *support for gradual reform* (seperti *interpersonal trust*), tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi.

Karena itulah, secara keseluruhan, terkait tesis hubungan kausal antara civic culture dan demokratisasi, tidak ditemukan bukti-bukti yang meyakinkan untuk menyatakan civic culture merupakan variabel penting atau variabel utama yang mempengaruhi perkembangan demokratisasi di suatu negara.

Dalam model yang mereka kembangkan, Muller dan Selligson justru menyatakan variabel penentu dari demokratisasi suatu negara bukanlah faktor-faktor terkait sikap warga negaranya, melainkan variabel ekonomi makro, khususnya ketidakmerataan distribusi pendapatan. Besarnya pendapatan segelintir kelompok masyarakat kaya di suatu negara memiliki korelasi negatif yang kuat dengan laju perkembangan demokrasi di negara tersebut.

Argentina, Portugal, dan Spanyol yang merupakan negara-negara yang selama kurun waktu 1970-an hingga 1980-an mengalami transisi dari

pemerintahan otoriter kepada pemerintahan yang lebih demokratis, memiliki tingkat distribusi pendapatan yang relatif egaliter. Sebaliknya, negara-negara yang pada kurun waktu tersebut mengalami kemandekan dalam proses demokratisasi, yaitu El Salvador, Guatemala, Meksiko, Nikaragua, Panama, dan Afrika Selatan, ditemukan memiliki tingkat distribusi pendapatan yang sangat timpang.

Menurut Muller dan Selligson, korelasi ini dapat terjadi karena tingginya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan menghasilkan dua kemungkinan keadaan, yaitu tingginya tingkat konflik politik yang mengarah pada pemberontakan, atau meningkatnya persepsi elit politik akan adanya ancaman pemberontakan politik atau revolusi kelas masyarakat bawah.

Selanjutnya, Muller dan Selligson juga memberi catatan tentang perlunya menggeser studi di masa mendatang, dari berfokus pada perilaku warga masyarakat secara umum menjadi perilaku elit secara khusus. Menurut mereka, elit politik memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk mengubah arah pemerintahan dibandingkan publik secara umum, sehingga penekanan khusus terhadap budaya politik elit perlu diberikan. Mengutip pendapat Robert Dahl, mereka menyatakan sikap aktivis politik dan para pemimpin adalah faktor penyebab dari terbentuk dan bertahannya sistem demokrasi.

Mereka juga mengutip Higley dan Burton, yang menyatakan bahwa faktor tunggal penentu dari kestabilan sebuah pemerintahan demokratis adalah konsensus elit untuk mendukung institusi-institusi dan nilai-nilai demokrasi. Terkait itu, terdapat pula studi (James Gibson, 1988) yang menemukan bahwa tingkat kerepresifan pemerintah dalam membuat undang-undang sangat berkorelasi dengan tingkat intoleransi politik dari elit. Sedangkan, tingkat intoleransi politik dari publik justru ditemukan tidak secara langsung relevan dengan tingkat kerepresifan pemerintah, namun berkorelasi dengan tingkat intoleransi politik elit. Sehingga, sikap intoleransi politik dari publik cenderung diinterpretasikan sebagai refleksi dari sikap intoleransi politik elit.

Berdasarkan hal ini, Muller dan Selligson pada akhirnya melontarkan pertanyaan ulang tentang hubungan antara variabel *support for gradual reform* dengan demokratisasi, apakah ia akan menunjukkan hasil yang sama jika dipertimbangkan pula nilai variabel tersebut pada elit politik? Sehingga, akhirnya, terkait dengan tesis tentang civic culture, tidak dapat diketahui dengan pasti

apakah pengaruh civic culture terhadap demokratisasi merupakan sesuatu yang benar adanya, ataukah ia hanya merupakan refleksi dari variabel sikap elit politiknya.

2.5. Beberapa Dimensi Lain dari *Civic Culture*

Telah dinyatakan di atas, bahwa variabel civic culture yang memiliki korelasi signifikan terhadap perkembangan demokrasi adalah variabel support for gradual reform, yaitu tingkat dukungan warga negara terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan secara bertahap. Tingkat dukungan yang tinggi menandakan kecenderungan warga negara tersebut untuk berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan demokrasi negaranya. Sedangkan, tingkat dukungan yang rendah (berarti tingkat dukungan yang tinggi terhadap perubahan yang dilakukan secara revolusioner) menunjukkan lemahnya komitmen warga negara tersebut untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi.

Penelitian ini akan menggunakan variabel di atas sebagai salah satu komponen civic culture yang akan diukur pada diri responden. Namun, selain itu, penelitian ini akan menggunakan pula variabel-variabel lain yang lazim dipergunakan untuk mengukur konsep civic culture. Menurut Tom Rice dan Jan Feldman (1997), melanjutkan studi dari Robert Putnam (1993), konsep civic culture dapat dirinci menjadi beberapa variabel sebagai berikut:

- Civic Engagement

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, civic engagement merupakan variabel penting yang menjadi bagian dari konsep civic culture. Civic engagement didefinisikan sebagai minat warga negara untuk terlibat dalam persoalan-persoalan publik dan berpartisipasi dalam politik. Mereka yang memiliki civic engagement tinggi ditandai dengan adanya rasa kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan publik

- Political Equality

Merupakan variabel yang menunjukkan kesetaraan cara pandang seorang warga negara terhadap warga negara lainnya. Masing-masing memandang orang lain sebagai sederajat dan setara dengan dirinya. Sehingga, hubungan yang terjalin adalah hubungan timbal balik dan kerja sama, bukan hubungan vertikal yang tersusun secara hirarkis.

- Solidarity, Trust, dan Tolerance
Yaitu variabel yang menunjukkan derajat rasa hormat, toleransi, dan solidaritas seorang warga negara kepada sesamanya. Warga negara yang memegang nilai ini, akan bersikap toleran terhadap perbedaan ide dan gaya hidup. Individualisme dan egoisme pribadi juga umumnya tergantikan dengan rasa saling percaya yang kuat diantara warganya.
- Social Structures of Cooperation
Yaitu derajat keterlibatan warga negara dalam berbagai perkumpulan dan aktivitas sosial. Warga negara yang aktif terlibat dalam berbagai aktivitas sosial adalah warga yang memiliki civic culture yang tinggi karena aktivitas-aktivitas tersebut memberinya beragam gagasan/ cara pandang dan memberinya rasa keterikatan personal yang kuat dengan warga negara lainnya.

2.6. Social Capital

Civic engagement adalah keterlibatan seseorang dalam aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan atau yang terkait dengan kepentingan publik. Keaktifan mereka dalam berbagai aktivitas publik ini dianggap terkait dengan kesadaran mereka akan masalah-masalah publik.

Salah satu bentuk dari *civic engagement* adalah keterlibatan dalam organisasi-organisasi sosial, formal atau pun informal (INCIS: 2003). Orang yang aktif dalam organisasi-organisasi sosial ini memiliki perhatian lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak aktif. Mereka lebih banyak berinteraksi, memperoleh akses informasi, sehingga juga lebih dapat terhubung dengan jaringan sosial yang lebih luas, termasuk organisasi atau partai politik.

Terkait dengan *civic engagement* adalah konsep mengenai modal sosial. Seperti ditulis Robert Putnam, modal sosial merupakan modal utama bagi terbentuknya *civic engagement*. Modal sosial didefinisikan sebagai seperangkat nilai dan jaringan yang mempersatukan orang dalam satu komunitas. Modal sosial dimanifestasikan dalam ikatan-ikatan yang membangkitkan kepercayaan yang membuat orang mau bertanggung jawab secara kolektif. Sehingga, pada intinya, modal sosial merupakan bentuk hubungan antar manusia dan jaringan yang didasarkan pada *trust*.

Social trust sendiri merupakan elemen penting yang mendorong terjadinya penguatan partisipasi politik. Adanya *trust*, membuat seseorang akan lebih terdorong untuk melakukan kerja sama dengan orang-orang lain di sekitarnya. Termasuk, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal-hal ini pada gilirannya akan menjadi faktor penguat bagi tumbuhnya partisipasi politik.

2.7. Democratic Engagement

Konsep lain yang perlu pula diulas dalam kaitannya dengan *civic culture* adalah *democratic engagement*. Konsep ini menjelaskan keterikatan seseorang pada nilai-nilai demokrasi, yang pada gilirannya nanti akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik yang dilakukannya. .

Menurut Michael Delli Carpini (2004), tingkat *democratic engagement* seorang warga negara, ditentukan oleh beberapa variabel berikut:

1. kecondongan pada nilai-nilai dan norma demokrasi (*adherence to democratic norms and values*)
2. sikap dan kepercayaan mengenai realitas sosial dan politik (*set of empirically grounded attitudes and beliefs about the nature of the political and social world*)
3. opini yang stabil atas berbagai isu kepentingan publik (*holding stable, consistent, and informed opinions on major public issues of the day*)
4. keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas yang bertujuan mempengaruhi kualitas kehidupan diri pribadi maupun orang lain (*engaging in behaviors designed to influence, directly or indirectly, the quality of public life for oneself and others*)

Mendasari kesemua elemen ini adalah asumsi bahwa seorang warga negara juga memiliki kemampuan (*reasoning, argumentation, oral communication, written communication*) dan sumber daya (*knowledge, information*) yang dibutuhkan untuk mengelola nilai, sikap, dan opini yang mereka miliki menjadi tindakan yang efektif.

2.7.1. Democratic Norms and Values

Merupakan aspek yang terkait dengan kondisi kognitif dan emosional yang dibutuhkan untuk terlibat dalam panggung kehidupan publik, seperti nilai-nilai konsensus (sebagai lawan dari konflik), kepentingan bersama

(lawan dari kepentingan pribadi), serta kepercayaan atas institusi dan proses-proses demokrasi (lawan dari skeptisisme).

Dimensi-dimensi yang terdapat di dalamnya mencakup **political efficacy** (rasa kepercayaan atas nilai penting aktivitas politik yang dilakukannya), **political and social trust** (kepercayaan sosial dan politik), **political interest** (kepentingan politik), **civic duty** (rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam politik), dan **political tolerance** (rasa toleransi politik).

Political efficacy merupakan salah satu nilai yang menentukan tingkat dan kualitas keterikatan seseorang pada demokrasi. Ia juga dinyatakan berkorelasi kuat dengan partisipasi politik. Political efficacy terdiri dari dua jenis, yaitu **internal efficacy** (perasaan bahwa aktivitas seseorang dalam politik dapat mempengaruhi perubahan) dan **external efficacy** (perasaan bahwa sistem yang tersedia dapat memberi respon terhadap partisipasi yang dilakukan tersebut).

Sementara itu, **political trust** adalah tingkat kepercayaan seseorang terhadap politik, termasuk institusi, sistem, maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (khususnya pemerintah). Political trust, di sisi lain berpasangan secara berlawanan dengan *political cynicism*.

Seperti juga telah disinggung pada bagian sebelumnya, **Social Capital and Trust** merupakan konsep lain yang terkait erat dengan keterikatan seseorang pada demokrasi. Bahkan ia dinyatakan sebagai faktor yang memperkuat kualitas dan efektivitas dari demokrasi. *Social capital* merujuk pada substansi yang terdapat dalam kehidupan sosial sehari-hari, seperti maksud baik, persahabatan, rasa simpati, dan hubungan sosial diantara individu. Melalui *social capital*, komunitas atau lingkungan sosial secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari jalinan kerja sama yang terjadi diantara individu-individu masyarakatnya. Atau secara lebih ringkas, Putnam mendefinisikannya sebagai "connectedness of citizens to others in their community".

Political interest adalah rasa ketertarikan atau tingkat minat seseorang terhadap politik. Seseorang dengan minat politik yang tinggi akan termotivasi untuk mengikuti perkembangan politik, kebijakan pemerintah, dan hal-hal lainnya terkait politik. Sehingga, political interest

jelas juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Tumbuhnya minat seseorang terhadap politik, dinyatakan oleh Sidney Verba (sebagaimana dikutip oleh Carpini), disebabkan oleh faktor-faktor sosio-ekonomi seperti tingkat pendidikan, tingkatan dan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan orang tua, dan keanggotaan dalam organisasi.

Civic duty merupakan konsep yang juga menentukan tingkat democratic engagement seseorang, dan memiliki korelasi pula dengan nilai-nilai lainnya seperti political interest, political efficacy, dan political trust. Civic duty diartikan sebagai perasaan pada seseorang bahwa ia memiliki tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi dalam politik.

Sedangkan, **political tolerance** adalah tingkat toleransi seseorang terhadap individu lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya, seperti misalnya jika individu tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Political tolerance, menurut Robert Putnam, juga terkait secara kompleks dengan social capital. Tingkat social capital yang tinggi, dinyatakan secara umum akan berkorelasi pada peningkatan toleransi, melalui tumbuhnya rasa kolektivitas dengan komunitas, yang akan mengurangi adanya perbedaan-perbedaan dan mendorong persamaan-persamaan. Meski demikian, di sisi lain, ikatan *social capital* dalam komunitas yang heterogen, pada situasi tertentu, juga dapat menguatkan munculnya rasa *in-groups* dan *out-groups*, sehingga membangkitkan rasa *political intolerance*.

2.7.2. Attitudes and Beliefs

Merujuk pada cara pandang seseorang terhadap realitas kehidupan sosial dan politik. Sikap dan keyakinan berbeda dengan opini, dalam hal ia lebih terbentuk pada fase-fase awal kehidupan (melalui sosialisasi politik), bersifat umum (tidak spesifik tentang suatu isu tertentu), dan lebih sulit berubah.

Termasuk dalam variabel ini antara lain orientasi ideologi, *partisanship*, sikap terhadap nilai-nilai kesetaraan, tingkat komitmen terhadap hak-hak kolektif, dan pandangan umum tentang keragaman dan etnisitas.

2.7.3. Stable/ Consistent and Informed Opinions

Merupakan implementasi dari nilai, sikap, dan keyakinan dalam bentuk yang lebih konkret, sebagaimana terejawentahkan dalam hal-hal yang lebih spesifik: isu-isu, kebijakan, politisi kandidat, penyelenggara pemerintahan, dan sebagainya. Penting digarisbawahi, peran informasi dalam terbentuknya opini yang mapan ini. Dikehendaki, opini terbentuk terhadap diri seseorang dari informasi yang cukup.

2.7.4. Behavioral Expressions

Variabel perilaku ini dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku yang terkait dengan aktivitas kewarganegaraan (*civic behavior*) dan perilaku yang terkait dengan aktivitas politik (*political behavior*).

Political behavior merujuk pada aktivitas-aktivitas seseorang yang ditujukan, secara langsung maupun tak langsung, untuk mempengaruhi proses pemilihan seorang kandidat dan/atau pembuatan dan penerapan kebijakan tertentu oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya tindakan mencoblos dalam pemilu atau berpartisipasi sebagai sukarelawan partai politik.

Sedangkan, ***civic behavior*** merujuk pada partisipasi seseorang dalam aktivitas yang berkaitan dengan persoalan-persoalan publik secara langsung, di luar mekanisme pemilu atau prosedur resmi pemerintahan lainnya. Termasuk di dalamnya aktivitas suka rela dalam membantu pengungsi, mengumpulkan donasi, membentuk perhimpunan pemantau acara televisi, dan sebagainya.

Selain variabel-variabel di atas, konsep *democratic engagement* juga masih perlu dilengkapi dengan variabel *skill* (keahlian) dan *resources* (sumber daya) yang dimiliki seorang warga negara. Dalam konteks *skill*, untuk menjadi seorang warga negara yang memiliki ikatan dengan demokrasi (*democratically engaged*), seseorang harus memiliki keahlian berupa kemampuan nalar (*reasoning*), argumentasi, dan berkomunikasi (*lisan maupun tulisan*). Sedangkan, dalam konteks *resource*, seorang warga negara membutuhkan adanya pengetahuan dan informasi mengenai substansi, proses, dan orang-orang yang terlibat dalam dunia politik.

2.8. Efek Konsumsi Media pada Partisipasi Politik

Variabel lain yang akan diukur dalam penelitian ini adalah pengaruh konsumsi media pada pembentukan nilai-nilai civic culture. Variabel ini dimasukkan dalam penelitian, karena peran media saat ini yang sangat penting (dan bahkan mungkin dominan) dalam menyediakan informasi bagi khalayak tentang berbagai realitas dunia luar yang sedang terjadi. Termasuk pula dalam hal politik.

Pengetahuan yang dimiliki khalayak tentang politik bersandar pada informasi yang disajikan media. Karena itu, citra khalayak tentang politik cenderung dikaitkan dengan citra yang disajikan media. Pada gilirannya, citra khalayak tentang politik inilah yang akan mempengaruhi cara pandang, kepercayaan, dan nilai-nilai politik yang dimiliki khalayak.

Persoalannya, memprediksi dampak konsumsi media terhadap pembentukan nilai-nilai civic culture juga bukan hal yang mudah. Pengaruh konsumsi media terhadap kepercayaan khalayak tidak berlaku seragam pada semua kasus. Konteks-konteks yang lebih spesifik harus dipertimbangkan, seperti jenis media, isi media, genre media, dan sebagainya. Masing-masing kekhususan karakteristik tersebut memiliki dampak tersendiri terhadap aspek-aspek civic culture.

Problem lainnya dalam mengukur dampak konsumsi media adalah pada beragamnya jenis media yang dikonsumsi khalayak secara bersamaan. Khalayak pada umumnya menggunakan berbagai macam media untuk memperoleh informasi. Sehingga, pengukuran yang akurat atas dampak masing-masing jenis media menjadi problem tersendiri.

Michael Carpini merinci beberapa problem dalam pengukuran mengenai hubungan antara media dengan democratic engagement (2004). Carpini membedakan istilah media secara umum dengan public affairs media, yaitu media yang menyajikan informasi-informasi tentang berbagai persoalan publik. Pembedaan ini diperlukan, menurut Carpini, agar pengukuran tentang dampak konsumsi media terhadap democratic engagement dapat lebih akurat. Hal ini mengingat, tanpa pembatasan tersebut, jenis media yang sangat luas membuat perilaku konsumsi atas media tidak selalu relevan dengan sikap democratic engagement yang hendak diukur. Menarik hubungan diantara keduanya (konsumsi media dengan democratic engagement) juga memiliki potensi bias

yang tinggi. Melalui pembatasan tersebut, diharapkan hubungan yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan bisa diperoleh dari konsumsi media dan democratic engagement.

Menurut Carpini, secara umum dapat dinyatakan terdapat hubungan yang positif dan konsisten antara perilaku konsumsi public affairs media dengan tingkat partisipasi warga negara (salah satu komponen democratic engagement). Meskipun arah hubungan diantara keduanya dinyatakan Carpini masih belum terlalu jelas.

Semakin aktif seorang warga negara (semakin tinggi tingkat partisipasinya), semakin tinggi pula kecenderungannya untuk mengikuti berbagai persoalan publik melalui media (konsumsi public affairs media tinggi), baik dengan membaca surat kabar, menonton atau mendengarkan berita, dan mengunjungi situs internet. Namun, sebaliknya, semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang atas public affairs media, juga akan membuat seseorang tersebut terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

Terkait pengaruh konsumsi media terhadap tingkat partisipasi warga negara, Carpini juga menandai bahwa hubungan ini sebagian besarnya terjadi secara tidak langsung. Hal itu terjadi terutama melalui efek media pada penumbuhan motivasi (seperti misalnya minat terhadap politik) dan peningkatan kemampuan khalayak (khususnya pengetahuan tentang politik). Meski demikian, pada beberapa hal, hubungan langsung antara media dan partisipasi warga juga terjadi melalui apa yang disebutnya sebagai mobilisasi informasi, yaitu misalnya kampanye atau seruan secara khusus dari media kepada khalayak untuk berpartisipasi melakukan aksi-aksi tertentu (seperti mencoblos dalam pemilu).

Carpini kemudian menyebutkan beberapa faktor yang turut mempengaruhi dampak media terhadap democratic engagement sebagai berikut.

2.8.1. Content Media

Content atau isi media merupakan faktor yang sangat menentukan dampak yang diakibatkan media pada khalayak. Carpini menyatakan, meskipun secara umum terpaan media mempengaruhi peningkatan partisipasi politik warga negara, namun isi media tertentu justru dapat berdampak sebaliknya. Hal itu misalnya terjadi pada iklan negatif yang justru dapat menurunkan tingkat partisipasi politik.

Selain itu, dampak negatif media bagi partisipasi politik juga terjadi pada pemberitaan bermuatan sinis dan berorientasi pada strategi. Kedua jenis muatan pemberitaan ini cenderung mengakibatkan menurunnya kepercayaan sosial dan political efficacy.

2.8.2. Jenis Media

Terkait jenis media, secara umum dinyatakan media cetak (surat kabar dan majalah) merupakan jenis media yang paling kuat berkorelasi dengan partisipasi politik. Sedangkan sebaliknya, berita di televisi banyak dianggap sebagai jenis media yang paling lemah dan tidak konsisten memberi dampak pada partisipasi politik. Meskipun, terdapat pula pendapat yang menentang hal ini dan bahkan menyatakan televisi merupakan media yang superior dengan kelebihan sifat audio visualnya. Televisi dinyatakan mampu memberi kesan kepada khalayak dan menciptakan memori jangka panjang untuk peristiwa-peristiwa dramatis. Atribusi-atribusi audio visual dari televisi seperti suara, gambar bergerak, dan warna dinyatakan dapat menarik perhatian dan merangsang keterlibatan psikologis dan pembelajaran.

Menengahi silang pendapat tersebut adalah pendapat Neuman, yaitu bahwa televisi mampu merebut perhatian dan membuat orang tertarik karena orang pada umumnya menganggap televisi lebih menghibur dan mudah dikonsumsi. Sementara, media cetak memiliki keunggulan dalam menyajikan informasi lebih lanjut secara mendalam. Sehingga, kedua jenis media tersebut dinyatakan sama-sama memiliki kemampuan untuk meningkatkan pembelajaran politik khalayak. Dinyatakan pula, televisi yang berperan efektif dalam memotivasi dan mendidik, merupakan media yang berpengaruh signifikan bagi khalayak awam.

Sementara itu, radio juga ditemukan memiliki korelasi positif dengan partisipasi politik warga negara. Mengutip temuan Bennet, Carpini menyatakan pendengar acara bincang-bincang di radio lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam politik melalui beragam bentuk cara.

Jenis media juga menentukan jenis pengaruh yang diakibatkannya pada bentuk partisipasi politik warga negara. Televisi dan surat kabar secara umum dinyatakan memiliki korelasi positif dengan perilaku *voting* (memilih dalam pemilu), meski televisi memiliki pengaruh yang lebih kecil

dan secara statistik tidak signifikan. Sedangkan, partisipasi politik lainnya di luar voting, khususnya aktivitas-aktivitas terkait kampanye, hanya berkorelasi dengan penggunaan/ konsumsi surat kabar. Berdasarkan hal-hal ini, Carpini menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih terdidik dan kurang terdidik.

2.8.3. Genre Media

Seperti telah disinggung, *content* atau muatan media merupakan faktor penting yang menentukan pengaruh dari konsumsi media terhadap partisipasi politik warga. Konsumsi berita secara meyakinkan dapat dinyatakan berkorelasi positif dengan peningkatan partisipasi politik warga. Namun, konsumsi muatan-muatan entertainment di media, justru ditemukan berkorelasi negatif dengan partisipasi politik. Semakin lama seseorang menghabiskan waktu untuk mengkonsumsi muatan-muatan entertainment di media, semakin rendah kecenderungannya untuk berpartisipasi dalam politik

Carpini mengutip temuan Putnam bahwa terdapat hubungan negatif yang konsisten antara jumlah jam yang dihabiskan seseorang dalam mengkonsumsi tayangan entertainment di televisi dengan aktivitas-aktivitas politik kewarganegaraan seperti menghadiri rapat-rapat warga, menulis surat kepada anggota parlemen, menjabat tugas-tugas kewargaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sukarela di masyarakat. Carpini juga mengutip kesimpulan Brehm dan Rahn bahwa tiap berkurang satu jam waktu yang dihabiskan seseorang menonton televisi dalam sehari, sebanding dengan peningkatan partisipasi politik yang dialami warga dengan tambahan pengalaman pendidikan formal 5 atau 6 tahun.

Namun, dampak menonton tayangan entertainment di televisi terhadap kepercayaan sosial, juga dinyatakan merupakan hasil dari pengaruh faktor-faktor kompetisi waktu luang, efek psikologis yang menghambat interaksi sosial, dan jenis muatan program secara spesifik.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan klasik (positivistik) yang mengikuti logika berpikir *hypothetico-deductive method*. Penelitian berangkat dari bangunan konsep dan kerangka teori yang tersedia mengenai suatu fenomena sosial tertentu, untuk kemudian dibuktikan keberlakuannya dan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang tengah diteliti. Sifat penelitian adalah eksplanatif.

Metode penelitian adalah kuantitatif, dengan data dikumpulkan melalui survei. Survei dilakukan terhadap responden secara *cross-sectional* atau dalam suatu waktu secara serentak.

3.2. Populasi Penelitian

Populasi dari survei ini adalah semua penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sudah dewasa (berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah). Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dalam waktu yang berdekatan dengan waktu penelitian.

Penduduk Provinsi Jawa Tengah yang menjadi populasi penelitian ini tersebar di 35 kabupaten / kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2002, jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 32.803.274 orang dengan sebagian besarnya tinggal di desa.

Berikut adalah sebaran penduduk di Jawa Tengah berdasarkan kabupatennya.

Tabel 3.1. Jumlah penduduk Jawa Tengah per Kabupaten

KABUPATEN	Jumlah Penduduk	POPULASI		
		Proporsi Populasi (%)	Proporsi Penduduk Desa (%)	Proporsi Penduduk Kota (%)
BANJARNEGARA	889732	2.7%	82.3%	17.7%
BANYUMAS	1553160	4.7%	55.0%	45.0%
BATANG	689917	2.1%	66.9%	33.1%
BLORA	838231	2.6%	79.3%	20.7%
BOYOLALI	941808	2.9%	75.0%	25.0%
BREBES	1807475	5.5%	67.4%	32.6%
CILACAP	1709889	5.2%	72.7%	27.3%
DEMAK	1025317	3.1%	73.4%	26.6%

GROBOGAN	1360007	4.1%	86.9%	13.1%
JEPARA	1015864	3.1%	49.2%	50.8%
KARANGANYAR	831721	2.5%	58.3%	41.7%
KEBUMEN	1207717	3.7%	75.5%	24.5%
KENDAL	895193	2.7%	59.6%	40.4%
KLATEN	1281061	3.9%	36.2%	63.8%
Kota MAGELANG	118345	0.4%	0.0%	100.0%
Kota PEKALONGAN	265318	0.8%	2.2%	97.8%
Kota SALATIGA	150936	0.5%	6.4%	93.6%
Kota SEMARANG	1397388	4.3%	6.0%	94.0%
Kota SURAKARTA	555023	1.7%	0.0%	100.0%
Kota TEGAL	245718	0.7%	0.0%	100.0%
KUDUS	726875	2.2%	32.4%	67.6%
MAGELANG	1158138	3.5%	75.0%	25.0%
PATI	1208298	3.7%	70.2%	29.8%
PEKALONGAN	846328	2.6%	55.2%	44.8%
PEMALANG	1310384	4.0%	51.1%	48.9%
PURBALINGGA	874626	2.7%	75.8%	24.2%
PURWOREJO	718513	2.2%	73.8%	26.2%
REMBANG	589237	1.8%	74.2%	25.8%
SEMARANG	878920	2.7%	67.9%	32.1%
SRAGEN	857130	2.6%	72.5%	27.5%
SUKOHARJO	817108	2.5%	34.1%	65.9%
TEGAL	1443137	4.4%	45.7%	54.3%
TEMANGGUNG	705342	2.2%	76.8%	23.2%
WONOGIRI	1125246	3.4%	83.2%	16.8%
WONOSOBO	764172	2.3%	83.7%	16.3%
Total	32803274	100.0%	60.4%	39.6%

Sumber: BPS 2002 (diolah kembali)

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk mencuplik sampel yang cukup representatif dari sejumlah besar populasi tersebut, dipilih metode *multistage random sampling*. Pengambilan sampel dengan teknik ini diharapkan dapat menghasilkan sampel yang representatif dari populasi yang kompleks dan heterogen seperti masyarakat Jawa Tengah.

Multistage random sampling pada dasarnya adalah gabungan antara teknik pengambilan sampel secara terstratifikasi (*stratified random sampling*) dengan teknik pengambilan sampel secara kelompok (*cluster random sampling*). Stratifikasi dilakukan untuk dapat menampung heterogenitas populasi masyarakat Jawa Tengah dalam sampel. Stratifikasi dilakukan dengan mengklasifikasikan karakteristik-karakteristik dasar dari populasi, seperti jenis kelamin, wilayah, dan sebagainya. Hal ini untuk menjamin sampel yang diperoleh mencerminkan keragaman populasinya secara cukup proporsional.

Karakteristik dasar dari populasi yang dipakai dalam survei ini adalah proporsi perbedaan jenis kelamin (laki-laki-perempuan) dan komposisi wilayah (desa-kota). Alasan utama dari pemilihan karakter dasar stratifikasi ini adalah kemudahan dan kepraktisan. Proporsi jenis kelamin dan komposisi wilayah desa-kota merupakan data demografis awal yang relatif paling mudah diperoleh.

Demikian pula dalam eksekusi atau pelaksanaannya. Misalnya, memilah responden berdasarkan jenis kelamin relatif jauh lebih mudah dan mungkin dilakukan dibandingkan jika pemilahan dilakukan berdasarkan karakter populasi lainnya seperti suku, agama, tingkat pendidikan, atau tingkat penghasilan. Selain itu, jenis kelamin juga merupakan karakteristik populasi yang telah lazim digunakan dalam survey-survey yang dilakukan selama ini di Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi pada pembagian sampel berdasarkan proporsi desa-kota. Data ini telah tersedia di tingkat populasi. Dengan demikian, sampel cukup menyesuaikan proporsi wilayah tersebut agar serupa dengan proporsi wilayah desa-kota pada tingkat populasi. Selain alasan kepraktisan, tentu saja pembagian sampel berdasarkan proporsi wilayah ini juga berguna untuk menjamin tercerminkannya keragaman populasi pada tingkat sampel. Pembagian wilayah desa-kota dapat membantu menampung keragaman perilaku politik penduduk, mengingat perilaku atau preferensi penduduk pada wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki perbedaan cukup berarti.

Sementara itu, dengan stratifikasi, sampel yang ditarik juga menjadi lebih menyebar, sehingga menimbulkan persoalan kerumitan teknis tersendiri. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, maka stratifikasi dikombinasi dengan teknik cluster. Lewat cluster, persebaran sampel direduksi atau diminimalisir sehingga biaya yang diperlukan untuk menjangkaunya menjadi jauh mengecil. Meskipun, cluster juga membuat sampel menjadi kurang mencerminkan karakteristik populasi.

Dengan demikian, gabungan stratifikasi dan *cluster* merupakan kompromi untuk mendapatkan sampel yang cukup mendekati karakteristik populasi di satu pihak, dan di pihak lain mengurangi kesulitan teknis akibat terlalu menyebarnya sampel. Komponen cluster yang dipakai dalam survei ini adalah Rukun Tetangga (RT), dan Kartu Keluarga.

PSU (Primary Sampling Unit) yang digunakan adalah desa. Cara menentukan desa dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun kerangka sampel

daftar nama desa di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Kerangka sampel yang dipakai adalah data desa Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000. Data desa itu sudah terklasifikasikan menurut kecamatan. Sebelum ditarik, daftar desa tersebut diklasifikasikan lagi menurut desa dan kabupaten/ kota serta ditentukan proporsinya. Artinya, besarnya desa yang diambil disesuaikan dengan proporsi antara desa dan kota tersebut di masing-masing kabupaten/ kota. Daftar nama desa yang telah disusun berdasarkan kabupaten dan wilayah (desa-kabupaten) diambil secara acak sistematis. Dengan cara acak sistematis, desa yang terpilih akan sangat menyebar. Pola ini sesuai dengan pola daftar desa BPS yang disusun berurutan dari Timur ke Barat, dan Utara ke Selatan.

Jumlah PSU (desa/ kelurahan) dalam survei ini, melalui perhitungan statistik atas jumlah sampel yang harus ditarik yang kemudian dibulatkan untuk alasan kemudahan, ditetapkan sejumlah 44 desa/ kelurahan.

Tabel 3.2 Jumlah PSU/ Primary Sampling Unit

KABUPATEN	Jumlah Penduduk	POPULASI			JUMLAH PSU		
		Proporsi Populasi (%)	Proporsi Penduduk Desa (%)	Proporsi Penduduk Kota (%)	Desa	Kota	Total
BANJARNEGARA	889732	2.7%	82.3%	17.7%	1	0	1
BANYUMAS	1553160	4.7%	55.0%	45.0%	1	1	2
BATANG	689917	2.1%	66.9%	33.1%	0	1	1
BLORA	838231	2.6%	79.3%	20.7%	1	0	1
BOYOLALI	941808	2.9%	75.0%	25.0%	1	0	1
BREBES	1807475	5.5%	67.4%	32.6%	2	1	3
CILACAP	1709889	5.2%	72.7%	27.3%	1	1	2
DEMAK	1025317	3.1%	73.4%	26.6%	1	0	1
GROBOGAN	1360007	4.1%	86.9%	13.1%	1	1	2
JEPARA	1015864	3.1%	49.2%	50.8%	0	1	1
KARANGANYAR	831721	2.5%	58.3%	41.7%	1	0	1
KEBUMEN	1207717	3.7%	75.5%	24.5%	1	1	2
KENDAL	895193	2.7%	59.6%	40.4%	1	0	1
KLATEN	1281061	3.9%	36.2%	63.8%	1	1	2
Kota MAGELANG	118345	0.4%	0.0%	100.0%	0	0	0
Kota PEKALONGAN	265318	0.8%	2.2%	97.8%	0	0	0
Kota SALATIGA	150936	0.5%	6.4%	93.6%	0	0	0
Kota SEMARANG	1397388	4.3%	6.0%	94.0%	0	2	2
Kota SURAKARTA	555023	1.7%	0.0%	100.0%	0	1	1
Kota TEGAL	245718	0.7%	0.0%	100.0%	0	0	0
KUDUS	726875	2.2%	32.4%	67.6%	0	1	1
MAGELANG	1158138	3.5%	75.0%	25.0%	1	1	2
PATI	1208298	3.7%	70.2%	29.8%	1	1	2
PEKALONGAN	846328	2.6%	55.2%	44.8%	1	0	1
PEMALANG	1310384	4.0%	51.1%	48.9%	1	1	2
PURBALINGGA	874626	2.7%	75.8%	24.2%	1	0	1
PURWOREJO	718513	2.2%	73.8%	26.2%	1	0	1

REMBANG	589237	1.8%	74.2%	25.8%	1	0	1
SEMARANG	878920	2.7%	67.9%	32.1%	1	0	1
SRAGEN	857130	2.6%	72.5%	27.5%	1	0	1
SUKOHARJO	817108	2.5%	34.1%	65.9%	0	1	1
TEGAL	1443137	4.4%	45.7%	54.3%	1	1	2
TEMANGGUNG	705342	2.2%	76.8%	23.2%	1	0	1
WONOGIRI	1125246	3.4%	83.2%	16.8%	1	1	2
WONOSOBO	764172	2.3%	83.7%	16.3%	1	0	1
Total	32803274	100.0%	60.4%	39.6%	26	18	44

Di masing-masing desa/ kelurahan terpilih didaftar nama-nama RT, dan kemudian dipilih 5 RT secara random. Di masing-masing RT terpilih kemudian didaftar Kartu Keluarga (KK), dan dipilih 2 KK secara random. Di masing-masing KK terpilih, didaftar anggota KK yang memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni yang berumur 17 tahun atau lebih, atau yang telah menikah. Bila dalam KK pertama ditetapkan responden perempuan, maka pada KK sisanya di RT yang sama laki-laki yang didaftar. Setelah mendaftar anggota KK yang laki-laki atau yang perempuan, maka dengan bantuan *Kish Grid*, dipilih secara random satu orang untuk diwawancarai secara tatap muka langsung.

Metode Kish Grid secara sederhana dapat dijelaskan sebagai cara untuk menarik secara random satu orang responden yang memenuhi persyaratan dari nama-nama yang terdapat dalam satu rumah atau satu kartu keluarga. Caranya, Kish Grid memadukan aspek random dari nomor rumah dan jumlah anggota keluarga yang memenuhi persyaratan sebagai responden dalam satu rumah. Dengan Kish Grid, peneliti mencatat digit terakhir dari nomor rumah pada rumah atau kartu keluarga yang terpilih sebagai responden, lalu mengkombinasikannya berdasarkan tabel acak dengan jumlah anggota keluarga pada rumah tersebut yang telah memenuhi persyaratan sebagai responden. Angka hasil kombinasi yang diperoleh menunjukkan urutan nama responden yang perlu ditarik sebagai sampel (lihat tabel di bawah).

Tabel 3.3. Kish Grid

Jumlah anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah	Angka Terakhir dari Nomor Rumah									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Satu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dua	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Tiga	2	3	2	1	3	1	2	1	2	2
Empat	3	1	2	4	1	3	4	3	2	1
Lima	2	4	5	3	1	5	3	2	1	4
Enam	1	3	4	5	6	1	2	4	3	5
Tujuh	5	6	3	7	2	7	5	1	4	6
Delapan	4	5	1	6	1	4	3	7	2	8
Sembilan	7	9	4	8	6	2	1	5	6	3
Sepuluh atau lebih	8	2	4	1	3	6	5	10	7	9

Angka-angka dalam tabel menunjukkan urutan anggota keluarga di dalam rumah yang terpilih untuk diambil menjadi responden.

3.4. Formula Perhitungan Jumlah Sampel

Seperti telah dinyatakan, total sampel survei ini sebesar 440 responden. Dengan sampel sebesar itu, selang kepercayaan (confidence interval) survey ini adalah $\pm 4,67\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Atau, derajat perbedaan antara sampel dengan populasi dalam survei ini diperkirakan sebesar $\pm 4,67\%$.

Berikut formulasi perhitungan statistik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dan selang kepercayaan dalam penelitian ini.

$$SS = \frac{Z^2 * (p) * (1-p)}{C^2} \quad (3.1)$$

Dimana:

SS = Sample Size (jumlah sampel)

Z = Nilai Z (1,96 untuk tingkat kepercayaan 95%)

p = proporsi heterogenitas populasi/ persentase dipilihnya sebuah pilihan oleh responden (secara umum nilai yang digunakan adalah 0,5 yang menunjukkan populasi sangat heterogen)

c = confidence interval/ selang kepercayaan

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel diperhitungkan sebesar $[(1,96)^2 * (0,5) * (1-0,5)] / (0,05)^2 = 384,16$.

Untuk alasan kemudahan, sekaligus sebagai antisipasi atas kerusakan atau kehilangan data yang masuk, maka jumlah sampel dibulatkan menjadi 440. Jumlah ini juga ditetapkan dengan menyesuaikan ukuran proporsi desa-kota yang diambil sebagai unit sampling dalam penelitian.

Akibat pembulatan tersebut, angka confidence interval pun dikoreksi dengan perhitungan yang sama menjadi +/- 4,67%.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui kuesioner yang dibacakan kepada responden oleh pewawancara. Dalam pengumpulan data, peneliti dibantu oleh para pewawancara di Lingkaran Survei Indonesia untuk mewawancarai responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Untuk keperluan penelitian ini, pewawancara yang ditugaskan adalah sejumlah 44 orang. Sehingga, 1 orang pewawancara akan bertanggung jawab pada 1 wilayah penelitian (desa atau kota) dan bertugas mewawancarai 10 responden yang terpilih di wilayah tersebut.

3.6. Metode Pengukuran

3.6.1. Operasionalisasi Konsep

Pada bagian kerangka teori, telah diuraikan beberapa konsep dan teori terkait partisipasi politik, *voting*, budaya politik, *civic culture*, keberlangsungan demokrasi, *social capital*, *democratic engagement*, hingga konsumsi informasi politik. Berikut ini akan diuraikan beberapa konsep dari sejumlah teori tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini beserta dengan operasionalisasinya. Konsep-konsep utama yang akan diukur tersebut adalah partisipasi politik, nilai-nilai *civic culture*, dan keaktifan warga dalam mengkonsumsi informasi politik.

3.6.1.1. Partisipasi Politik

Untuk penelitian ini, definisi partisipasi politik yang digunakan merujuk pada definisi yang dikemukakan Margaret Conway yaitu "*activities of citizens that attempt to influence the structure of government, the selection of government officials, or the policies of government.*" Atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan warga negara yang bertujuan untuk

mempengaruhi struktur pemerintahan, proses pemilihan orang-orang yang duduk di pemerintahan, atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

Mengikuti Conway (yang merujuk pada konsep *political action* dari Max Kaase), penelitian ini juga membagi dua bentuk partisipasi politik, yaitu ***conventional participation*** (didefinisikan sebagai “*those activities that are accepted as appropriate by the dominant political culture*”) dan ***unconventional participation*** (didefinisikan sebagai “*activities that are not accepted as appropriate by the dominant political culture, even though they may be legal*”). Conventional participation akan diukur dengan beberapa indikator terkait dengan aktivitas politik warga yang dilakukan dalam kerangka mekanisme sistem yang tersedia seperti terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepartaian atau kampanye politik. Sedangkan, unconventional participation akan diukur dengan indikator-indikator terkait aktivitas politik yang dilakukan warga dalam bentuk di luar mekanisme sistem yang tersedia (atau legal tapi tidak dikehendaki rezim) seperti demonstrasi/ protes dan melakukan pemboikotan produk tertentu (bentuk-bentuk political consumerism). Dimasukkan juga dalam kategori ini partisipasi warga dalam melakukan deliberasi politik, yaitu menyampaikan pendapat politik dalam forum-forum informal (seperti melakukan bincang-bincang politik dengan rekan atau kerabat).

Sementara itu, salah satu bentuk partisipasi politik konvensional, yaitu *voting* diperlakukan sebagai variabel tersendiri. Hal ini karena voting memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan variabel partisipasi politik konvensional lainnya. Dalam hal skala pengukuran, untuk penelitian ini, *voting* diukur dengan skala nominal, sedangkan variabel lainnya menggunakan skala interval. Dalam hal sebaran data, voting juga memiliki distribusi data yang sangat berbeda dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya. Sementara beberapa bentuk partisipasi politik memiliki nilai keterlibatan responden yang cenderung rendah, voting justru cenderung memiliki angka keterlibatan responden yang sangat tinggi. Hal ini terkait dengan *resources* atau sumber daya yang diperlukan seseorang untuk melakukan *voting* jauh lebih kecil dibandingkan dengan melakukan berbagai bentuk partisipasi politik lainnya.

3.6.1.2. Konsumsi Informasi Politik

Didefinisikan sebagai tingkat konsumsi responden terhadap berita-berita politik di berbagai media seperti surat kabar, televisi, dan radio. Pertanyaan yang diajukan adalah frekuensi responden dalam mengkonsumsi berita-berita politik di berbagai media tersebut dalam waktu sepekan.

3.6.1.3. Civic Engagement

Didefinisikan sebagai tingkat ketertarikan responden terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan dan untuk berpartisipasi di dalamnya. Indikator yang digunakan adalah frekuensi responden dalam menghadiri/ mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan jumlah organisasi/ perkumpulan sosial dimana responden menjadi anggotanya.

3.6.1.4. Social Trust and Solidarity

Didefinisikan sebagai tingkat rasa hormat dan kepercayaan responden terhadap orang lain sebagai sesama warga negara. Termasuk pula dalam variabel ini tingkat rasa hormat responden terhadap hak-hak orang lain. Pertanyaan yang diajukan adalah tingkat kepercayaan responden terhadap orang lain dan tingkat kepercayaan responden akan adanya rasa solidaritas (niat baik orang untuk saling membantu).

3.6.1.5. Political Tolerance

Didefinisikan sebagai tingkat toleransi responden terhadap individu lain yang memiliki perbedaan pandangan politik dengan dirinya. Pertanyaan yang diajukan adalah perasaan responden dalam berdialog dan bekerja sama dengan orang lain yang memiliki keyakinan politik berbeda dengan dirinya.

3.6.1.6. Political Equality

Didefinisikan sebagai sikap responden terhadap prinsip kesetaraan hak dan kesempatan setiap orang dalam politik. Pertanyaan yang diajukan untuk mengukur variabel ini meliputi 2 hal, yaitu bagaimana sikap responden terhadap kesetaraan kemampuan sipil dan militer serta sosok muda dan tua dalam memimpin.

3.6.1.7. **Support for Gradual Reform**

Didefinisikan sebagai tingkat dukungan responden terhadap dilakukannya perubahan pada masyarakat secara bertahap. Pertanyaan yang diajukan adalah seberapa besar dukungan responden terhadap dilakukannya perubahan secara bertahap dan seberapa besar penolakan responden terhadap dilakukannya perubahan secara radikal.

3.6.1.8. **Political Trust**

Adalah tingkat kepercayaan responden terhadap politik, termasuk institusi, sistem, maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (khususnya pemerintah). Pertanyaan yang diajukan adalah penilaian responden terhadap institusi-institusi demokrasi, yaitu DPR/ partai politik dan pemerintah. Juga diajukan pertanyaan tentang penilaian responden terhadap pemilu sebagai mekanisme demokrasi.

3.6.1.9. **Political Efficacy**

Didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan responden akan arti penting perannya dalam mempengaruhi perubahan politik yang terjadi. Pertanyaan yang diajukan meliputi dua hal, yaitu penilaian responden tentang kontribusi perannya dalam politik (*internal efficacy*) dan penilaian responden tentang tingkat responsivitas sistem terhadap partisipasinya (*external efficacy*).

Konsep-konsep di atas akan diturunkan lagi dalam bentuk indikator-indikator yang lebih operasional sehingga dapat diukur dalam penelitian. Operasionalisasi konsep tersebut, beserta dengan skala pengukurannya dapat dilihat pada tabel yang akan ditampilkan pada bagian mengenai skala berikut.

3.6.2. **Skala**

Jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini adalah *summative rating scale*, yaitu skala Likert. *Summative rating scale* merupakan skala yang digunakan untuk mengukur variabel, dimana indikator-indikator pada variabel tersebut dianggap memiliki bobot nilai yang sama. Dengan kata lain, setiap indikator dalam sebuah variabel memiliki kontribusi yang sama terhadap pembentukan nilai dari variabel tersebut.

Skala Likert sendiri merupakan skala yang lazim dipakai untuk mengukur berbagai variabel sikap atau persepsi. Interval nilai yang digunakan berjumlah

ganjil, dan umumnya terentang dari 1 hingga 5, yang menunjukkan kontinum sikap atau evaluasi seseorang terhadap sesuatu (sangat setuju hingga sangat tidak setuju, sangat baik hingga sangat tidak baik, dan sebagainya).

Skala Likert dipilih untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini karena indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun variabel-variabel tersebut memiliki bobot nilai yang sama satu sama lain. Konsep nilai-nilai *civic culture* misalnya, terdiri atas variabel-variabel sikap responden (berupa setuju-tidak setuju) terhadap pernyataan mengenai item-item nilai *civic culture* tertentu yang masing-masing diperlakukan sebagai komponen pembentuk *civic culture* yang sama bobotnya.

Demikian juga konsep partisipasi politik dan konsumsi informasi politik, dikonstruksikan dalam penelitian ini dari indikator-indikator yang memiliki bobot yang sama dalam menyumbangkan nilai atas konsep tersebut secara keseluruhan.

Untuk mengukur tingkat partisipasi politik, skala Likert pun tetap digunakan karena konsep partisipasi politik yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada bentuk-bentuk atau jenis-jenis partisipasi politik yang dilakukan warga, yang satu sama lain dapat dipandang berdiri sendiri dan memiliki bobot yang sama. Bagaimanapun, dicatat pula bahwa selain konsep partisipasi politik yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat pula konsep partisipasi politik lainnya yang mendefinisikan partisipasi politik dalam bentuk hirarki keterlibatan warga dalam politik. Untuk konsep partisipasi politik seperti ini, pengukurannya harus menggunakan skala lain, yaitu skala Guttman (*cummulative rating scale*).

Untuk penelitian ini, rentang nilai yang digunakan dalam skala adalah 1-5. Namun, pada beberapa pertanyaan yang terkait dengan sikap, pilihan nilai tengah (yaitu nilai 3, pilihan sikap ragu-ragu atau netral) sengaja dihilangkan untuk menghindari bias kecenderungan responden pada pilihan jawaban ini.

Berikut adalah skala pengukuran yang digunakan untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini beserta dengan kriteria penilaian untuk masing-masing jawaban pertanyaan.

Tabel 3.4. Operasionalisasi Variabel dan Skala Pengukurannya

No.	Variabel	Indikator	Skala
1	Voting	- jawaban responden untuk memilih/ tidak dalam pilkada yang akan dilangsungkan	Nominal - ya - tidak
2	Partisipasi Politik Konvensional	- frekuensi dalam 1 bulan mengikuti rapat-rapat/ acara yang diadakan parpol - frekuensi dalam 1 bulan mengikuti kegiatan kampanye yang diadakan parpol/ tim sukses	Interval - tidak pernah - 1 kali - 2 kali - 3-5 kali - Lebih dari 5 kali
3	Partisipasi Politik Non Konvensional	- frekuensi dalam 1 bulan berbincang-bincang/ berdiskusi tentang politik dengan kerabat/ rekan - frekuensi dalam 1 bulan melakukan aksi-aksi demonstrasi, penandatanganan petisi, dan sebagainya - frekuensi dalam 1 bulan melakukan aksi pemboikotan terhadap produk-produk tertentu	Interval - tidak pernah - 1 kali - 2 kali - 3-5 kali - Lebih dari 5 kali
4	Information Consumption	- Frekuensi mengikuti berita politik di surat kabar dalam sepekan - frekuensi mengikuti berita politik di televisi dalam sepekan - frekuensi mengikuti berita politik di radio dalam sepekan	Interval - tidak pernah - jarang (tidak setiap pekan) - 1-2 hari dalam sepekan - 3-4 hari dalam sepekan - Setiap hari atau hampir setiap hari
5	Civic Engagement	- frekuensi keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan	Interval - Tidak pernah

		<p>kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah organisasi/ perkumpulan sosial dimana responden menjadi anggotanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jarang - Kadang-kadang - Sering - Selalu <p>Interval</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada - 1 buah - 2 buah - 3 buah - Lebih dari 3 buah
7	Interpersonal/ Social Trust	<ul style="list-style-type: none"> - rasa kepercayaan bahwa orang secara umum dapat dipercaya 	<p>Interval</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat tidak setuju - Tidak setuju - Setuju - Sangat setuju
8	Solidarity	<ul style="list-style-type: none"> - rasa kepercayaan bahwa orang secara umum bersedia membantu orang lain 	<p>Interval</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat tidak setuju - Tidak setuju - Setuju - Sangat setuju
9	Political Tolerance	<ul style="list-style-type: none"> - kenyamanan berbicara dengan orang lain yang berbeda pandangan politiknya 	<p>Interval</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat tidak setuju - Tidak setuju - Setuju - Sangat setuju
10	Political Equality	<ul style="list-style-type: none"> - ketidaksetujuan bahwa militer lebih mampu memimpin dibandingkan sipil - ketidaksetujuan bahwa sosok yang lebih tua lebih mampu memimpin dibandingkan sosok yang lebih muda 	<p>Interval</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat tidak setuju - Tidak setuju - Setuju - Sangat setuju
11	Support for Gradual Reform	<ul style="list-style-type: none"> - dukungan terhadap dilakukannya perbaikan politik secara bertahap melalui proses pemilu 	<p>Interval</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat tidak setuju - Tidak setuju - Setuju

		<ul style="list-style-type: none"> - penolakan terhadap dilakukannya perbaikan politik secara revolusioner seperti merombak total orang-orang yang duduk di pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat setuju
12	Political Trust	<ul style="list-style-type: none"> - rasa percaya bahwa partai politik telah bekerja keras untuk rakyat - rasa percaya bahwa Pemda telah bekerja keras untuk rakyat - rasa percaya bahwa pilkada dapat memperbaiki keadaan 	Interval <ul style="list-style-type: none"> - Tidak percaya sama sekali - Tidak percaya - Cukup percaya - Sangat percaya
13	Political Efficacy	<ul style="list-style-type: none"> - rasa percaya responden bahwa perannya dalam politik dapat mempengaruhi keadaan - rasa percaya responden bahwa institusi-institusi politik merespon aspirasi masyarakat seperti dirinya 	Interval <ul style="list-style-type: none"> - Tidak percaya sama sekali - Tidak percaya - Antara percaya dan tidak - Sedikit percaya - Sangat percaya

3.7. Validitas dan Reliabilitas Pengukuran

Validitas dan reliabilitas merupakan dua isu utama dalam pengukuran. Keduanya berupaya mengaitkan ukuran-ukuran yang lebih konkret dengan konstruksi konsepnya. Validitas dan reliabilitas memiliki arti penting dalam penelitian karena terkait dengan keterpercayaan, kredibilitas, dan kebenaran dari temuan penelitian.

3.7.1. Reliabilitas

Reliabilitas adalah konsistensi atau keterpercayaan dari penelitian. Desain penelitian dengan reliabilitas yang baik akan memberikan hasil yang sama jika penelitian itu diulangi lagi pada kondisi yang identik atau sangat serupa. Atau dalam pengertian yang lebih teknis, hasil yang ditunjukkan sebuah indikator penelitian tidak akan bervariasi karena faktor-faktor yang terkait dengan proses pengukuran atau instrumen pengukurannya sendiri.

Dari sejumlah jenis atau kriteria reliabilitas yang ada, penelitian ini akan mendasarkan reliabilitas pengukurannya pada *stability reliability* dan *equivalence reliability*.

Stability reliability adalah reliabilitas dalam bentuk konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Metode yang lazim digunakan untuk memenuhi reliabilitas jenis ini adalah *test* dan *retest*.

Sedangkan *equivalence reliability* adalah reliabilitas dalam bentuk konsistensi hasil yang ditunjukkan oleh indikator-indikator yang mengukur konsep yang sama, yaitu bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur konsep yang sama akan memiliki nilai yang konsisten satu sama lainnya. Metode untuk menguji reliabilitas jenis ini adalah *split-half method*. Berdasarkan metode ini, indikator-indikator yang mengukur konsep yang sama akan dibagi menjadi dua kelompok, lalu hasil pengukuran keduanya dibandingkan. Jika kedua kelompok tersebut ternyata memberikan hasil pengukuran yang serupa satu sama lain, maka indikator-indikator yang digunakan dinyatakan memiliki *equivalence reliability* yang baik. Ukuran statistik yang biasa digunakan untuk mengukur *split-half reliability* adalah Cronbach's alpha.

Untuk memperoleh *stability reliability*, penelitian ini menguji reliabilitas instrumen dengan beberapa prosedur *quality control* berikut:

1. Pre Test dan Role Play, yaitu mengujicobakan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner kepada sekelompok responden. Prosedur ini lebih ditujukan untuk mengamati respon responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Termasuk untuk mengukur durasi waktu wawancara dan kemampuan responden dalam menjawab jumlah pertanyaan yang diajukan. Jika pengamatan menemukan responden tidak dapat secara nyaman menjawab pertanyaan yang diberikan karena durasi waktu wawancara yang terlalu panjang atau jumlah pertanyaan yang terlalu banyak, maka akan dilakukan penyederhanaan atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Berdasarkan *role play* yang dilakukan, kelompok responden yang diuji dinilai dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner secara baik.

2. Pendampingan atau *witnessing*, yaitu pendampingan terhadap 10% responden yang diwawancarai untuk mengamati berjalannya proses wawancara. Maksud dari pendampingan ini terutama adalah untuk melihat sejauh mana responden memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Hasil pengamatan terhadap 10% responden ini menjadi bahan evaluasi untuk menilai apakah instrumen penelitian yang digunakan telah cukup layak atau memerlukan revisi/ perbaikan. Hasil pengamatan terhadap 10% responden menunjukkan bahwa responden dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara dengan baik.
3. Spot Check, yaitu dilakukannya kunjungan ulang terhadap 10% responden yang telah diwawancarai untuk diwawancarai ulang. Jika hasil dari wawancara ulang ini memperoleh hasil yang konsisten dengan wawancara yang dilakukan sebelumnya, maka instrumen penelitian dinilai telah cukup reliabel dan layak untuk digunakan. Berdasarkan spot check yang dilakukan, lebih dari 90% responden memberikan jawaban yang konsisten dengan jawaban yang mereka berikan pada wawancara sebelumnya. Sehingga, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dinilai telah reliabel untuk digunakan dalam penelitian.

Sementara, untuk memperoleh equivalence reliability, dilakukan pengujian statistik terhadap indikator-indikator pada kelompok konsep yang sama untuk mengetahui nilai cronbach alpha yang dimilikinya. Secara umum, nilai cronbach alpha yang diperoleh untuk sejumlah indikator bernilai di atas 0.5, sehingga dapat ditafsirkan memiliki reliabilitas yang baik (hasil uji reliabilitas selengkapya akan ditampilkan dalam temuan data). Untuk variabel-variabel dengan nilai cronbach alpha di bawah 0.5, maka akan dikeluarkan dari analisis.

3.7.2. Validitas

Validitas merujuk pada kesesuaian antara konsep yang hendak diteliti dengan instrumen pengukuran yang digunakan. Atau dengan kata lain cara seorang peneliti menghubungkan definisi-definisi konseptual dengan ukuran-ukuran yang lebih operasional.

Ada beberapa jenis validitas, namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah *construct validity*. Construct validity meneliti apakah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur suatu konsep yang sama akan menunjukkan hasil yang konsisten satu sama lain. Validitas jenis ini menyandarkan ukuran kevalidannya pada ukuran statistik. Metode statistik yang biasa digunakan adalah *factor analysis*.

Berdasarkan *factor analysis*, sejumlah indikator akan diujikan korelasinya dengan beberapa koefisien faktor tertentu. Indikator-indikator yang memiliki kesamaan konstruk akan mengelompok pada faktor tertentu (memiliki korelasi dengan koefisien faktor dengan nilai di atas 0,5). Sehingga, diharapkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur suatu konsep tertentu dalam penelitian ini akan mengelompok pada satu faktor yang sama. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dikatakan memiliki *construct validity* yang baik.

Hasil *factor analysis* menunjukkan terdapat beberapa indikator yang tidak mengelompok pada satu faktor yang sama dengan sejumlah indikator lain, padahal mengukur konsep yang sama. Untuk indikator-indikator seperti ini akan dikeluarkan dari analisis atau diperlakukan sebagai variabel tersendiri (hasil selengkapnya uji *factor analysis* yang dilakukan akan dipaparkan dalam bab temuan data).

3.8. Metode Analisis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik statistik sebagai metode analisis, yaitu *bivariate correlations* dan *multiple regression analysis*.

Bivariate correlations adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui ada-tidak serta kuat-lemahnya hubungan diantara dua variabel. Untuk variabel-variabel interval sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini, koefisien yang digunakan adalah *pearson correlations*, yang nilainya terentang dari 0 (tidak berkorelasi) hingga 1 (berkorelasi sempurna).

Dalam penelitian ini, *bivariate correlations* akan digunakan untuk mengukur hubungan antara tingkat partisipasi politik dengan variabel-variabel nilai *civic culture* dan keaktifan dalam mengkonsumsi informasi politik.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan mencoba melakukan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) untuk menguji model hubungan antara

variabel-variabel nilai civic culture, konsumsi informasi politik, dan tingkat partisipasi politik seseorang.

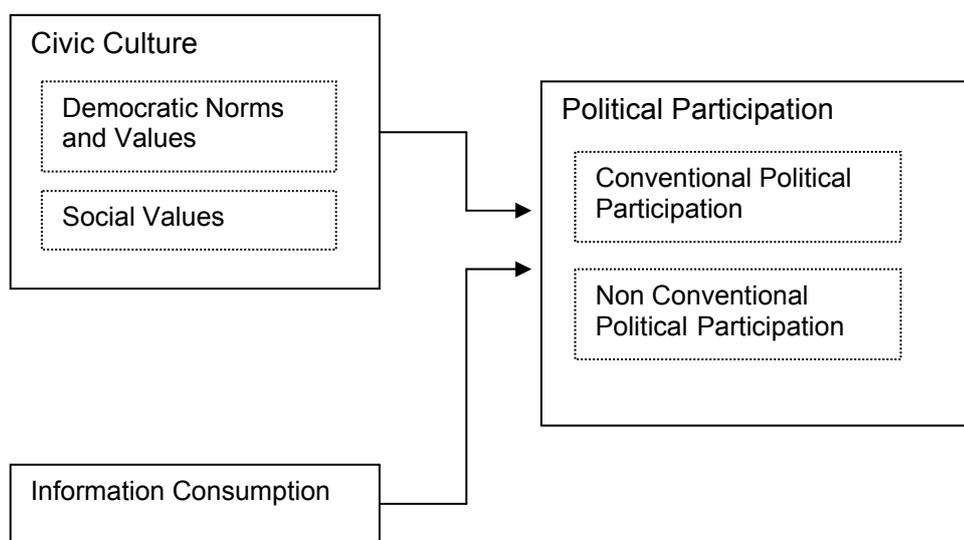
Multiple regression analysis pada dasarnya adalah teknik statistik yang digunakan untuk menghitung atau membuat formulasi persamaan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam multiple regression analysis, terdapat satu variabel yang diposisikan sebagai variabel dependen, yang diukur nilainya berdasarkan nilai sejumlah variabel lainnya yang diposisikan sebagai variabel independen. Dengan demikian, multiple regression analysis hendak mengukur peran atau kontribusi dari sejumlah variabel independen terhadap pembentukan nilai sebuah variabel dependen.

Secara umum, model multiple regression analysis dituliskan dalam bentuk sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_n x_n \quad (3.2)$$

Seperti telah disinggung, penelitian ini menggunakan multiple regression analysis untuk menguji model hubungan diantara variabel-variabel nilai civic culture dan konsumsi informasi politik terhadap tingkat partisipasi politik. Akan dicoba diukur, kontribusi dari variabel-variabel tersebut terhadap pembentukan tingkat partisipasi politik.

Sehingga, dengan demikian, model multiple regression analysis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



3.9. Hipotesis

3.9.1. Hipotesis Teoritik

Berdasarkan hal-hal di atas, maka hipotesis teoritik dari penelitian ini adalah

1. Partisipasi politik seseorang akan berkorelasi dengan nilai-nilai civic culture yang dimilikinya:
 - a. Partisipasi politik akan berkorelasi dengan keterikatan seseorang pada nilai-nilai demokrasi seperti political tolerance, political equality, political trust, support for gradual reform, dan political efficacy karena nilai-nilai ini mendorong tumbuhnya perilaku partisipatif seseorang dalam pemerintahan demokrasi;
 - b. Partisipasi politik akan berkorelasi pula dengan nilai-nilai kewargaan yang mendorong tumbuhnya social capital seperti interpersonal trust, civic engagement, dan solidarity, sebagaimana nilai-nilai ini mempererat ikatan sosial (menguatkan kohesivitas sosial) yang pada gilirannya memperkuat kapasitas seseorang untuk bekerja sama, membuat aliansi, atau mengagregasikan kepentingan-kepentingan mereka dalam rangka berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi.
2. Partisipasi politik seseorang juga akan berkorelasi dengan tingkat konsumsinya atas informasi politik, sebagaimana tindakan tersebut akan menambah pengetahuannya tentang politik, sehingga pada gilirannya akan memperkuat kapasitasnya dalam melakukan aktivitas politik.

3.9.2. Hipotesis Penelitian

Sedangkan, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semakin tinggi skor keterikatan seseorang pada nilai-nilai demokrasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya.
2. Semakin tinggi skor keterikatan seseorang pada nilai-nilai kohesivitas sosial, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya
3. Semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang terhadap informasi politik, semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya
4. Keterikatan seseorang pada nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kohesivitas sosial serta tingkat konsumsinya atas informasi politik secara bersama akan berkontribusi terhadap tingkat partisipasi politik yang dilakukannya; atau dengan kata lain, tingkat partisipasi politik seseorang akan dapat diprediksi

dari tingkat konsumsinya terhadap informasi politik dan keterikatannya pada nilai-nilai demokrasi dan kohesivitas sosial.

3.9.3. Hipotesis Statistik

Berdasarkan hipotesis penelitian di atas, maka dapat disusun hipotesis-hipotesis statistik sebagai berikut:

1. $H_0 : r_{x_1y_1} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_1y_1} \neq 0, \alpha < 0.05$
2. $H_0 : r_{x_2y_1} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_2y_1} \neq 0, \alpha < 0.05$
3. $H_0 : r_{x_3y_1} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_3y_1} \neq 0, \alpha < 0.05$
4. $H_0 : r_{x_4y_1} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_4y_1} \neq 0, \alpha < 0.05$
5. $H_0 : r_{x_5y_1} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_5y_1} \neq 0, \alpha < 0.05$
6. $H_0 : r_{x_6y_1} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_6y_1} \neq 0, \alpha < 0.05$
7. $H_0 : r_{x_7y_1} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_7y_1} \neq 0, \alpha < 0.05$
8. $H_0 : r_{x_8y_1} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_8y_1} \neq 0, \alpha < 0.05$
9. $H_0 : r_{x_9y_1} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_9y_1} \neq 0, \alpha < 0.05$
10. $H_0 : r_{x_{10}y_1} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_{10}y_1} \neq 0, \alpha < 0.05$
11. $H_0 : r_{x_1y_2} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_1y_2} \neq 0, \alpha < 0.05$
12. $H_0 : r_{x_2y_2} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_2y_2} \neq 0, \alpha < 0.05$
13. $H_0 : r_{x_3y_2} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_3y_2} \neq 0, \alpha < 0.05$
14. $H_0 : r_{x_4y_2} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_4y_2} \neq 0, \alpha < 0.05$
15. $H_0 : r_{x_5y_2} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_5y_2} \neq 0, \alpha < 0.05$
16. $H_0 : r_{x_6y_2} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_6y_2} \neq 0, \alpha < 0.05$
17. $H_0 : r_{x_7y_2} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_7y_2} \neq 0, \alpha < 0.05$
18. $H_0 : r_{x_8y_2} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_8y_2} \neq 0, \alpha < 0.05$
19. $H_0 : r_{x_9y_2} = 0, \alpha \geq 0.05$; $H_a : r_{x_9y_2} \neq 0, \alpha < 0.05$
20. $H_0 : y_1 \neq a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + b_5 x_5 + b_6 x_6 + b_7 x_7 + b_8 x_8 + b_9 x_9$;
 $R^2 = 0 ; \alpha \geq 0.05$
 $H_a : y_1 = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + b_5 x_5 + b_6 x_6 + b_7 x_7 + b_8 x_8 + b_9 x_9$;
 $R^2 \neq 0 ; \alpha < 0.05$

Dimana :

y_1 = conventional political participation

y_2 = unconventional political participation

y_3 = voting

x_1 = civic engagement

x_2 = interpersonal trust

x_3 = solidarity

x_4 = political tolerance

x_5 = political equality

x_6 = support for gradual reform

x_7 = political trust

x_8 = political efficacy

x_9 = information consumption

$r_{x_n y_n}$ = koefisien product-moment correlation antara variabel x dan y

R = koefisien korelasi berganda (multiple correlation coefficient)

α = signifikansi/ taraf kepercayaan

BAB 4 TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Berikut akan dipaparkan hasil temuan penelitian berdasarkan jawaban yang diberikan responden pada saat wawancara.

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji reliabilitas dan validitas terhadap indikator-indikator pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut.

4.1.1. Conventional dan Unconventional Political Participation

Uji reliabilitas terhadap indikator-indikator conventional political participation yaitu keaktifan dalam mengikuti rapat-rapat partai politik dan keikutsertaan dalam kegiatan kampanye partai politik/ kandidat menghasilkan angka cronbach alpha sebesar 0.702. Hal ini menunjukkan reliabilitas pertanyaan-pertanyaan ini cukup baik dan dapat diterima.

Sedangkan, hal sebaliknya diperoleh dari uji reliabilitas terhadap indikator-indikator unconventional political participation yaitu keaktifan dalam melakukan bincang-bincang politik, melakukan advokasi kepentingan publik, dan melakukan aksi boikot terhadap produk-produk tertentu. Uji reliabilitas terhadap indikator-indikator ini hanya menghasilkan nilai cronbach alpha sebesar 0.0633. Artinya, indikator-indikator ini tidak reliabel dan tidak dapat digunakan untuk mengukur konsep unconventional political participation yang hendak diteliti.

Terhadap indikator-indikator di atas, selanjutnya dilakukan factor analysis untuk diketahui validitas mereka dalam mengukur konsep partisipasi politik. Hasilnya, 2 indikator secara nyata mengelompok pada 1 faktor, yaitu keaktifan mengikuti rapat-rapat yang diadakan parpol (0.813) dan keikutsertaan dalam kegiatan kampanye partai politik/ kandidat (0.801). Hal ini kembali menunjukkan kedua indikator tersebut terkait sangat erat dan dapat digunakan untuk mewakili satu konsep tertentu.

4.1.2. Konsumsi Informasi Politik

Uji reliabilitas terhadap indikator-indikator di dalam konsep keaktifan mengkonsumsi informasi politik, yaitu frekuensi mengikuti pemberitaan politik

di surat kabar, televisi, dan radio ternyata menunjukkan angka cronbanch alpha yang sangat rendah yaitu 0.3469. Hal ini menunjukkan indikator-indikator ini tidak secara konsisten dapat menunjukkan tingkat konsumsi seseorang terhadap informasi politik.

Namun, untuk uji validitas, indikator-indikator tersebut ternyata mengelompok pada satu faktor yang sama. Berdasarkan factor analysis yang dilakukan, selain mengelompoknya indikator-indikator pada satu faktor, diperoleh pula angka KMO (Kaiser Mayer-Olkin) sebesar 0.557 yang berarti korelasi diantara indikator-indikator tersebut dapat dijelaskan oleh indikator lainnya.

Meski demikian, karena uji reliabilitas menunjukkan hasil tidak memadai, maka indikator-indikator di atas tidak dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat konsumsi informasi politik seseorang secara keseluruhan.

4.1.3. Civic Engagement

Uji reliabilitas terhadap indikator-indikator dalam variabel ini menunjukkan angka yang cukup baik. Diperoleh nilai cronbach alpha sebesar 0.5770. Artinya, indikator keikutsertaan responden dalam kegiatan kemasyarakatan dan keterlibatan warga dalam perkumpulan sosial memiliki konsistensi satu sama lain dalam mengukur variabel civic engagement.

Untuk validitas, hasil factor analysis menunjukkan kedua indikator ini juga mengelompok pada faktor yang sama. Dengan demikian, indikator-indikator ini dinilai secara statistik valid atau mengukur konsep yang sama.

4.1.4. Political Equality

Uji reliabilitas terhadap indikator-indikator political equality tidak menunjukkan hasil yang baik. Nilai cronbach alpha untuk indikator-indikator dalam variabel ini hanya 0.4980. Angka ini masih sedikit di bawah standar nilai yang ditetapkan untuk dapat diterima sebagai indikator yang reliabel.

4.1.5. Support for Gradual Reform

Demikian juga yang ditemukan pada uji reliabilitas variabel support for gradual reform. Nilai cronbach alpha untuk indikator-indikator dalam variabel ini 0.1129 sehingga tidak dapat diterima sebagai indikator yang reliabel dalam mengukur konsep support for gradual reform yang hendak diteliti.

4.1.6. Political Trust

Untuk variabel political trust, uji reliabilitas menemukan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam konsep ini cukup reliabel. Nilai cronbach alpha untuk indikator-indikator ini adalah sebesar 0.6125. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut dapat diterima dalam penelitian.

Selanjutnya, hasil uji validitas melalui factor analysis juga menemukan indikator-indikator ini berada dalam satu faktor yang sama. Indeks Kaiser Meyer-Olsen yang diperoleh (0.632) juga menunjukkan kelayakan indikator-indikator ini untuk diinterpretasikan sebagai indikator-indikator yang mengukur konsep yang sama.

4.1.7. Political Efficacy

Sementara, untuk variabel political efficacy, indikator-indikator yang dipergunakan ternyata tidak menghasilkan angka cronbach alpha yang signifikan, yaitu hanya 0.4154. Artinya, indikator-indikator ini tidak reliabel untuk digunakan mengukur konsep political efficacy.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata ditemukan bahwa sebagian indikator yang digunakan dalam penelitian tidak memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Hanya beberapa variabel yang memiliki indikator dengan reliabilitas dan validitas yang baik. Variabel-variabel itu adalah conventional political participation, political trust, dan civic engagement. Dengan demikian, ketiga variabel inilah yang akan dimasukkan dalam model analisis.

Meski begitu, penelitian ini juga tetap mempertimbangkan beberapa indikator untuk dimasukkan dalam analisis, walaupun mereka tidak memiliki reliabilitas dan validitas yang baik ketika mengukur suatu konsep. Alasannya, indikator-indikator itu memiliki dasar teoritis yang kuat, sehingga dinilai penting untuk turut disertakan dalam analisis. Hanya saja, untuk keperluan itu ia diperlakukan sebagai variabel independen yang terlepas dari indikator-indikator lainnya dan tidak diposisikan untuk mewakili konsep tertentu. Variabel itu adalah keaktifan mengikuti pemberitaan politik di surat kabar dan keaktifan dalam berbincang-bincang mengenai politik.

Variabel keaktifan dalam mengikuti berita politik di surat kabar secara teoritis memiliki peran dalam mempengaruhi partisipasi politik karena ia menambah

pengetahuan seseorang tentang politik yang pada gilirannya diasumsikan akan memperkuat kapasitas seseorang dalam melakukan aktivitas politik.

Sedangkan, keaktifan dalam berbincang-bincang mengenai politik juga dinilai layak dipertimbangkan memiliki korelasi dengan partisipasi politik. Dalam desain awal, variabel ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur bentuk partisipasi politik *unconventional*. Seperti telah diuraikan, nyatanya indikator-indikator yang diasumsikan dapat mengukur konsep tersebut tidak memberikan hasil yang konsisten, sehingga tak dapat digunakan. Artinya, kategorisasi indikator ini sebagai bentuk partisipasi politik *unconventional* juga perlu ditinjau ulang.

Alih-alih sebagai bentuk partisipasi politik, indikator ini cukup dapat dipertimbangkan sebagai bentuk ketertarikan seseorang terhadap politik. Berdiskusi atau berbincang-bincang mengenai politik merupakan salah satu indikasi kuat yang menunjukkan minat seseorang terhadap politik. Orang-orang yang memilih topik pembicaraan politik saat berbincang-bincang dengan rekan atau kerabatnya sangat kuat kemungkinannya memiliki minat yang tinggi terhadap persoalan-persoalan politik sehingga mendorongnya untuk melakukan hal tersebut.

Pada gilirannya, minat seseorang terhadap politik ini diasumsikan dapat menjadi variabel yang layak dipertimbangkan turut menyumbang pengaruh bagi pembentukan angka partisipasi politik yang dilakukan seseorang.

Berikut ini, sebelum memasuki analisis regresi, akan diuraikan terlebih dahulu secara deskriptif temuan semua variabel yang diukur dalam penelitian. Meskipun tak semua variabel ini ditemukan memiliki validitas dan reliabilitas yang baik pada indikator-indikatornya, penjabaran deskriptif tetap dirasa penting dan berguna untuk melukiskan kondisi umum perilaku politik warga Jawa Tengah yang diteliti dalam penelitian ini.

4.2. Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik

4.2.1. *Voting*

Niat masyarakat Jawa Tengah untuk ikut serta mencoblos (*voter turnout*) dalam Pilkada yang akan dilangsungkan ditemukan sangat tinggi. Sejumlah 96,4% responden (424 orang) menyatakan akan menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dalam Pilkada, sedangkan hanya 2,5% responden yang menyatakan tidak akan ikut memilih dalam Pilkada.

Sementara itu, 1,1% responden (5 orang) menolak menjawab atau menjawab tidak tahu.

Meski hasil ini mungkin tak sama dengan angka aktual partisipasi pemilih Pilkada Jawa Tengah (saat pengumpulan data dilakukan, pemungutan suara Pilkada belum berlangsung), namun dapat memberi gambaran mengenai motivasi warga dalam menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Jateng.

Tabel 4.1. Keikutsertaan Warga dalam Pilkada Jateng

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	11	2.5	2.5	2.5
	Ya	424	96.4	96.4	98.9
	Tidak Tahu / Tidak Jawab	5	1.1	1.1	100.0
	Total	440	100.0	100.0	

Dari jawaban responden, diperoleh juga temuan bahwa alasan responden untuk berpartisipasi dalam Pilkada adalah karena hal itu merupakan kewajiban warga negara (46%, 195 responden), hak warga negara (19,3%, 82 responden), ingin memiliki pemimpin yang lebih baik (17,2%, 73 responden), ingin hidup sehari-hari lebih baik (4,2%, 18 responden), ingin Jawa Tengah lebih baik (8,7%, 37 responden), ikut orang lain (3,1%, 13 responden), dan alasan-alasan lainnya (0,7%, 3 responden). Sementara itu, 3 responden yang menjawab akan memilih dalam Pilkada menolak untuk menjawab alasannya untuk ikut memilih.

Tabel 4.2. Alasan Warga Berpartisipasi dalam Pilkada

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kewajiban warga negara	195	44.3	46.0	46.0
	Hak warga negara	82	18.6	19.3	65.3
	Ingin punya pemimpin yang lebih baik	73	16.6	17.2	82.5
	Ingin hidup sehari-hari lebih baik	18	4.1	4.2	86.8
	Ingin Jawa Tengah lebih baik	37	8.4	8.7	95.5
	Ikut orang lain/masyarakat	13	3.0	3.1	98.6
	Lain-lain	3	.7	.7	99.3
	Tidak tahu / Tidak Jawab	3	.7	.7	100.0
	Total	424	96.4	100.0	
	Missing	System	16	3.6	
Total		440	100.0		

Sedangkan, alasan-alasan yang dikemukakan responden untuk tidak akan ikut memilih dalam Pilkada Jateng adalah karena tidak tahu pasangan cagub yang akan dipilih (31,3%, 5 responden), pemilu tidak ada gunanya (18,8%, 3 responden), pemilu hanya menguntungkan cagub yang bersangkutan (12,5%, 2 responden). Sementara, sebanyak 25% responden (4 orang) memiliki alasan-alasan lain dan 12,5% responden (2 orang) tidak menjawab pertanyaan ini.

Tabel 4.3. Alasan Tidak Akan Berpartisipasi dalam Pilkada

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pemilu tidak ada gunanya untuk perbaikan keadaan	3	.7	18.8	18.8
	Pemilu hanya menguntungkan calon Gubernur dan wakil Gubernur	2	.5	12.5	31.3
	Tidak tahu memilih calon Gubernur yang mana	5	1.1	31.3	62.5
	Alasan lain	4	.9	25.0	87.5
	Tidak Tahu / Tidak Jawab	2	.5	12.5	100.0
	Total	16	3.6	100.0	
Missing	System	424	96.4		
Total		440	100.0		

4.2.2. Conventional Political Participation

Untuk pertanyaan mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional (conventional political participation) lainnya (selain mencoblos dalam Pilkada) yang dilakukan warga, ditemukan hal-hal sebagai berikut.

Sebagian besar responden (93,9% atau 413 responden) menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kepartaian seperti rapat-rapat atau acara-acara yang diadakan partai politik lainnya dalam satu bulan terakhir. Hanya 5,9% responden (26 orang) yang mengaku pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dalam kurun satu bulan terakhir, dengan perincian sebanyak 2,7% (12 orang) menyatakan mengikutinya sebanyak sekali, 1,6% (7 orang) menyatakan mengikutinya sebanyak dua kali, 0,7% (3 orang) menyatakan mengikuti sebanyak 3-5 kali, dan 0,9% (4 orang) mengikutinya sebanyak lebih dari lima kali.

Sementara itu, 1 orang responden (0,2%) tidak menjawab pertanyaan ini.

Tabel 4.4. Keikutsertaan dalam rapat-rapat atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan partai politik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	413	93.9	93.9	93.9
1 Kali	12	2.7	2.7	96.6
2 Kali	7	1.6	1.6	98.2
3-5 kali	3	.7	.7	98.9
Lebih dari 5 kali	4	.9	.9	99.8
Tidak jawab	1	.2	.2	100.0
Total	440	100.0	100.0	

Sebagian besar responden (95,5% atau 420 orang) juga menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye partai politik yang diadakan selama sebulan terakhir seperti menghadiri kampanye, membagikan selebaran/ brosur, dan sebagainya. Hanya 4,3% (19 orang) yang menyatakan pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dalam kurun waktu sebulan terakhir.

Sebanyak 2% responden (9 orang) mengaku mengikutinya sebanyak 1 kali, 1,1% (5 orang) menyatakan mengikutinya sebanyak 2 kali, 0,7% responden (3 orang) menyatakan mengikutinya sebanyak 3-5 kali, dan 0,5% responden (2 orang) menyatakan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut lebih dari 5 kali dalam sebulan terakhir.

1 orang responden (0,2%) tidak menjawab pertanyaan ini.

Tabel 4.5. Keikutsertaan dalam kegiatan kampanye yang diadakan partai politik/ tim sukses kandidat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	420	95.5	95.5	95.5
1 Kali	9	2.0	2.0	97.5
2 Kali	5	1.1	1.1	98.6
3-5 kali	3	.7	.7	99.3
Lebih dari 5 kali	2	.5	.5	99.8
Tidak jawab	1	.2	.2	100.0
Total	440	100.0	100.0	

Dengan demikian, tingkat partisipasi politik konvensional responden secara rata-rata tergolong sangat rendah yaitu sebesar 1,099 saja.

Tabel 4.6. Nilai rata-rata partisipasi politik konvensional

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Conventional Participation	439	1.0	5.0	482.5	1.099	.4299	.185
Valid N (listwise)	439						

Sedangkan, distribusi tingkat partisipasi politik konvensional warga secara keseluruhan adalah 92,7% tergolong sangat rendah, 2,3% tergolong sangat rendah-rendah, 2,1% tergolong rendah, 0,9% terkategori rendah-sedang, 0,7% tergolong sedang, 0,7% tergolong sedang-tinggi, 0,5% tergolong tinggi, dan 0,2% tergolong sangat tinggi.

Tabel 4.7. Distribusi rata-rata tingkat partisipasi politik konvensional

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Rendah	407	92.7	92.7	92.7
	1.5	10	2.3	2.3	95.0
	Rendah	9	2.1	2.1	97.0
	2.5	4	.9	.9	97.9
	Sedang	3	.7	.7	98.6
	3.5	3	.7	.7	99.3
	Tinggi	2	.5	.5	99.8
	Sangat Tinggi	1	.2	.2	100.0
	Total	439	100.0	100.0	

4.2.3. Unconventional Political Participation

Selanjutnya, untuk pertanyaan mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional (unconventional political participation) yang dilakukan warga, diperoleh temuan sebagai berikut.

Sebesar 98,2% responden (432 orang) menyatakan tidak pernah melakukan bentuk-bentuk advokasi kepentingan publik seperti demonstrasi, membuat petisi, dan sebagainya. Sementara, sisanya, 0,9% (4 orang) menyatakan melakukannya sebanyak 1 kali, 0,5% (2 orang) mengaku melakukan dua kali, 0,2% (1 orang) melakukannya 3-5 kali, dan 0,2% (1 orang) melakukannya lebih dari 5 kali.

Tabel 4.8. Keaktifan dalam melakukan aksi-aksi advokasi kepentingan publik (demonstrasi, penandatanganan petisi, dan sebagainya)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	432	98.2	98.2
	1 Kali	4	.9	99.1
	2 Kali	2	.5	99.5
	3-5 kali	1	.2	99.8
	Lebih dari 5 kali	1	.2	100.0
	Total	440	100.0	100.0

Sedangkan, untuk aksi-aksi politik dalam bentuk pemboikotan produk-produk tertentu, mayoritas responden (98,4% atau sejumlah 433 orang) mengaku tidak pernah melakukannya. 0,7% (3 orang) menyatakan melakukannya sebanyak 1 kali, 0,5% (2 orang) mengaku melakukannya lebih dari 5 kali, dan 0,5% (2 orang) menolak untuk menjawab.

Tabel 4.9. Keaktifan dalam melakukan aksi pemboikotan atas produk-produk tertentu (karena alasan politis)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	433	98.4	98.4
	1 Kali	3	.7	99.1
	Lebih dari 5 kali	2	.5	99.5
	Tidak jawab	2	.5	100.0
	Total	440	100.0	100.0

Mayoritas responden (83% atau 365 orang) juga menyatakan tidak pernah melakukan bincang-bincang atau diskusi mengenai politik dengan teman-teman, keluarga, atau kerabatnya yang lain dalam satu bulan

terakhir. 5,9% responden (26 orang) menyatakan melakukannya 1 kali, 3% (13 orang) menyatakan melakukannya 2 kali, 4,1% (18 orang) melakukannya sekitar 3-5 kali, dan 4,1% (18 orang) mengaku melakukannya lebih dari 5 kali.

Tabel 4.10. Keaktifan dalam melakukan bincang-bincang/ diskusi dengan rekan, kerabat, atau keluarga tentang politik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	365	83.0	83.0	83.0
1 Kali	26	5.9	5.9	88.9
2 Kali	13	3.0	3.0	91.8
3-5 kali	18	4.1	4.1	95.9
Lebih dari 5 kali	18	4.1	4.1	100.0
Total	440	100.0	100.0	

Dengan demikian, tingkat partisipasi politik non konvensional yang dilakukan warga secara rata-rata juga tergolong sangat rendah yaitu sebesar 1,166.

Tabel 4.11. Tingkat rata-rata partisipasi politik non konvensional

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Unconventional Participation	439	1.0	5.0	511.7	1.166	.4367	.191
Valid N (listwise)	439						

Selanjutnya, distribusi tingkat partisipasi politik non konvensional warga secara keseluruhan adalah 81,1% tergolong sangat rendah, 9,8% tergolong sangat rendah-rendah, 3,9% tergolong rendah, 4,5% tergolong rendah-sedang, 0,2% tergolong sedang-tinggi, 0,2% tergolong tinggi-sangat tinggi, dan 0,2% terkategori sangat tinggi.

Tabel 4.12. Distribusi rata-rata tingkat partisipasi politik non konvensional

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Rendah	356	81.1	81.1	81.1
	1.3	29	6.6	6.6	87.7
	1.7	14	3.2	3.2	90.9
	Rendah	17	3.9	3.9	94.8
	2.3	19	4.3	4.3	99.1
	2.7	1	.2	.2	99.3
	3.3	1	.2	.2	99.5
	4.3	1	.2	.2	99.8
	Sangat Tinggi	1	.2	.2	100.0
	Total	439	100.0	100.0	

4.3. Tingkat Keaktifan Warga dalam Mencari/ Mengonsumsi Informasi Politik

Untuk variabel tingkat keaktifan warga dalam mencari informasi politik, ditemukan hal-hal sebagai berikut.

Sebesar 71,3% responden (313 orang) mengaku tidak pernah mengikuti berita-berita mengenai politik atau sosial kemasyarakatan di surat kabar. Sedangkan, 16,9% (74 orang) menyatakan tidak setiap pekan membaca surat kabar, 4,1% (18 orang) menyatakan membaca surat kabar 1-2 hari dalam sepekan, 1,6% (7 orang) menyatakan membaca 3-4 hari dalam sepekan, dan 6,2% (27 orang) membaca koran setiap hari atau hampir tiap hari.

Tingkat konsumsi rata-rata responden terhadap surat kabar adalah sebesar 1,54 (terkategori sebagai sangat rendah-rendah/ frekuensi mengikuti berita tidak pernah hingga jarang).

Tabel 4.13. Keaktifan dalam mengonsumsi berita-berita politik di surat kabar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Pernah	313	71.3	71.3	71.3
Jarang (Tidak Setiap Minggu)	74	16.9	16.9	88.2
1-2 hari dalam seminggu	18	4.1	4.1	92.3
3-4 hari dalam seminggu	7	1.6	1.6	93.8
Setiap hari atau hampir tiap hari	27	6.2	6.2	100.0
Total	439	100.0	100.0	

Untuk jenis media televisi, ditemukan tingkat konsumsi responden yang cukup besar. Sebesar 47,4% responden (208 orang) menyatakan mereka mengikuti perkembangan berita-berita politik atau sosial kemasyarakatan di televisi setiap harinya. Sementara, 10,3% responden (45 orang) menyatakan mengikuti berita politik di televisi 3-4 hari dalam seminggu, 8,9% (39 orang) mengikuti sebanyak 1-2 hari sepekan, dan 23,5% (103 orang) menyatakan tidak setiap pekan mengikuti berita sosial politik. Responden yang mengaku tidak pernah mengikuti berita sosial politik di televisi sama sekali adalah sebanyak 10% (44 orang).

Tingkat konsumsi rata-rata responden akan media televisi adalah sebesar 3,64 atau terkategori sebagai sedang hingga tinggi (frekuensi konsumsi 1-4 hari dalam sepekan).

Tabel 4.14. Keaktifan dalam mengikuti berita-berita politik di televisi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	44	10.0	10.0	10.0
	Jarang (Tidak Setiap Minggu)	103	23.5	23.5	33.5
	1-2 hari dalam seminggu	39	8.9	8.9	42.4
	3-4 hari dalam seminggu	45	10.3	10.3	52.6
	Setiap hari atau hampir tiap hari	208	47.4	47.4	100.0
	Total	439	100.0	100.0	

Untuk tingkat konsumsi berita di radio, angka yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi berita di televisi, namun lebih besar dibandingkan angka konsumsi berita di surat kabar.

Sebanyak 52,8% (232 orang) menyatakan tidak pernah mengikuti berita-berita sosial politik di radio, 21,4% (94 orang) tidak setiap pekan, 5,5% (24 orang) 1-2 hari dalam sepekan, 6,6% (29 orang) 3-4 hari dalam sepekan, dan 13,7% (60 orang) mengikutinya setiap hari.

Tingkat konsumsi rata-rata responden untuk media radio adalah sebesar 2,07 atau terkategori rendah (frekuensi konsumsi jarang atau tidak setiap pekan mengikuti berita sosial politik di radio)

Tabel 4.15. Keaktifan dalam mengikuti berita-berita politik di radio

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	232	52.8	52.8	52.8
	Jarang (Tidak Setiap Minggu)	94	21.4	21.4	74.3
	1-2 hari dalam seminggu	24	5.5	5.5	79.7
	3-4 hari dalam seminggu	29	6.6	6.6	86.3
	Setiap hari atau hampir tiap hari	60	13.7	13.7	100.0
	Total	439	100.0	100.0	

Dari uraian di atas, maka secara keseluruhan tingkat konsumsi responden akan media (baik koran, radio, maupun televisi) adalah sebesar 2,409 atau terkategori sebagai rendah-sedang (rata-rata responden mengkonsumsi media sesekali hingga 2 hari dalam sepekan).

Tabel 4.16. Tingkat rata-rata konsumsi berita politik di media

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Information Seeking	439	1.0	5.0	1057.7	2.409	.8927	.797
Valid N (listwise)	439						

Sedangkan, distribusi frekuensi rata-rata responden dalam mengkonsumsi media adalah 5,9% terkategori sangat rendah, 24,6% terkategori sangat rendah-rendah, 39,2% terkategori rendah-sedang, 23,5% tergolong sedang-tinggi, 6,4% tinggi-sangat tinggi, dan 0,5% sangat tinggi.

4.4. Nilai-Nilai Budaya Politik (*Civic Culture*) Warga

4.4.1. Civic Engagement

Dalam hal keikutsertaan warga dalam kegiatan kemasyarakatan, sebagai salah satu indikator *civic engagement*, sebagian besar responden (47,4% atau 208 orang) ternyata mengaku sering mengikutinya. Sementara itu, 10% responden (44 orang) menyatakan tidak pernah mengikuti, 9,1% (40 orang) menyatakan jarang, 12,1% (53 orang) menyatakan kadang-kadang, dan 21,4% menyatakan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Tingkat keikutsertaan responden dalam kegiatan kemasyarakatan adalah 3,61 atau terkategori sedang-tinggi.

Tabel 4.17. Keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	44	10.0	10.0	10.0
Jarang	40	9.1	9.1	19.1
Kadang-kadang	53	12.1	12.1	31.2
Sering	208	47.4	47.4	78.6
Selalu	94	21.4	21.4	100.0
Total	439	100.0	100.0	

Sedangkan, dalam hal jaringan kerja sama yang diikuti warga, ditemukan bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 38,5% (169 orang) menyatakan tergabung pada satu organisasi kemasyarakatan. Sementara, 21,9% responden (96 orang) menyatakan tergabung dalam 2 buah organisasi kemasyarakatan, 8,7% responden (38 orang) tergabung dalam 3 buah organisasi, dan 13,2% responden (58 orang) tergabung dalam lebih dari 3 buah organisasi. Yang menyatakan sama sekali tidak tergabung dalam organisasi apa pun sebanyak 17,8% (78 orang).

Tingkat keterhubungan warga dengan jaringan kerja sama sosial ini secara rata-rata adalah 2,61 atau terkategori rendah-sedang.

Tabel 4.18. Keterhubungan dalam jaringan kerja sama sosial

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak ada	78	17.8	17.8	17.8
1 buah	169	38.5	38.5	56.3
2 buah	96	21.9	21.9	78.1
3 buah	38	8.7	8.7	86.8
Lebih dari 3 buah	58	13.2	13.2	100.0
Total	439	100.0	100.0	

4.4.2. Kepercayaan dan Solidaritas Sosial

Dalam hal kepercayaan warga masyarakat terhadap warga lainnya, ternyata ditemukan bahwa mayoritas responden menyatakan kecenderungan untuk tidak mempercayai orang lain. Sebesar 59,6% (252 orang) menyatakan tidak setuju atas pernyataan bahwa kebanyakan orang bisa dipercaya. Sedangkan, kelompok yang menyatakan setuju adalah sebesar 37,1% (157 orang). Sisanya, 1,9% (8 orang) menyatakan sangat setuju dan 1,4% (6 orang) menyatakan sangat tidak setuju.

Secara rata-rata, tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap orang lain adalah 2,77 atau dapat dikategorikan sebagai rendah-sedang (relatif rendah).

Tabel 4.19. Pendapat bahwa kebanyakan orang bisa dipercaya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	8	1.9	1.9	1.9
Tidak Setuju	252	59.6	59.6	61.5
Setuju	157	37.1	37.1	98.6
Sangat Setuju	6	1.4	1.4	100.0
Total	423	100.0	100.0	

Sementara, dalam hal solidaritas sosial, mayoritas responden justru menyatakan percaya bahwa orang pada umumnya masih memiliki rasa solidaritas sosial. Sebesar 75,3% responden (317 orang) menyatakan tidak setuju dan 3,3% (14 orang) sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa orang pada umumnya tidak bersedia membantu orang lain atau bahwa mereka hanya memikirkan diri sendiri. Sementara, 20% (84 orang) mengatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan 1,4% (6 orang) mengatakan sangat setuju.

Tingkat kepercayaan rata-rata responden terhadap masih adanya solidaritas sosial warga masyarakat adalah sebesar 3,59 atau dapat dikategorikan sebagai sedang-tinggi (relatif tinggi).

Tabel 4.20. Pendapat bahwa kebanyakan orang tidak mau membantu orang lain

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	6	1.4	1.4	1.4
	Setuju	84	20.0	20.0	21.4
	Tidak setuju	317	75.3	75.3	96.7
	Sangat Tidak Setuju	14	3.3	3.3	100.0
	Total	421	100.0	100.0	

4.4.3. Political Tolerance

Untuk pertanyaan terkait rasa toleransi terhadap orang lain yang memiliki pandangan politik berbeda, sebagian besar responden ditemukan memiliki rasa toleransi yang tinggi. 66,8% responden (247 orang) mengaku tidak setuju dengan pernyataan bahwa berbincang-bincang dengan orang lain yang memiliki perbedaan pandangan politik adalah tidak nyaman. Sementara, 29,2% responden (108 orang) menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya, 2,4% (9 orang) menyatakan sangat setuju dan 1,6% (6 orang) menyatakan sangat tidak setuju.

Tingkat rasa toleransi responden terhadap orang lain dengan pandangan politik berbeda adalah sebesar 3,36 atau terkategori sedang-tinggi (relatif tinggi).

Tabel 4.21. Pendapat bahwa tidak nyaman berbicara dengan orang yang berbeda pandangan politik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	9	2.4	2.4	2.4
	Setuju	108	29.2	29.2	31.6
	Tidak setuju	247	66.8	66.8	98.4
	Sangat tidak setuju	6	1.6	1.6	100.0
	Total	370	100.0	100.0	

4.4.4. Political Equality

Persepsi responden mengenai kesetaraan kemampuan orang dalam memimpin diukur melalui dua indikator, yaitu kesetaraan kemampuan militer-sipil dan kesetaraan kemampuan tua-muda.

Untuk pertanyaan mengenai kesetaraan kemampuan militer-sipil, sikap responden terbelah menjadi dua bagian yang relatif sama besar. 49,5% responden (193 orang) menyatakan setuju pada pernyataan bahwa militer lebih memiliki kemampuan untuk memimpin dibandingkan sipil. Sedikit lebih kecil dari itu, 47,4% responden (185 orang) menyatakan tidak setuju. Sisanya, 2,3% (9 orang) menyatakan sangat setuju dan 0,8% (3 orang) menyatakan sangat tidak setuju.

Secara rata-rata, tingkat persepsi responden mengenai kesetaraan kemampuan militer-sipil adalah sebesar 2,95 atau terkategori rendah-sedang (relatif rendah).

Tabel 4.22. Pendapat bahwa militer lebih mampu memimpin dibandingkan sipil

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat setuju	9	2.3	2.3	2.3
Setuju	193	49.5	49.5	51.8
Tidak setuju	185	47.4	47.4	99.2
Sangat tidak setuju	3	.8	.8	100.0
Total	390	100.0	100.0	

Sedangkan, untuk pertanyaan mengenai kesetaraan kemampuan tua-muda dalam memimpin, selisih perbedaan sikap responden sedikit lebih besar. 55,1% responden (226 orang) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa seseorang yang lebih tua lebih memiliki kemampuan untuk memimpin sementara 42,4% responden (174 orang) menyatakan setuju. Sisanya, 2% (8 orang) menyatakan sangat setuju dan 0,5% (2 orang) sangat tidak setuju.

Secara rata-rata, tingkat persepsi responden mengenai kesetaraan kemampuan tua-muda dalam memimpin adalah sebesar 3,1 atau terkategori sedang-tinggi (relatif tinggi).

Tabel 4.23. Pendapat bahwa sosok lebih tua lebih mampu memimpin dibandingkan dengan sosok lebih muda

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	8	2.0	2.0	2.0
	Setuju	174	42.4	42.4	44.4
	Tidak setuju	226	55.1	55.1	99.5
	Sangat tidak setuju	2	.5	.5	100.0
	Total	410	100.0	100.0	

Sehingga, berdasarkan uraian di atas, maka nilai persepsi rata-rata responden atas kesetaraan kemampuan dalam memimpin adalah sebesar 3,02 atau terkategori sebagai sedang-tinggi (relatif tinggi).

Tabel 4.24. Nilai rata-rata persepsi terhadap kesetaraan kemampuan memimpin

N	Valid	386
	Missing	0
Mean		3.0259
Std. Deviation		.84859
Variance		.72011
Range		3.50
Minimum		1.00
Maximum		4.50

4.4.5. Dukungan terhadap Perubahan secara Bertahap

Variabel dukungan responden terhadap perubahan secara bertahap diukur dengan dua indikator, yaitu penolakan terhadap perubahan revolusioner dan dukungan terhadap perubahan secara bertahap sendiri.

Untuk pertanyaan mengenai sikap responden terhadap perubahan yang dilakukan secara revolusioner (perubahan pemerintahan secara radikal atau total), mayoritas responden, yaitu sejumlah 76.4% (278 orang) menyatakan ketidaksetujuannya. Responden yang menyatakan setuju adalah sebesar 20,1% (73 orang) dan yang menyatakan sangat setuju adalah sebesar 3,6% (1 orang).

Secara rata-rata, nilai penolakan responden terhadap dilakukannya perubahan revolusioner adalah sebesar 3,49 atau terkategori sebagai sedang-tinggi (relatif tinggi).

Tabel 4.25. Pendapat bahwa perubahan perlu dilakukan secara revolusioner

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat setuju	13	3.6	3.6	3.6
Setuju	73	20.1	20.1	23.6
Tidak setuju	278	76.4	76.4	100.0
Total	364	100.0	100.0	

Sedangkan, untuk pertanyaan mengenai dukungan responden terhadap perubahan secara bertahap, ditemukan mayoritas responden, yaitu sebesar 78% (302 orang) menyatakan kesetujuannya, artinya terjadi konsistensi dengan pertanyaan sebelumnya (penolakan terhadap perubahan revolusioner). Sisanya, 13,2% (51 orang) menyatakan sangat setuju, 8% (31 orang) menyatakan tidak setuju, dan 0,8% (3 orang) menyatakan sangat tidak setuju.

Nilai rata-rata dukungan responden terhadap perubahan secara bertahap adalah sebesar 3,95 atau tinggi.

Tabel 4.26. Pendapat bahwa perubahan perlu dilakukan secara bertahap

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	3	.8	.8	.8
Tidak Setuju	31	8.0	8.0	8.8
Setuju	302	78.0	78.0	86.8
Sangat setuju	51	13.2	13.2	100.0
Total	387	100.0	100.0	

Dengan demikian, secara keseluruhan tingkat dukungan responden terhadap dilakukannya perubahan secara bertahap adalah sebesar 3,717 atau terkategori sebagai sedang-tinggi (relatif tinggi).

Tabel 4.27. Nilai rata-rata dukungan terhadap perubahan secara bertahap

N	Valid	361
	Missing	0
Mean		3.717
Std. Deviation		.6128
Variance		.3755
Range		3.0
Minimum		1.5
Maximum		4.5

4.4.6. Political Trust

Kepercayaan terhadap sistem politik diukur melalui tiga indikator, yaitu kepercayaan terhadap pemerintah lokal (daerah), partai politik, dan pilkada sebagai mekanisme memilih pemimpin.

Untuk partai politik, responden memberikan respon kepercayaan dan kurangpercayaan secara cukup seimbang. Sebesar 41,1% (170 orang) menyatakan cukup percaya terhadap kinerja partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sedangkan, 37,7% lainnya (156 orang) menyatakan kurang percaya. Sisanya, 15,2% (63 orang)

menyatakan tidak percaya sama sekali dan 6% (25 orang) menyatakan sangat percaya.

Rata-rata tingkat kepercayaan responden terhadap partai politik adalah sebesar 2,85 atau terkategori rendah-sedang (relatif rendah).

Tabel 4.28. Kepercayaan bahwa partai politik telah bekerja keras untuk kepentingan rakyat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Percaya Sama Sekali	63	15.2	15.2	15.2
Kurang Percaya	156	37.7	37.7	52.9
Cukup Percaya	170	41.1	41.1	94.0
Sangat Percaya	25	6.0	6.0	100.0
Total	414	100.0	100.0	

Sementara untuk pemerintah daerah, mayoritas responden (65,7% atau 276 orang) menyatakan cukup percaya terhadap kinerja mereka. Sedangkan, 20,2% (85 orang) menyatakan kurang percaya, 3,1% (13 orang) menyatakan tidak percaya sama sekali, dan 11% (46 orang) menyatakan sangat percaya.

Tingkat rata-rata kepercayaan responden terhadap kesungguhan pemerintah daerah bekerja untuk rakyat adalah sebesar 3,61 atau terkategori sedang-tinggi (relatif tinggi).

Taeb1 4.29. Kepercayaan bahwa Pemerintah Daerah telah bekerja keras untuk kepentingan rakyat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Percaya Sama Sekali	13	3.1	3.1	3.1
Kurang Percaya	85	20.2	20.2	23.3
Cukup Percaya	276	65.7	65.7	89.0
Sangat Percaya	46	11.0	11.0	100.0
Total	420	100.0	100.0	

Sedangkan, terhadap pilkada sebagai proses politik pembawa perubahan, mayoritas responden (68,4% atau 290 orang) juga menyatakan cukup percaya. Sisanya, 20,3% (86 orang) menyatakan kurang percaya, 3,3% (14 orang) menyatakan tidak percaya sama sekali, dan 8% (34 orang) menyatakan sangat percaya.

Tingkat kepercayaan rata-rata responden terhadap pilkada sebagai proses politik yang membawa perubahan adalah sebesar 3,58 atau terkategori sedang-tinggi (relatif tinggi).

Tabel 4.30. Kepercayaan bahwa Pilkada akan membawa perbaikan politik di Jawa Tengah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Percaya Sama Sekali	14	3.3	3.3	3.3
Kurang Percaya	86	20.3	20.3	23.6
Cukup Percaya	290	68.4	68.4	92.0
Sangat Percaya	34	8.0	8.0	100.0
Total	424	100.0	100.0	

Dengan demikian, secara keseluruhan, nilai kepercayaan responden terhadap sistem politik rata-rata adalah sebesar 3,351 atau terkategori sebagai sedang-tinggi (relatif tinggi).

Tabel 4.31. Nilai rata-rata kepercayaan terhadap sistem politik

N	Valid	399
	Missing	0
Mean		3.351
Std. Deviation		.8407
Variance		.7068
Range		4.0
Minimum		1.0
Maximum		5.0

4.4.7. Rasa Percaya Diri terhadap Efektivitas Peran Warga dalam Politik (*Political Efficacy*)

Variabel rasa percaya diri warga terhadap perannya dalam politik diukur dengan dua indikator, yaitu kepercayaan tentang perannya dalam mempengaruhi proses politik (*internal efficacy*) dan kepercayaan terhadap responsivitas sistem politik terhadap aspirasi yang disampaikan.

Untuk kepercayaan terhadap perannya dalam mempengaruhi proses politik (melalui mengikuti pilkada/ pemilu), mayoritas responden menyatakan kepercayaannya. 26,7% responden (110 orang) menyatakan perannya dalam politik memiliki pengaruh meskipun sedikit. 23,1% responden (95 orang) mengambil jawaban tengah yaitu mungkin berpengaruh, mungkin pula tidak. Sementara, 17,5% responden (72 orang) menyatakan perannya kemungkinan kecil akan berpengaruh. 18,4% responden (76 orang) menyatakan perannya tidak akan mempengaruhi apa-apa. Sebaliknya, 14,3% responden (59 orang) meyakini perannya dalam politik akan sangat mempengaruhi keadaan.

Rata-rata tingkat kepercayaan responden terhadap peran politiknya dalam mempengaruhi keadaan adalah sebesar 3,01 atau terkategori sedang.

Tabel 4.32. Persepsi tentang Arti Penting Peran Serta Warga dalam Pilkada

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sama sekali tidak akan mempengaruhi apa-apa	76	18.4	18.4	18.4
	Hampir tidak berpengaruh apa-apa/ kecil kemungkinannya	72	17.5	17.5	35.9
	Mungkin berpengaruh, mungkin pula tidak	95	23.1	23.1	59.0
	Ada pengaruhnya, walaupun sedikit	110	26.7	26.7	85.7
	Sangat menentukan/ besar pengaruhnya terhadap keadaan	59	14.3	14.3	100.0
	Total	412	100.0	100.0	

Sementara, atas pertanyaan mengenai kepercayaannya terhadap responsivitas sistem politik (institusi-institusi politik) terhadap aspirasi yang disampaikan publik, mayoritas responden justru cenderung menyatakan pesimisme. 30,6% responden (126 orang) menyatakan sedikit sekali aspirasi yang didengarkan. 18% responden (74 orang) bahkan menyatakan institusi-institusi politik sama sekali tidak mendengarkan aspirasi publik. Meski demikian, mayoritas responden (32% atau 132 orang) mengambil jawaban netral, yaitu bahwa aspirasi kadang didengarkan dan kadang tidak. Hanya 2,7% responden (11 orang) yakin bahwa banyak aspirasi publik yang didengarkan institusi-institusi politik.

Rata-rata tingkat kepercayaan responden terhadap responsivitas institusi-institusi politik terhadap aspirasi publik adalah sebesar 2,56 atau rendah-sedang (relatif rendah).

Tabel 4.33. Pendapat tentang responsivitas institusi-institusi politik terhadap aspirasi yang disampaikan warga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sama sekali tidak didengarkan	74	18.0	18.0	18.0
Sedikit sekali aspirasi yang didengarkan	126	30.6	30.6	48.5
Kadang didengarkan, kadang tidak	132	32.0	32.0	80.6
Cukup banyak aspirasi yang didengarkan	69	16.7	16.7	97.3
Banyak aspirasi yang didengarkan	11	2.7	2.7	100.0
Total	412	100.0	100.0	

Dengan demikian, secara keseluruhan, rata-rata tingkat kepercayaan diri responden terhadap pengaruh perannya dalam politik adalah sebesar 2,776 atau terkategori sebagai rendah-sedang.

Tabel 4.44 Nilai rata-rata kepercayaan diri warga terhadap pengaruh perannya dalam politik

N	Valid	393
	Missing	0
Mean		2.776
Std. Deviation		.9487
Variance		.9000
Range		4.0
Minimum		1.0
Maximum		5.0

4.5. Hubungan antara Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik dengan Budaya Politik Warga

Berikut kita akan menghubungkan variabel keaktifan seorang warga negara dalam politik dengan variabel nilai-nilai *civic culture* yang dimilikinya. Untuk penelitian ini, kita membedakan dua kelompok *civic culture*, yaitu kelompok nilai-nilai yang berkaitan dengan komitmen warga terhadap nilai-nilai kemasyarakatan (*social engagement*) dan kelompok nilai-nilai yang berkaitan dengan komitmen warga terhadap nilai-nilai demokrasi (*democratic engagement*).

4.5.1. Hubungan Partisipasi Politik dengan Keterikatan Warga pada Nilai-Nilai Kemasyarakatan

Secara umum, ternyata tidak banyak ditemukan hubungan yang signifikan antara partisipasi politik warga dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang dimilikinya.

Dalam hal bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional, hanya variabel *civic engagement* yang memiliki korelasi signifikan. Variabel ini ditemukan memiliki korelasi dengan nilai signifikansi 0,000 (sangat signifikan). Namun, kekuatan hubungan variabel ini terhadap partisipasi politik konvensional juga lemah, yaitu hanya 0,185.

Tabel 4.46. Hubungan antara partisipasi politik konvensional dengan nilai-nilai kemasyarakatan warga

		Conventional Participation	Civic Engagement	Interpersonal Trust	Solidarity
Conventional Participation	Pearson Correlation	1	.185(**)	-.003	.008
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.956	.863
	N	440	439	423	421

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Untuk bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, variabel civic engagement juga ditemukan memiliki korelasi sangat signifikan (0,000). Kekuatan hubungan variabel ini dengan partisipasi politik non konvensional sedikit lebih baik dibandingkan dengan partisipasi politik konvensional, namun masih lemah yaitu sebesar 0,209.

Selain itu, variabel kepercayaan terhadap orang lain juga ditemukan memiliki korelasi signifikan (0,014) namun dengan arah hubungan yang negatif (-0,119). Artinya, tingkat partisipasi politik non konvensional seorang warga cenderung berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaannya terhadap orang lain.

Tabel 4.47. Hubungan antara partisipasi politik non konvensional dengan nilai-nilai kemasyarakatan

		Unconventional Participation	Civic Engagement	Interpersonal Trust	Solidarity
Unconventional Participation	Pearson Correlation	1	.209(**)	-.119(*)	.013
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.014	.798
	N	440	439	423	421

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4.5.2. Hubungan Partisipasi Politik dengan Komitmen Warga terhadap Nilai-Nilai Demokrasi

Variabel partisipasi politik dengan nilai-nilai demokratis warganya juga tidak banyak memiliki korelasi yang signifikan.

Untuk partisipasi politik konvensional, tidak banyak ditemukan nilai-nilai demokratis yang memiliki korelasi signifikan. Satu-satunya variabel yang memiliki korelasi adalah *political efficacy* (nilai signifikansi 0,021) dengan kekuatan hubungan sebesar 0,116 (lemah).

Tabel 4.49. Hubungan antara partisipasi politik konvensional dengan tingkat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi

		Conventional Participation	Political Tolerance	Gradual Reform	Political Trust	Political Efficacy	Political Equality
Conventional Participation	Pearson Correlation	1	-.030	-.055	.050	.116(*)	-.036
	Sig. (2-tailed)	.	.559	.301	.319	.021	.478
	N	440	370	362	399	393	386

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pada partisipasi politik non konvensional juga ditemukan hal serupa. Hanya variabel *political efficacy* yang memiliki korelasi secara signifikan (tingkat signifikansi 0,014) dengan kekuatan hubungan sebesar 0,124 (lemah).

Tabel 4.50. Hubungan antara partisipasi politik non konvensional dengan tingkat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi

		Unconventional Participation	Toleransi terhadap Perbedaan Pandangan Politik	Gradual Reform	Political Trust	Political Efficacy	Persepsi terhadap Kesetaraan Kemampuan Memimpin
Unconventional Participation	Pearson Correlation	1	-.068	.057	-.041	.124(*)	.040
	Sig. (2-tailed)	.	.195	.276	.420	.014	.435
	N	440	370	362	399	393	386

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat kita rangkumkan nilai-nilai *civic culture* yang memiliki korelasi signifikan dengan partisipasi politik adalah:

- **Interpersonal trust** (kepercayaan terhadap orang lain), memiliki korelasi dengan partisipasi politik non konvensional (hubungan berbanding terbalik) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 dan kekuatan hubungan -0,119;
- **Civic engagement**, memiliki korelasi dengan partisipasi politik konvensional (tingkat signifikansi 0,000 dan kekuatan hubungan 0,185) dan dengan partisipasi politik non konvensional (tingkat signifikansi 0,000 dan kekuatan hubungan sebesar 0,209);
- **Political efficacy**, memiliki korelasi dengan partisipasi politik konvensional (tingkat signifikansi 0,021 dan kekuatan hubungan 0,116) dan dengan partisipasi politik non konvensional (tingkat signifikansi 0,014 dan kekuatan hubungan 0,124).

4.6. Hubungan antara Tingkat Keaktifan Warga dalam Mencari Informasi Politik dengan Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik

Selanjutnya, kita akan menghubungkan tingkat keaktifan warga dalam mencari informasi politik (tingkat konsumsi berita-berita politik di media) dengan tingkat partisipasi politiknya.

Tabel 4.51. Hubungan antara tingkat konsumsi informasi politik dengan tingkat partisipasi politik

		Information Seeking	Conventional Participation	Unconventional Participation
Information Seeking	Pearson Correlation	1	.142(**)	.172(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.003	.000
	N	440	440	440

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan uji statistik, ditemukan tingkat konsumsi responden terhadap informasi politik memang berkorelasi signifikan baik dengan partisipasi politik konvensional maupun non konvensional, walaupun

dengan kekuatan hubungan yang lemah. Tingkat konsumsi informasi politik berkorelasi dengan partisipasi politik konvensional dengan tingkat signifikansi 0,003 dan nilai korelasi 0,142. Sedangkan, dengan partisipasi politik non konvensional, tingkat konsumsi informasi politik berkorelasi dengan tingkat signifikansi 0,000 dan kekuatan hubungan 0,172.

Jika kita merinci lagi pada jenis medianya, maka konsumsi informasi politik akan memiliki korelasi paling kuat dengan partisipasi politik pada jenis media surat kabar. Korelasi variabel ini dengan partisipasi politik konvensional adalah sebesar 0,189 (tingkat signifikansi 0,000) dan dengan partisipasi politik non konvensional sebesar 0,14 (tingkat signifikansi 0,003).

4.7. Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Regression Analysis) atas Model Pengaruh Budaya Politik terhadap Partisipasi Politik

Seperti telah dinyatakan pada bagian sebelumnya, variabel-variabel yang memiliki reliabilitas dan validitas secara memadai hanyalah conventional political participation, political trust, dan civic engagement. Juga telah dinyatakan, bahwa dengan memperhitungkan secara teoritis adanya kontribusi dari sejumlah indikator dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik, maka variabel keaktifan dalam mengkonsumsi berita politik di surat kabar dan keaktifan dalam berbincang-bincang mengenai politik dimasukkan pula dalam model analisis.

Atas dasar itu, maka model analisis regresi dikoreksi dari hipotesis semula menjadi rumusan sebagai berikut:

$$y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4$$

Dimana :

y = conventional political participation

x₁ = civic engagement

x₂ = political trust

x₃ = keaktifan dalam mengkonsumsi berita politik di surat kabar

x₄ = keaktifan dalam berbincang-bincang mengenai politik

Dari analisis regresi yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.52 Nilai R Square persamaan regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.377(a)	.142	.133	.5915

Tabel 4.53 Koefisien regresi masing-masing variabel

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.424	.164		2.588	.010
	Political Trust	.051	.036	.067	1.416	.158
	Civic Engagement	.058	.031	.090	1.883	.060
	Keaktifan mengkonsumsi berita politik di surat kabar	.048	.029	.080	1.651	.100
	Keaktifan berdiskusi/ bincang-bincang mengenai politik	.197	.030	.319	6.536	.000

Terlihat, nilai korelasi regresi (adjusted R^2) adalah sebesar 0.133. Artinya, 13.3% dari variasi nilai partisipasi politik dapat dijelaskan dari nilai variabel civic engagement, political trust, keaktifan mengkonsumsi berita politik di surat kabar, dan keaktifan berbincang-bincang mengenai politik.

Terlihat pula, dari temuan tersebut bahwa ternyata hanya variabel keaktifan dalam berdiskusi mengenai politik yang memiliki signifikansi dalam pembentukan nilai partisipasi politik. Sedangkan variabel-variabel lainnya tidak memiliki signifikansi. Meski demikian, sejumlah variabel tersebut tetap memiliki kontribusi terhadap nilai R Square dari persamaan regresi ini secara keseluruhan.

Maka, berdasarkan temuan tersebut, persamaan regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$y = 0.09 x_1 + 0.067 x_2 + 0.08 x_3 + 0.319 x_4 \quad (4.1)$$

BAB 5 INTERPRETASI DATA

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh, dapat diberikan beberapa interpretasi sebagai berikut:

5.1. Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik

5.1.1. *Voting*

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tingkat potensi keikutsertaan warga Jateng dalam pilkada yang akan dilangsungkan (sebagaimana diukur dari pengakuan mereka) adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 96,4%. Artinya, hampir seluruh warga Jateng yang diwawancarai mengaku akan mencoblos dalam pilkada mendatang. Angka partisipasi pemilih yang sangat tinggi ini di sisi lain menyebabkan penyelidikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut menjadi sulit (tidak ada variabel yang dapat disimpulkan berkorelasi dengan partisipasi pemilih karena minimnya variasi nilai partisipasi pemilih itu sendiri).

Dalam memaknai tingginya partisipasi pemilih ini pun, tidak banyak yang dapat diinterpretasikan. Merujuk pada pengakuan responden, keikutsertaan mereka dalam pilkada terutama didorong oleh kesadaran sebagai warga negara, yaitu baik karena merasa sebagai bentuk kewajiban warga negara maupun sebagai hak warga negara. Disamping itu, juga adanya harapan warga akan situasi yang lebih baik dengan dilaksanakannya pilkada. Berdasarkan hal-hal itu, terlihat antusiasme warga untuk berpartisipasi dalam pilkada dapat dianggap sebagai sesuatu yang positif, yang menunjukkan tingginya kesadaran politik untuk berperan serta dalam proses pemerintahan. Artinya, terdapat potensi bagi tumbuhnya budaya politik partisipatif sebagaimana dikehendaki oleh *civic culture*.

Meski demikian, jika kita membandingkannya dengan aspek-aspek rasionalitas pemilih seperti tingkat keaktifan warga dalam mencari informasi politik atau berbincang-bincang mengenai politik, kita menemukan mayoritas responden justru memiliki tingkat keaktifan yang

relatif rendah. Dalam hal konsumsi informasi mengenai politik misalnya, rata-rata responden hanya mengonsumsi berita-berita politik sesekali hingga dua kali dalam sepekan. Sedangkan, dalam hal berbincang-bincang mengenai politik, tingkat keaktifan rata-rata responden lebih rendah lagi, yaitu tidak pernah hingga sesekali saja melakukannya dalam sebulan. Artinya, partisipasi yang mereka lakukan kemungkinan besar bukan didasari oleh pengetahuan atau bahkan minat terhadap persoalan-persoalan politik (seperti yang seharusnya ditunjukkan dengan tingginya tingkat konsumsi informasi politik atau frekuensi berbincang-bincang mengenai politik), melainkan faktor-faktor lain yang belum dapat disimpulkan dengan pasti.

Penjelasan atas tingkat partisipasi pemilih yang tinggi pada warga Jateng, sebaliknya, kemungkinan memiliki kesesuaian dengan penjelasan Saiful Mujani terkait fenomena *naive voters*, yaitu para pemilih dengan kesadaran kognitif rendah, yang berpartisipasi dalam pemilu lebih karena mobilisasi dibandingkan dorongan pertimbangan-pertimbangan kognitif tersebut.

5.1.2. Partisipasi Politik Konvensional (Aktivitas-Aktivitas Politik Terkait Pemilu)

Tidak seperti *voting*, bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional lain terkait pemilu ternyata ditemukan sangat jarang dilakukan warga. Secara rata-rata, tingkat partisipasi politik konvensional responden, yang terdiri atas aksi-aksi seperti ikut berkampanye atau ikut dalam acara-acara yang diadakan partai politik, tercatat hanya bernilai 1,099 atau hampir tidak pernah dilakukan warga.

Hal ini menunjukkan warga cenderung tidak tertarik melakukan kegiatan-kegiatan politik yang aktif dan menggunakan banyak sumber daya (waktu, uang, maupun tenaga) seperti kampanye atau mengikuti kegiatan-kegiatan partai politik lainnya. Warga lebih cenderung bertindak sebagai partisipan yang pasif, yang menggunakan sedikit sumber daya dalam melakukan aktivitas politik melalui *voting* dalam pemilu/ pilkada.

Hal ini juga menunjukkan rendahnya tingkat keterlibatan responden dengan politik, khususnya dengan partai politik. Hal ini dapat disebabkan dua hal. Pertama, faktor yang berasal dari responden sendiri seperti

rendahnya minat responden untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas politik, terutama yang diselenggarakan oleh partai politik. Kedua, faktor yang justru berasal dari partai politik, seperti lemahnya kemampuan partai politik untuk menyediakan saluran partisipasi atau keterlibatan bagi warganya.

5.1.3. Partisipasi Politik Non Konvensional

Dalam hal partisipasi politik non konvensional, nilai tingkat keaktifan warga juga sangat rendah. Bahkan lebih dari 98% responden menyatakan tidak pernah melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti demonstrasi, membuat petisi, atau aksi pemboikotan terhadap produk-produk tertentu.

Bahkan, kegiatan berbincang-bincang mengenai politik, yang dapat dinyatakan sebagai bentuk partisipasi politik yang paling ringan, juga tak banyak dilakukan warga. Sekitar 83% responden menyatakan tidak pernah melakukannya dalam sebulan terakhir.

Temuan di atas menunjukkan bahwa minat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik terkait kepentingan publik sangat rendah. Hal ini juga menunjukkan rendahnya kesadaran politik warga terhadap berbagai isu-isu politik atau kepentingan publik. Menunjukkan pula rendahnya kesediaan warga untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik yang membutuhkan lebih banyak pengorbanan.

5.2. Tingkat Keaktifan Warga dalam Mencari Informasi Politik

Dalam hal keaktifan warga dalam mencari atau mengonsumsi informasi politik, ditemukan rata-rata responden memiliki tingkat konsumsi yang relatif sedang. Frekuensi rata-rata responden dalam mengonsumsi berita politik di media adalah sesekali hingga dua kali dalam sepekan. Hal ini menunjukkan rata-rata warga cukup memiliki minat terhadap persoalan-persoalan politik yang disajikan media.

Bahkan, untuk jenis media televisi, rata-rata warga mengonsumsi berita politik 1 hingga 4 hari dalam sepekan. Tercatat pula, sekitar 47,4% warga mengonsumsi berita-berita politik di televisi setiap harinya. Artinya, pada umumnya warga cukup terinformasikan dengan peristiwa-peristiwa

politik yang terjadi di sekelilingnya, khususnya yang diberitakan oleh media.

Temuan ini juga menunjukkan relatif tingginya frekuensi warga dalam menggunakan televisi. Sehingga, televisi berperan sebagai sumber rujukan utama warga dalam mencari informasi politik.

Lebih jauh, temuan ini juga cukup mempertegas kecenderungan bentuk *mediated political communication* pada masyarakat saat ini. Warga pada hakikatnya terhubung dengan peristiwa-peristiwa politik melalui kacamata media. Media lah pihak yang menyajikan dan memberi penafsiran atas berbagai informasi politik yang diketahui warga. Sehingga pengetahuan politik warga pun banyak diisi oleh informasi politik yang disajikan media. .

Kecenderungan *mediated political communication* ini dapat pula kita dapatkan dengan membandingkan tingkat keaktifan warga dalam mencari informasi politik di media dengan tingkat keaktifan warga dalam mencari informasi politik melalui saluran interpersonal seperti dengan melakukan bincang-bincang politik dengan kerabat, keluarga, atau rekan-rekan mereka. Seperti telah diuraikan, tidak seperti tingkat konsumsi berita politik di media yang relatif sedang hingga tinggi (bergantung jenis medianya), kegiatan bincang-bincang politik ternyata tidak banyak dilakukan warga.

Terlepas dari berbagai hal itu, secara umum, tingkat konsumsi warga yang relatif sedang hingga tinggi atas informasi politik di media ini cukup memberi sinyal positif akan prospek budaya partisipatif warga dalam politik.

5.3. Nilai-Nilai Budaya Politik (*Civic Culture*) Warga

Tidak seperti tingkat partisipasi politik warga yang cenderung rendah, rata-rata nilai *civic culture* yang dimiliki warga (sebagaimana yang diukur oleh beberapa variabel dalam penelitian ini) ternyata cukup tinggi. Hal ini baik pada kelompok nilai-nilai *civic culture* yang terkait dengan nilai-nilai kemasyarakatan maupun pada kelompok nilai-nilai *civic culture* yang terkait dengan komitmen pada nilai-nilai demokrasi.

5.3.1. Civic Engagement

Tingkat keikutsertaan warga dalam kegiatan kemasyarakatan seperti arisan, rapat-rapat RT/ RW, kerja bakti, dan sebagainya ditemukan relatif tinggi. Rata-rata responden mengaku relatif sering mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Sebanyak 21,4% bahkan menyatakan selalu mengikutinya (sebanyak 47,4% menyatakan sering). Hasil ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, mengingat budaya masyarakat Indonesia pada umumnya yang relatif memiliki keakraban sosial yang tinggi.

Tingginya tingkat keakraban sosial ini juga menjadi penanda bagi tingginya budaya partisipatif warga dalam kegiatan-kegiatan terkait kepentingan publik pada tingkat lokal (lingkungan tempat tinggal mereka). Sehingga, hal ini dapat dinilai sebagai modal yang baik bagi warga atas keterlibatannya dalam proses pemerintahan pada fase berikutnya (meskipun penelitian ini juga menemukan keaktifan warga dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ini tidak berlanjut pada bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat politis).

Hal yang tak jauh berbeda ditemukan pada tingkat keterhubungan warga dengan berbagai perkumpulan sosial. Rata-rata warga mengaku tergabung pada 1 hingga 2 buah organisasi kemasyarakatan. 43,8% bahkan menyatakan tergabung pada lebih dari 1 organisasi kemasyarakatan.

Hal ini kembali memperkuat kesimpulan bahwa masyarakat cenderung memiliki tingkat kohesivitas sosial yang tinggi. Rata-rata warga cenderung memiliki keterkaitan dengan sesamanya melalui berbagai organisasi atau perkumpulan sosial.

Hal ini juga menandakan warga terbiasa bekerja sama, bertukar pandangan, atau berbagi tugas dan kewenangan dengan sesama warga lainnya dalam sebuah aktivitas kemasyarakatan sehingga memberikan mereka modal kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses-proses pemerintahan.

5.3.2. Kepercayaan dan Solidaritas Sosial

Hal yang cukup menarik ditemukan untuk tingkat kepercayaan dan solidaritas sosial warga. Pada kedua indikator ini, ternyata terdapat perbedaan nilai yang cukup mencolok.

Dalam hal solidaritas sosial, rata-rata warga mengaku tidak percaya bahwa kebanyakan orang tidak memiliki kesediaan untuk membantu orang lain dan hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Atau dengan kata lain, rata-rata warga tidak percaya bahwa orang kebanyakan memiliki sikap egois. Tercatat sebanyak 78,6% responden menyatakan ketidaksetujuan ini. Artinya, dapat kita tafsirkan sebagian besar warga masih percaya bahwa solidaritas sosial itu masih hidup di tengah masyarakat.

Namun, menariknya, hal yang sebaliknya ditemukan untuk tingkat kepercayaan warga terhadap sesamanya. 61,5% warga mengaku tidak setuju dengan pernyataan bahwa pada umumnya orang dapat dipercaya. Artinya, rata-rata warga masih menyimpan kecurigaan terhadap niat baik warga lainnya. Hal ini juga menunjukkan adanya sikap hati-hati warga terhadap warga lainnya sehingga tidak mudah memberikan kepercayaan kepada sembarang orang.

Dalam kaitannya dengan budaya partisipatif warga, campuran sikap ini memunculkan adanya kombinasi antara kehati-hatian warga dengan dorongan untuk melakukan aksi-aksi solidaritas terhadap sesamanya. Komposisi ini dapat berbuah positif jika tingkat kehati-hatian itu tidak sampai menghambat partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial terkait kepentingan publik (ada dorongan lebih kuat untuk menunjukkan rasa solidaritas). Namun, ia dapat juga berbuah negatif jika rasa ketidakpercayaan tersebut justru mendominasi dan menghalangi niat warga untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

5.3.3. Political Tolerance

Untuk tingkat toleransi politik, rata-rata warga memiliki rasa toleransi yang relatif tinggi. Sebanyak 66,8% responden mengaku tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka cenderung tidak nyaman berbincang-bincang dengan orang lain yang memiliki pandangan politik berbeda.

Artinya, sebagian besar warga merasa tidak masalah untuk berinteraksi dengan warga lain yang memiliki pandangan politik berbeda.

Hal ini menunjukkan warga pada umumnya tidak merasa terganggu dengan kehadiran orang lain dengan pandangan politik berbeda. Sehingga, dapat kita katakan warga juga memiliki tingkat penerimaan terhadap kondisi pluralitas (kemajemukan) masyarakat secara cukup baik.

Rasa toleransi yang relatif tinggi terhadap pluralitas ini memberikan modal bagi warga untuk berpartisipasi dalam demokrasi, yang salah satu diantaranya mensyaratkan kesiapan untuk *co-existence* atau berdampingan dengan orang lain/ kelompok yang memiliki berbagai ragam nilai dan pandangan politik.

5.3.4. Political Equality

Untuk variabel *political equality*, yang diukur dengan persepsi warga tentang kesetaraan kemampuan seseorang dalam memimpin, ditemukan hasil yang relatif moderat. Indikatornya sendiri digunakan dua pertanyaan, yaitu persepsi warga terhadap kesetaraan kemampuan memimpin militer-sipil dan persepsi warga terhadap kesetaraan kemampuan tua-muda. Indikator ini sendiri digunakan karena dikotomi kapasitas militer-sipil dan tua-muda dinilai sebagai persoalan-persoalan terkait kesetaraan politik yang cukup menonjol pada masyarakat Indonesia saat ini.

Warga terbagi dalam dua kelompok yang relatif sama besar untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan kemampuan militer-sipil, sebanyak 51,8% warga menyatakan setuju militer lebih baik memimpin dibandingkan sipil, sedangkan sisanya menyatakan tidak setuju. Sedangkan, untuk pertanyaan kemampuan tua-muda, justru 55,1% warga menyatakan tidak setuju sosok yang lebih tua lebih baik memimpin dibandingkan dengan sosok yang lebih muda, dan sisanya menyatakan setuju.

Temuan ini menunjukkan pergulatan persepsi tentang kesetaraan kemampuan memimpin masih terus berlangsung di masyarakat. Peninggalan budaya politik lama seperti supremasi kemampuan militer atas sipil atau pengalaman memimpin sosok yang lebih senior atas sosok juniornya, masih dipegang oleh sekitar separuh warga masyarakat. Hal ini

tentunya cukup dapat dipahami, mengingat pengalaman masyarakat yang cukup lama berada di bawah kepemimpinan Orde Baru yang otoriter dan militeristik. Di sisi lain, tumbuhnya secara seimbang kelompok masyarakat yang mengadopsi ide baru tentang kesetaraan politik justru merupakan pencapaian yang cukup menggembirakan.

5.3.5. Dukungan terhadap Perubahan secara Bertahap

Dalam studi yang dilakukan Edward Muller dan Mitchell Selligson pada tahun 1994 tentang hubungan *civic culture* dengan keberlangsungan demokrasi, variabel dukungan terhadap perubahan bertahap ini ditemukan sebagai satu-satunya variabel yang mempengaruhi panjang atau pendeknya usia demokrasi suatu negara. Artinya, prospek kelanggengan demokrasi di suatu negara dapat dilihat salah satunya dari variabel ini. Kita tentu masih sulit membuktikan hal ini untuk konteks Indonesia. Namun pengukuran terhadap variabel ini setidaknya dapat memberi gambaran umum tentang prospek demokratisasi di Indonesia.

Ditemukan, rata-rata tingkat dukungan warga terhadap perubahan secara bertahap adalah tinggi. Sejumlah 91,2% warga bahkan menyatakan kesetujuan untuk mendukung perubahan yang dilakukan secara bertahap melalui proses politik yang telah ditentukan seperti pemilu. Sementara, sebaliknya, 76,4% responden menyatakan tidak setuju atau menolak mendukung dilakukannya perubahan secara revolusioner seperti misalnya dengan mengganti orang-orang yang duduk di pemerintahan secara total.

Dukungan warga terhadap perubahan bertahap memperlihatkan sikap politik mayoritas masyarakat yang relatif moderat dan berada di pertengahan. Melalui variabel ini, masyarakat juga memperlihatkan kecenderungannya terhadap perubahan-perubahan secara damai berdasarkan prosedur politik yang telah ditetapkan.

Sehingga, dengan demikian, kecenderungan warga yang sangat tinggi untuk mendukung perubahan secara bertahap ini juga menunjukkan dukungan warga yang kuat terhadap berlangsungnya sistem demokrasi di Indonesia.

5.3.6. Kepercayaan terhadap Politik (*Political Trust*)

Untuk tingkat kepercayaan terhadap institusi-institusi politik, rata-rata responden memberikan rasa kepercayaan yang cukup tinggi. Namun, untuk kategori partai politik, tingkat kepercayaan warga cukup jauh di bawah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah daerah maupun terhadap pemilu/ pilkada sebagai proses politik pembawa perubahan.

52,9% warga menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap kinerja partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini menunjukkan lemahnya kredibilitas partai politik di mata masyarakat. Kenyataan ini cukup memprihatinkan, mengingat partai politik sebenarnya memainkan fungsi input dalam sistem politik, yang berfungsi pula sebagai saluran partisipasi politik bagi warga. Sehingga, lemahnya kredibilitas partai politik di mata masyarakat dapat menghambat partisipasi politik yang dapat dilakukan warga.

Sementara, sebaliknya, 76,7% warga menyatakan percaya dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam bekerja untuk rakyat. Hal ini menunjukkan dukungan masyarakat yang kuat terhadap pihak eksekutif penyelenggara pemerintahan. Dalam perspektif tipologi budaya politik Gabriel Almond dan Sidney Verba, hal ini juga menandakan kecenderungan budaya politik warga yang bercirikan subyek, yaitu orientasi yang dominan terhadap objek-objek output politik seperti eksekusi kebijakan dan aparat pelaksanaannya (dalam hal ini pemerintah daerah). Bagaimanapun, kecenderungan budaya subyek ini menyimpan pula potensi dukungan terhadap pemerintahan yang kuat atau dominan pada sisi eksekutif.

Sedangkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pilkada (sebagai proses politik yang dapat membawa perbaikan) yang cukup tinggi, yaitu 76,4% responden menyatakan percaya, menunjukkan dukungan warga terhadap sistem politik masih baik. Rata-rata warga masih menaruh harapan akan terjadinya perbaikan melalui proses pemilu atau pilkada. Sehingga, hal ini menunjukkan dukungan warga terhadap berlangsungnya proses-proses demokrasi dalam memperbaiki atau memperbaiki jalannya pemerintahan.

5.3.7. Rasa Percaya Diri terhadap Peran Warga dalam Politik (*Political Efficacy*)

Untuk kepercayaan diri warga akan efektivitas perannya dalam politik, sikap responden terdistribusi secara cukup merata. Secara rata-rata, sikap responden berada di pertengahan, yaitu antara cukup mempercayai dan kurang mempercayai efektivitas perannya.

Dalam kategori *internal efficacy* atau peran diri warga dalam mempengaruhi politik, sikap responden terbagi hampir rata dari spektrum yang sangat tidak mempercayai hingga yang sangat mempercayai. Namun, mayoritas responden (26%) menyatakan perannya ada pengaruhnya walau sedikit. Secara rata-rata, tingkat kepercayaan responden berada pada titik tengah, yaitu kadang mempercayai dan kadang tidak mempercayai.

Sedangkan untuk kategori *external efficacy* atau kepercayaan terhadap responsivitas sistem politik terhadap peran yang dilakukan warga, tingkat kepercayaan yang diberikan cenderung rendah. Sebagian besar responden (32%) memang mengambil jawaban tengah yaitu bahwa aspirasi mereka kadang didengarkan kadang tidak. Namun, hanya sedikit di bawah itu, 30,6% responden menyatakan sedikit saja aspirasi mereka yang direspon atau didengarkan oleh institusi-institusi politik.

Dengan sikap warga yang cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri sedang hingga rendah atas efektivitas perannya dalam politik tersebut, prospek partisipasi warga dalam politik juga masih belum jelas benar. Dorongan untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, sebagaimana terwakili dengan rasa kepercayaan atau rasa ketidakpercayaan akan perannya dalam mempengaruhi politik, melakukan tarik menarik secara relatif sama kuat. Kecenderungan untuk munculnya partisipasi yang lebih aktif atau sebaliknya dorongan untuk bersikap lebih pasif dalam politik masih memiliki peluang yang relatif sama (jika diukur berdasarkan variabel ini).

5.4. Hubungan antara Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik dengan Nilai-Nilai Budaya Politik Warga

5.4.1. Hubungan Partisipasi Politik dengan Keterikatan Warga pada Nilai-Nilai Kemasyarakatan

Berdasarkan uji korelasi yang dilakukan, secara umum tidak terlalu ditemukan hubungan antara partisipasi politik dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang dimiliki warga. Hanya beberapa nilai kemasyarakatan yang memiliki korelasi dengan beberapa bentuk partisipasi politik.

Untuk partisipasi politik konvensional, atau bentuk-bentuk keikutsertaan warga dalam kegiatan kepartaian/ pemilu, ditemukan hanya variabel civic engagement yang memiliki korelasi signifikan. Kekuatan hubungannya juga lemah, yaitu hanya 0,185, namun dengan tingkat signifikansi 0,000 (sangat signifikan).

Keterkaitan kedua variabel ini cukup dapat dipahami. Keduanya sama-sama terkait dengan ketertarikan warga terhadap persoalan-persoalan publik dan untuk aktif berserikat serta memiliki ikatan hubungan dengan warga masyarakat lainnya. Pada partisipasi politik konvensional, warga dituntut untuk memiliki rasa keterikatan/ afiliasi dengan partai politik tertentu. Sedangkan, pada civic engagement, warga dituntut untuk memiliki rasa keterikatan dengan anggota-anggota dari suatu perkumpulan sosial tertentu.

Variabel civic engagement ternyata juga ditemukan berkorelasi signifikan dengan partisipasi politik non konvensional. Kekuatan hubungan diantara keduanya juga lemah, tapi lebih baik dibandingkan dengan kekuatan hubungan pada partisipasi politik konvensional, yaitu sebesar 0,209 (dengan tingkat signifikansi 0,000). Kemungkinan penjelasan atas adanya hubungan ini, juga tak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Warga yang aktif tergabung dalam berbagai perkumpulan sosial (memiliki tingkat civic engagement yang tinggi), juga cenderung aktif berserikat melakukan advokasi atas kepentingan publik tertentu melalui demonstrasi, penandatanganan petisi, dan sebagainya (bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional).

5.4.2. Hubungan Partisipasi Politik dengan Komitmen Warga terhadap Nilai-Nilai Demokrasi

Untuk nilai-nilai demokrasi, ternyata hanya variabel *political efficacy* (rasa percaya diri warga terhadap efektivitas perannya dalam politik) yang memiliki korelasi dengan partisipasi politik. Sedangkan, nilai-nilai demokrasi lainnya tidak memiliki korelasi secara signifikan. Hasil ini cukup di luar perkiraan peneliti, karena sebelumnya nilai-nilai demokrasi yang memiliki kaitan dengan tingkat dukungan seseorang terhadap sistem demokrasi diasumsikan memiliki korelasi dengan partisipasi politik yang juga merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap sistem demokrasi. Temuan ini dengan demikian menunjukkan secara umum nilai-nilai demokrasi yang dipegang seseorang tidak mempengaruhi keaktifan partisipasi politiknya. Artinya, seseorang yang menganut beberapa nilai demokrasi tertentu belum tentu memiliki tingkat keaktifan dalam politik. Demikian pula, seseorang yang memiliki tingkat keaktifan politik yang tinggi belum tentu berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi tertentu.

Seperti telah disebutkan, partisipasi politik nyatanya hanya berkorelasi dengan variabel *political efficacy*. Dengan partisipasi politik konvensional, *political efficacy* berhubungan secara lemah (kekuatan hubungan 0,116) dengan tingkat signifikansi 0,021. Selanjutnya, dengan partisipasi politik non konvensional, *political efficacy* juga berhubungan secara lemah (kekuatan hubungan 0,124) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014.

Penjelasan atas korelasi *political efficacy* dengan kedua bentuk partisipasi politik ini secara cukup mudah dapat dipahami adalah karena rasa percaya diri terhadap peran seseorang dalam politik akan mendorong orang tersebut untuk berpartisipasi dalam politik. Seseorang yang yakin dengan dampak dari perannya dalam politik, akan cenderung terdorong untuk ikut dalam berbagai aktivitas politik, baik yang konvensional seperti bergabung dengan partai politik maupun yang non konvensional seperti melakukan berbagai advokasi kepentingan publik.

Meskipun, di sisi lain, sebenarnya juga dapat diajukan kemungkinan sebaliknya, yaitu bahwa keaktifan seseorang dalam politik, seperti misalnya aktif mengikuti kegiatan kepartaian atau melakukan aksi-aksi

advokasi kepentingan publik, cenderung meningkatkan rasa percaya diri seseorang akan perannya dalam politik.

5.5. Hubungan antara Tingkat Keaktifan Warga dalam Mencari Informasi Politik dengan Tingkat Keaktifan Warga dalam Politik

Seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, tingkat keaktifan warga dalam mencari/ mengkonsumsi informasi politik berhubungan secara signifikan dengan tingkat keaktifannya dalam politik. Yang sedikit di luar perkiraan justru adalah lemahnya hubungan ini. Keaktifan warga dalam mengkonsumsi informasi politik berhubungan dengan partisipasi politik konvensional dengan kekuatan hubungan 0,142 dan tingkat signifikansi 0,003. Sedangkan, dengan partisipasi politik non konvensional, tingkat keaktifan warga dalam mengkonsumsi informasi politik berhubungan dengan kekuatan hubungan 0,172 dan tingkat signifikansi 0,000.

Sementara, dengan *voting*, tidak dapat dilakukan uji karena distribusi data yang tidak normal. Tidak dapat ditemukan perbedaan antara kelompok yang menyatakan akan melakukan *voting* dengan yang tidak akan melakukan *voting* dalam hal tingkat konsumsinya terhadap berita politik.

Berkorelasinya tingkat keaktifan warga dalam mencari/mengkonsumsi informasi politik dengan tingkat partisipasi politik konvensional maupun non konvensional yang dilakukannya secara cukup jelas adalah karena variabel-variabel ini sama-sama menunjukkan tingkat keterikatan seseorang terhadap politik. Konsumsi atas informasi politik dapat dikatakan merupakan bentuk aktivitas politik yang paling ringan, namun pada gilirannya memperkuat kapasitas atau kemampuannya untuk melakukan tindakan-tindakan politik lainnya. Informasi politik yang dikonsumsi seseorang dari media akan memberikan bekal pengetahuan dan dorongan motivasi bagi seseorang tersebut untuk mengambil bentuk-bentuk partisipasi lain yang lebih nyata dalam politik.

Seperti dinyatakan Virginia Sapiro, aktivitas seseorang untuk membuat dirinya sendiri mengerti dan mengetahui politik (melalui konsumsi atas informasi politik) merupakan tahap penting dari rangkaian proses keterlibatan seseorang dalam politik. Bahkan, tindakan mencari informasi politik sendiri sudah merupakan tindakan politik yang penting,

terutama jika hal ini dilakukan pada situasi dimana akses terhadap informasi dibatasi.

Meski demikian, di sisi lain, terdapat juga kemungkinan sebaliknya, yaitu bahwa keaktifan seseorang dalam politik akan mendorong seseorang tersebut untuk mengikuti perkembangan berita-berita politik di media.

5.6. Analisis Regresi Linear Berganda terhadap Model pengaruh Budaya Politik terhadap Partisipasi Politik

Berdasarkan uji regresi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel-variabel civic engagement, political trust, keaktifan mengkonsumsi berita politik di surat kabar, dan keaktifan berbincang-bincang mengenai persoalan politik berkontribusi terhadap pembentukan nilai variabel partisipasi politik konvensional. Namun, gabungan variabel-variabel ini hanya berkontribusi sebesar 13.3% terhadap pembentukan nilai partisipasi politik. Selain itu, beberapa variabel tersebut pun ditemukan tidak signifikan. Hanya variabel keaktifan berbincang-bincang mengenai politik yang memiliki tingkat signifikansi baik yaitu 0.000.

Hasil ini di luar perkiraan sebelumnya, yang mengasumsikan variabel-variabel tersebut akan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan nilai partisipasi politik. Variabel political trust misalnya, pada awalnya diasumsikan akan secara kuat dan signifikan mempengaruhi partisipasi politik karena ia memberikan seorang responden alasan untuk beraktivitas dalam politik (yaitu bahwa sistem politik masih dapat diharapkan membawa perubahan).

Demikian juga variabel keaktifan mengikuti berita-berita politik di surat kabar. Variabel ini awalnya diduga memiliki kontribusi signifikan karena diasumsikan berperan memperkuat pengetahuan seseorang tentang politik sehingga pada gilirannya akan mendorong seseorang tersebut untuk berpartisipasi dalam politik. Sedangkan untuk civic engagement, diasumsikan memiliki kontribusi terhadap partisipasi politik karena ketertarikan dan keaktifan seseorang dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan diasumsikan akan mendorongnya pula untuk juga memiliki perhatian dan berpartisipasi dalam persoalan-persoalan politik.

Sementara itu, keaktifan mengikuti berita politik di surat kabar diasumsikan akan memberikan pengetahuan politik kepada seseorang yang pada gilirannya akan mendorong seseorang tersebut untuk berpartisipasi dalam politik.

Nyatanya, seperti telah diungkapkan, variabel-variabel itu tidak memiliki pengaruh yang kuat dan cukup signifikan. Meskipun, kontribusi variabel-variabel tersebut juga bukan sama sekali tidak ada (sebagaimana terlihat dari menguatnya secara tipis angka R square akibat penambahan variabel-variabel ini di dalam persamaan).

Variabel yang memiliki kontribusi cukup signifikan justru adalah keaktifan berdiskusi atau berbincang-bincang mengenai politik. Hubungan variabel ini terhadap partisipasi politik kemungkinan besar karena variabel ini sesungguhnya menunjukkan tingkat ketertarikan seseorang terhadap politik. Minat seseorang terhadap politik ini kemudian mendorong seseorang tersebut untuk berpartisipasi dalam politik.

Dengan demikian, peran variabel ini telah bergeser pula dari peran awal yang didesain dalam penelitian yaitu sebagai salah satu indikator partisipasi politik unconventional. Variabel ini ternyata ditemukan dapat berperan menjadi variabel yang menjelaskan tingkat partisipasi politik konvensional seseorang.

Terlepas dari itu, lemahnya kontribusi variabel-variabel ini terhadap pembentukan nilai partisipasi politik seseorang memang tak dapat dipungkiri memunculkan pertanyaan tentang keabsahan desain teori yang digunakan dalam penelitian. Namun, sebelum penilaian tersebut dijatuhkan, perlu dicatat bahwa distribusi nilai indikator-indikator partisipasi politik yang digunakan dalam penelitian ini memang sangat timpang. Hal ini menyebabkan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang berkontribusi terhadap pembentukan angka partisipasi politik tersebut menjadi sulit. Tidak cukup banyak tersedia variasi data untuk melihat terjadinya hubungan-hubungan itu secara jelas. Karena itulah, cukup wajar jika nilai dari hubungan-hubungan itu tidak signifikan.

Hal lainnya, angka R square yang rendah juga menunjukkan bahwa variabel-variabel ini saja tak cukup untuk memprediksi angka partisipasi politik secara lebih utuh. Dibutuhkan variabel-variabel lain yang memiliki

kontribusi signifikan terhadap pembentukan partisipasi politik untuk dapat memperbesar daya prediksi terhadap angka partisipasi politik tersebut.

BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan dan Saran

Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, sejumlah nilai *civic culture*, baik itu kelompok nilai-nilai yang terkait dengan keterikatan seseorang pada nilai-nilai sosial kemasyarakatan seperti *civic engagement*, *interpersonal trust*, dan *solidarity* maupun kelompok nilai-nilai yang terkait dengan keterikatan seseorang pada nilai-nilai demokrasi seperti *political tolerance*, *political equality*, *support for gradual reform*, *political trust*, dan *political efficacy* ternyata **tidak banyak berkorelasi dengan tingkat partisipasi politik** warga. Berdasarkan **analisis bivariate correlations** yang dilakukan, **hanya variabel *civic engagement* dan *political efficacy*** yang secara nyata berkorelasi dengan tingkat partisipasi politik seseorang.

Korelasi variabel *civic engagement* dengan partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai akibat keterkaitan keduanya pada minat dan keaktifan seseorang berpartisipasi dalam berbagai persoalan publik. Sementara variabel *political efficacy* berkorelasi dengan partisipasi politik karena rasa percaya diri warga terhadap efektivitas perannya dalam politik (*political efficacy*) akan mendorongnya untuk berpartisipasi dalam politik.

Temuan yang tidak banyak berbeda juga diperoleh dari analisis regresi atas model pengaruh nilai-nilai *civic culture* terhadap tingkat partisipasi politik. **Analisis regresi** menemukan bahwa **hanya variabel *civic engagement*, *political trust*, keaktifan berbincang-bincang mengenai politik, dan keaktifan dalam mengikuti berita politik di surat kabar yang memiliki kontribusi terhadap pembentukan nilai partisipasi politik**. Sebesar 13.3% variasi nilai partisipasi politik dapat diprediksi oleh nilai dari variabel-variabel ini. Dari sejumlah variabel itu pun, hanya variabel keaktifan berbincang-bincang mengenai politik yang memiliki kontribusi signifikan. Yang juga cukup di luar dugaan adalah tidak signifikannya kontribusi *political efficacy* terhadap pembentukan nilai partisipasi politik, meskipun keduanya berkorelasi.

Kontribusi signifikan variabel keaktifan berbincang-bincang mengenai politik diduga dapat dijelaskan berdasarkan asumsi bahwa variabel ini menunjukkan

minat atau ketertarikan seseorang terhadap politik. Minat terhadap persoalan-persoalan politik ini yang pada gilirannya mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam politik.

Temuan-temuan di atas pada akhirnya menunjukkan bahwa keterkaitan variabel-variabel civic culture terhadap partisipasi politik pada warga Jawa Tengah cenderung lemah, samar, dan bahkan hampir tak ada sama sekali. Sehingga, hal ini **bertolak belakang dengan tesis warga negara demokratis** dari Gabriel Almond dan Sidney Verba yang mengaitkan keaktifan warga negara dalam politik dengan dukungan nilai-nilai *civic culture* yang mereka miliki.

Almond dan Verba, sebelumnya menyatakan bahwa warga negara yang aktif, rasional, sekaligus berpengetahuan merupakan ciri dari warga negara demokratis yang dapat menyokong keberlangsungan sebuah pemerintahan demokratis. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi politik yang dilakukan warga didasari atas keterinformasian, rasionalitas, dan analisis. Nyatanya, penelitian ini menemukan variabel partisipasi politik tidak banyak dipengaruhi oleh keaktifan warga dalam mengkonsumsi berita-berita politik di media, sebagai salah satu ukuran tingkat rasionalitas warga dalam berpartisipasi.

Temuan ini juga tidak sesuai dengan teori Almond dan Verba bahwa warga negara yang penuh percaya diri (memiliki *political efficacy* tinggi) lebih cenderung menjadi warga negara yang aktif mengikuti politik, membicarakan politik, dan menjadi partisipan yang lebih aktif. Penelitian ini justru menemukan bahwa *political efficacy* tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan nilai partisipasi politik.

Dalam teorinya, mereka menyatakan bahwa warga negara yang memiliki *political efficacy* tinggi akan lebih mungkin untuk merasa puas dengan peranannya sebagai seorang partisipan, cenderung menyenangi penampilan sistem politiknya serta mempunyai orientasi yang umumnya lebih positif terhadapnya. Karena itu mereka menyatakan warga negara yang penuh percaya diri lebih cenderung menyatakan akrab dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem demokrasi. Dengan temuan penelitian ini, setidaknya untuk konteks warga Jawa Tengah yang menjadi kasus dari penelitian ini, tesis tentang Almond dan Verba itu belum terbukti.

Dengan kata lain, jika kita merujuk pada pendapat Almond dan Verba, hal ini dapat mengindikasikan tidak benar-benar kongruennya budaya politik masyarakat setempat dengan sistem pemerintahan yang berlangsung.

Meski demikian, di sisi lain, sedikitnya variabel nilai-nilai civic culture yang berkorelasi signifikan ataupun memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan nilai partisipasi politik di atas dapat dinyatakan sangat besar kemungkinan disebabkan distribusi nilai pada variabel-variabel partisipasi politik yang sangat timpang. Voting memiliki total jawaban "ya" yang sangat tinggi (mencapai 96%), sementara bentuk-bentuk partisipasi politik lain, baik conventional maupun non conventional (seperti mengikuti kampanye, menghadiri pertemuan-pertemuan partai politik, melakukan advokasi kepentingan publik, atau melakukan pemboikotan terhadap produk-produk tertentu) justru memiliki total jawaban "tidak" yang sangat tinggi (atas pertanyaan-pertanyaan itu rata-rata 90%-95% responden memilih jawaban "tidak pernah melakukannya").

Ketimpangan ini menyebabkan penyelidikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik juga menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, seperti ditemukan dalam penelitian, sejumlah variabel civic culture yang secara teoritis diasumsikan akan memiliki korelasi dan pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik justru tidak memberi hubungan yang signifikan. Beberapa variabel nilai civic culture yang memiliki korelasi dan kontribusi signifikan pun hanya mencatatkan angka korelasi atau kontribusi yang kecil (lemah) saja.

Tentu saja, hal ini di sisi lain juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidaktepatan desain teori yang digunakan dalam penelitian ini. Namun, peneliti lebih cenderung menganalisisnya sebagai akibat kegagalan penelitian dalam menangkap keseluruhan ragam bentuk partisipasi politik yang dilakukan warga sesuai dengan konteks budaya setempat. Ukuran-ukuran partisipasi politik yang digunakan dalam penelitian ini, yang merujuk pada bentuk-bentuk partisipasi politik warga negara di negara-negara Barat, ternyata tidak cukup sesuai untuk konteks masyarakat Indonesia, atau secara lebih khusus masyarakat Jawa Tengah yang diteliti dalam penelitian ini.

Untuk itu, dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan indikator-indikator partisipasi politik yang lebih sesuai, lebih realistis, dan lebih lazim dilakukan oleh warga setempat sehingga variabel-variabel yang mempengaruhinya juga dapat diselidiki lebih akurat. Disarankan pula, penelitian

selanjutnya memasukkan variabel-variabel civic culture lain mengingat kontribusi dari variabel-variabel civic culture yang digunakan dalam penelitian ini tak cukup kuat dalam membentuk nilai partisipasi politik sebagaimana diharapkan.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Seperti telah dinyatakan di atas, keterbatasan utama dari penelitian ini adalah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi politik ternyata tidak cukup dapat menangkap keseluruhan ragam atau spektrum partisipasi politik yang dilakukan warga. Akibatnya, diperoleh data ekstrem berupa sangat kecilnya keterlibatan warga dalam tindakan-tindakan politik yang ditanyakan dalam kuesioner dan digunakan sebagai indikator partisipasi politik. Ketimpangan data ini pada akhirnya menyebabkan kesulitan dalam menemukan korelasi maupun kontribusi dari variabel-variabel civic culture maupun keaktifan mengkonsumsi informasi politik terhadap partisipasi politik.

Keterbatasan lainnya yang perlu menjadi catatan penting dalam penelitian ini adalah ternyata beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur civic culture dan tingkat konsumsi informasi politik tidak cukup reliabel berdasarkan uji statistik (nilai cronbach alpha di bawah 0.5). Jawaban yang diberikan responden terhadap beberapa pertanyaan tidak cukup konsisten padahal pertanyaan-pertanyaan tersebut mengukur konsep yang sama. Hal ini besar kemungkinannya disebabkan responden tidak memiliki pemahaman yang konsisten atas masing-masing pertanyaan tersebut. Diakui, terdapat beberapa pertanyaan yang memiliki pilihan jawaban cukup interpretatif, seperti misalnya pertanyaan tentang tingkat konsumsi responden dalam mengkonsumsi informasi politik. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu berapa kali mereka mengikuti pemberitaan politik di surat kabar, tv, atau radio dalam sepekan, yang merujuk pada pertanyaan serupa yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya, ternyata tidak cukup mendapat jawaban yang konsisten dari responden. Demikian juga halnya untuk beberapa indikator nilai civic culture seperti dukungan terhadap perubahan secara bertahap (support for gradual reform) dan political equality.

6.3. Implikasi Teoritis dan Studi Lebih Lanjut

Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian tentang pengaruh civic culture terhadap partisipasi politik masih membutuhkan banyak elaborasi dan studi lebih lanjut. Tesis tentang paket perilaku warga negara yang demokratis seperti yang dinyatakan Almond dan Verba sebagai "rational-activist model", dimana warga negara dengan keterikatan kuat pada nilai-nilai demokratis akan memiliki dorongan untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan politik ternyata ditemukan belum terbukti untuk penelitian ini. Sehingga model warga negara yang demokratis itu pun masih menjadi kondisi ideal yang diharapkan.

Di lain pihak, bagi disiplin komunikasi politik, penelitian ini hendak memicu dilakukannya studi lebih lanjut tentang aspek-aspek komunikatif dari nilai-nilai civic culture. Seperti dikatakan Almond dan Verba, bahwa civic culture yang mereka rumuskan sesungguhnya adalah "*substantial consensus on the legitimacy of political institutions and the direction and the content of public policy, a widespread tolerance of a plurality of interest and belief in their reconcilability, and a widely distributed sense of political competence and mutual trust in citizenry*". Civic culture adalah bentuk budaya politik yang menekankan pada perilaku persuasif, kesediaan hidup dalam situasi masyarakat yang majemuk, kemampuan membuat konsensus, dan mendasarkan sikapnya pada argumentasi yang rasional. Hal-hal ini merupakan aspek-aspek perilaku komunikatif. Karena itulah, pendalaman terhadap aspek-aspek perilaku komunikatif ini dan hubungannya dalam pembangunan budaya politik demokratis merupakan topik yang cukup layak mendapat perhatian dalam kajian-kajian komunikasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. & Verba, S. (1984). *Budaya politik: tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara* (Sahat Simamora, Trans.). Jakarta: Bina Aksara.
- Almond, Gabriel (n.d.). *The civic culture: prehistory, retrospect, and prospect*. 22 Mei 2008. <http://repositories.cdlib.org/csd/96-01>,
- Asher, Herbert (2004). *Polling and the public: what every citizen should know*. Washington: CQ Press.
- Brady, Henry et. al. (1995). Beyond SES: a resource model of political participation. *American Political Science Review*, 89, 271-290.
- Carmines, Edward G. et. al. (1996). Political behavior: an overview. *A New Handbook of Political Science*. New York: Oxford University Press.
- Carpini, Michael X. Delli (2004). Mediating democratic engagement: the impact of communications on citizens involvement in political and civic life. *Handbook of Political Communication Research*. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Chilton, Stephen (1988). Defining political culture. *Political Research Quarterly*, 41, 419-445.
- Conway, Margaret (2000). *Political participation in the United States*. Washington: CQ Press.
- Cottam, Martha et. al. (2004). *Introduction to political psychology*. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Dalton, Russel J. et. al. (1993). The not so simple act of voting. *Political Science: the State of the Discipline*.
- Evans, Jocelyn A. J. (2004). *Voters and voting: an introduction*. London: Sage Publications.

- Fazio, Russel H. et. al. (2005). Acting as we feel: when and how attitudes guide behavior dalam *Persuasion: Psychological Insights and Perspectives*. California: Sage Publications.
- Hasan, Iqbal (2006). Analisis data penelitian dengan statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huggins, Richard (2001). *New media and politics*. London: Sage Publications.
- Muller, E. & Seligson, M. (1994). Civic culture and democracy: the question of causal relationship. *American Political Science Review*, 88, 635-652.
- Neuman, Lawrence W. (2003). *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*. United States: Pearson Education Inc.
- Ogris, G. & Westphal, S. (2006). Indicators on active citizenship: the political domain. SORA Institute for Social Research and Analysis.
- Ott, R. Lyman (1992). *Statistics: a tool for the social sciences*. California: Duxbury Press.
- Pennings, Paul et. al. (1999). *Doing research in political science*. Sage Publications.
- Rice, T. & Feldman, J. (1997). Civic culture and democracy: from Europe to America. *Journal of Politics*, 59, 1143-1171.
- Schudson, Michael (2001). Politics as cultural practice. *Political Communication*, 421-431
- Ranney, Austin (1987). *Governing: an introduction to political science*. New Jersey: Prentice Hall.
- Robnett, Belinda (2007). Does collective identity matter?: African-American conventional and unconventional political participation. *Center for The Study for Democracy*. <http://repositories.cdlib.org/csd/07-05>

- Rush, M. & Althoff, P. (2002). Pengantar Sosiologi Politik (Dr. Kartini Kartono, Trans.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sapiro, Virginia (1996, Oktober). Toward a history of political action in the United States. Paper presented at the annual meeting of Social Science History Association, New Orleans.
- Timpone, Richard (1998). Structure, Behavior, and Voter Turnout in the United States. *American Political Science Review*, 92, 145-294.
- Tim Peneliti Indonesian Institute for Civil Society (2003). *Civil society & demokrasi: survey tentang partisipasi sosial politik warga Jakarta*. Jakarta: INCIS.
- Verba, Sidney et.al. (1978). *Participation and political equality : a seven nations comparison*. New York: Cambridge University Press.
- Verba, Sidney et.al. (1993). Citizen activity: who participates? What do they say? *American Political Science Review*, 87, 303-318.
- Verba, Sidney et. al. (1995). *Voice and equality: civic voluntarism in American politics*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Walters, William (2002). Social capital and political sociology: re-imagining politics? *Sociology*, 36, 377-397.
- Watts, Meredith (1990). Orientations toward conventional and unconventional participation among West German youth. *Comparative Political Studies*, 23, 283-313.

Lampiran 1
Daftar responden penelitian

No	Nama Responden	Jenis Kelamin	Desa/Kota	Nama Desa/ Kelurahan	Usia	Agama	Hub Rspndn dgn KK
1	RAMBAT	Laki-laki	Kota	BANJARAN	70	Islam	KK
2	PARSIH	Perempuan	Kota	BANJARAN	38	Islam	ISTRI
3	SUKERI	Laki-laki	Kota	BANJARAN	52	Islam	KK
4	ARSUMI	Perempuan	Kota	BANJARAN	54	Islam	KK
5	CARILIN	Laki-laki	Kota	BANJARAN	40	Islam	KK
6	MAERMI	Perempuan	Kota	BANJARAN	31	Islam	ISTRI
7	SHOLEH	Laki-laki	Kota	BANJARAN	58	Islam	KK
8	KARTUMI	Perempuan	Kota	BANJARAN	54	Islam	ISTRI
9	TAKRI	Laki-laki	Kota	BANJARAN	60	Islam	KK
10	JARIYAH	Perempuan	Kota	BANJARAN	75	Islam	KK
11	SUHARDJO	Laki-laki	Kota	MIJEN	66	Islam	KK
12	HASANAH	Perempuan	Kota	MIJEN	41	Islam	ISTRI
13	SAGIRI SUDARTO	Laki-laki	Kota	MIJEN	59	Islam	KK
14	WARSINI	Perempuan	Kota	MIJEN	74	Islam	ISTRI
15	BUSRI	Laki-laki	Kota	MIJEN	37	Islam	KK
16	SRI WAHYUNI	Perempuan	Kota	MIJEN	30	Islam	ISTRI
17	DARWANTO	Laki-laki	Kota	MIJEN	46	Islam	KK
18	SUYATUN	Perempuan	Kota	MIJEN	32	Islam	ISTRI
19	SENO	Laki-laki	Kota	MIJEN	78	Islam	KK
20	SUPINI	Perempuan	Kota	MIJEN	45	Islam	ISTRI
21	AMIN MENI P	Laki-laki	Kota	JOYOSURAN	46	Islam	KK
22	SUCIATI	Perempuan	Kota	JOYOSURAN	47	Islam	KK
23	AHMAD BADA I	Laki-laki	Kota	JOYOSURAN	41	Islam	KK
24	DEBORA DARSIH	Perempuan	Kota	JOYOSURAN	50	Protestan	ISTRI
25	SUGENG SUYONO	Laki-laki	Kota	JOYOSURAN	60	Islam	KK
26	SUDARMI	Perempuan	Kota	JOYOSURAN	63	Islam	KK
27	HANAFI	Laki-laki	Kota	JOYOSURAN	24	Islam	ANAK
28	DAH PERWITASARI	Perempuan	Kota	JOYOSURAN	25	Islam	ANAK
29	DJOKO SANTOSO	Laki-laki	Kota	JOYOSURAN	58	Protestan	KK
30	PRONODIHARJO	Perempuan	Kota	JOYOSURAN	75	Islam	KK
31	ROHIM	Laki-laki	Desa	KALIGAW E	37	Islam	KK
32	SAYATUN	Perempuan	Desa	KALIGAW E	40	Islam	ISTRI
33	ABDIL K	Laki-laki	Desa	KALIGAW E	41	Islam	KK
34	TRI ARIS	Perempuan	Desa	KALIGAW E	23	Islam	ISTRI
35	SYAFANI	Laki-laki	Desa	KALIGAW E	59	Islam	KK
36	NASIYAH	Perempuan	Desa	KALIGAW E	31	Islam	ISTRI
37	MUKLAR	Laki-laki	Desa	KALIGAW E	54	Islam	KK
38	TARLIYAH	Perempuan	Desa	KALIGAW E	41	Islam	ISTRI
39	TASURUN	Laki-laki	Desa	KALIGAW E	35	Islam	KK
40	TABSIROH	Perempuan	Desa	KALIGAW E	25	Islam	ANAK
41	KHAMIM	Laki-laki	Desa	BELIK	50	Islam	KK
42	SONAH	Perempuan	Desa	BELIK	32	Islam	ISTRI
43	EDI	Laki-laki	Desa	BELIK	32	Islam	ANAK
44	TARSARI	Perempuan	Desa	BELIK	35	Islam	ISTRI
45	MUKAFIL	Laki-laki	Desa	BELIK	65	Islam	KK
46	KULEMAH	Perempuan	Desa	BELIK	33	Islam	ISTRI

47	MAKMUN	Laki-laki	Desa	BELIK	64	Islam	KK
48	MARFUAH	Perempuan	Desa	BELIK	57	Islam	ISTRI
49	PRIYANTO	Laki-laki	Desa	BELIK	28	Islam	KK
50	SRI YANI	Perempuan	Desa	BELIK	40	Islam	ISTRI
51	SULIYATUN	Laki-laki	Kota	SUDAGARAN	44	Islam	KK
52	SRI HARTATI	Perempuan	Kota	SUDAGARAN	38	Islam	ISTRI
53	SOBIRIN	Laki-laki	Kota	SUDAGARAN	47	Islam	KK
54	SITI FATIMAH	Perempuan	Kota	SUDAGARAN	52	Islam	ISTRI
55	SURATNO	Laki-laki	Kota	SUDAGARAN	38	Islam	KK
56	JUMIRAHAN	Perempuan	Kota	SUDAGARAN	38	Islam	ISTRI
57	SUKARSO	Laki-laki	Kota	SUDAGARAN	54	Islam	KK
58	LILI H	Perempuan	Kota	SUDAGARAN	36	Hindu	ISTRI
59	ALI KRISTIYANTO	Laki-laki	Kota	SUDAGARAN	56	Katolik	KK
60	ROSIEM	Perempuan	Kota	SUDAGARAN	65	Islam	KK
61	SUPARNO	Laki-laki	Desa	MOJOROTO	40	Islam	KK
62	SURATI	Perempuan	Desa	MOJOROTO	44	Islam	ISTRI
63	SUGIMIN	Laki-laki	Desa	MOJOROTO	40	Islam	KK
64	SURATMI	Perempuan	Desa	MOJOROTO	25	Islam	ISTRI
65	PARTO GIYONO	Laki-laki	Desa	MOJOROTO	60	Islam	KK
66	SAMIJEM	Perempuan	Desa	MOJOROTO	48	Islam	ISTRI
67	SUGIMIN	Laki-laki	Desa	MOJOROTO	32	Islam	KK
68	SRINI	Perempuan	Desa	MOJOROTO	46	Islam	KK
69	SAYUK	Laki-laki	Desa	MOJOROTO	40	Islam	KK
70	SRI SUYATMI	Perempuan	Desa	MOJOROTO	33	Islam	ISTRI
71	CITROIKKOMO	Laki-laki	Kota	KARANGLO	70	Islam	KK
72	MARGINI	Perempuan	Kota	KARANGLO	37	Islam	ISTRI
73	YADI UTOMO	Laki-laki	Kota	KARANGLO	52	Islam	KK
74	PONIYEM	Perempuan	Kota	KARANGLO	75	Hindu	ISTRI
75	SUKIRDI	Laki-laki	Kota	KARANGLO	41	Islam	KK
76	SRI SAYEKTI	Perempuan	Kota	KARANGLO	49	Islam	KAKAK
77	PURNOMO	Laki-laki	Kota	KARANGLO	46	Islam	KK
78	SRI SUDARNI	Perempuan	Kota	KARANGLO	28	Islam	ISTRI
79	SUHARDI	Laki-laki	Kota	KARANGLO	58	Islam	KK
80	NARSI	Perempuan	Kota	KARANGLO	42	Islam	ISTRI
81	ERWAN SANTOSO	Laki-laki	Kota	GIRIPURWO	28	Islam	ANAK
82	MUFTI SALIMI	Perempuan	Kota	GIRIPURWO	66	Islam	ISTRI
83	SUSILO PURNOMO	Laki-laki	Kota	GIRIPURWO	47	Islam	KK
84	SITI MARYANA	Perempuan	Kota	GIRIPURWO	43	Islam	ISTRI
85	ISKAK WAGIO	Laki-laki	Kota	GIRIPURWO	58	Protestan	KK
86	NURYATI	Perempuan	Kota	GIRIPURWO	59	Islam	ISTRI
87	PAKESID	Laki-laki	Kota	GIRIPURWO	28	Islam	KK
88	TUNI WIJI RAHAYU	Perempuan	Kota	GIRIPURWO	42	Islam	ISTRI
89	TUGUR PARYONO	Laki-laki	Kota	GIRIPURWO	45	Islam	KK
90	SAMINI	Perempuan	Kota	GIRIPURWO	53	Islam	ISTRI
91	SUKIRNO	Laki-laki	Desa	AMPELSARI	34	Islam	KK
92	SITI MALIAH	Perempuan	Desa	AMPELSARI	36	Islam	ISTRI
93	MAHMUDIN	Laki-laki	Desa	AMPELSARI	66	Islam	KK
94	ROAITUN	Perempuan	Desa	AMPELSARI	43	Islam	ISTRI
95	SUMEDI	Laki-laki	Desa	AMPELSARI	45	Islam	KK
96	SITI ROBIYATUN	Perempuan	Desa	AMPELSARI	42	Islam	ISTRI
97	MARGIYO	Laki-laki	Desa	AMPELSARI	45	Islam	KK
98	SALAMAH	Perempuan	Desa	AMPELSARI	40	Islam	ISTRI

99	PASIKUN	Laki-laki	Desa	AMPELSARI	45	Islam	KK
100	NURYATI	Perempuan	Desa	AMPELSARI	25	Islam	ISTRI
101	SUWARSO	Laki-laki	Desa	MAOS KIDUL	40	Islam	KK
102	MAISAH	Perempuan	Desa	MAOS KIDUL	35	Islam	ISTRI
103	DARMUN	Laki-laki	Desa	MAOS KIDUL	28	Islam	ANAK
104	ADMIYAH	Perempuan	Desa	MAOS KIDUL	44	Islam	ISTRI
105	PUJI YATNO	Laki-laki	Desa	MAOS KIDUL	41	Islam	KK
106	KASMIAH	Perempuan	Desa	MAOS KIDUL	49	Islam	ISTRI
107	AGUS HERMANSYAH	Laki-laki	Desa	MAOS KIDUL	36	Islam	KK
108	SAMILAH	Perempuan	Desa	MAOS KIDUL	48	Islam	ISTRI
109	ARDUN	Laki-laki	Desa	MAOS KIDUL	47	Islam	KK
110	WAILEM	Perempuan	Desa	MAOS KIDUL	46	Islam	ISTRI
111	SUWONO	Laki-laki	Desa	SUKOREJO	29	Islam	KK
112	PARJIYEM	Perempuan	Desa	SUKOREJO	60	Islam	ISTRI
113	SURANTO	Laki-laki	Desa	SUKOREJO	35	Islam	KK
114	TENTREM	Perempuan	Desa	SUKOREJO	46	Islam	ISTRI
115	JUREMI	Laki-laki	Desa	SUKOREJO	54	Islam	KK
116	NURUDIN PARMIL	Perempuan	Desa	SUKOREJO	39	Islam	ISTRI
117	GITO SUWARNO	Laki-laki	Desa	SUKOREJO	63	Islam	KK
118	SITI KHOMSYAH	Perempuan	Desa	SUKOREJO	28	Islam	ISTRI
119	GITO SLAMET	Laki-laki	Desa	SUKOREJO	50	Islam	KK
120	NARNI	Perempuan	Desa	SUKOREJO	36	Islam	ISTRI
121	KARDI	Laki-laki	Desa	BLIMBING	45	Islam	KK
122	YANI	Perempuan	Desa	BLIMBING	50	Islam	ISTRI
123	SUKARNO	Laki-laki	Desa	BLIMBING	48	Islam	KK
124	JINEM	Perempuan	Desa	BLIMBING	68	Islam	KK
125	SASTRO WIBOWO	Laki-laki	Desa	BLIMBING	48	Islam	KK
126	SUPRAPTI	Perempuan	Desa	BLIMBING	38	Islam	ISTRI
127	TARMAN	Laki-laki	Desa	BLIMBING	55	Islam	KK
128	NGATIYEM	Perempuan	Desa	BLIMBING	29	Islam	ISTRI
129	HARTOYO	Laki-laki	Desa	BLIMBING	60	Islam	KK
130	SUTI	Perempuan	Desa	BLIMBING	50	Islam	ISTRI
131	AHMAD ABDULLAH	Laki-laki	Desa	SUGIHMAS	40	Islam	KK
132	TATI A	Perempuan	Desa	SUGIHMAS	40	Islam	ISTRI
133	AHMAD MUKHLISIN	Laki-laki	Desa	SUGIHMAS	23	Islam	KK
134	SRIYATI	Perempuan	Desa	SUGIHMAS	40	Islam	KK
135	SLAMET	Laki-laki	Desa	SUGIHMAS	48	Islam	KK
136	SALAMAH	Perempuan	Desa	SUGIHMAS	65	Islam	ISTRI
137	RUDI	Laki-laki	Desa	SUGIHMAS	22	Islam	KK
138	SARINI	Perempuan	Desa	SUGIHMAS	77	Islam	ISTRI
139	DALAIL	Laki-laki	Desa	SUGIHMAS	29	Islam	KK
140	TURIYAH	Perempuan	Desa	SUGIHMAS	40	Islam	ISTRI
141	DARMO	Laki-laki	Desa	BAKARAN KULON	83	Islam	KK
142	WARSIH	Perempuan	Desa	BAKARAN KULON	60	Islam	ISTRI
143	KARYO	Laki-laki	Desa	BAKARAN KULON	41	Islam	KK
144	JUMIRAH	Perempuan	Desa	BAKARAN KULON	36	Islam	ISTRI
145	HADI	Laki-laki	Desa	BAKARAN KULON	67	Islam	KK
146	TAWILAH	Perempuan	Desa	BAKARAN KULON	70	Islam	ISTRI
147	PARJO	Laki-laki	Desa	BAKARAN KULON	20	Islam	ANAK
148	ASRI	Perempuan	Desa	BAKARAN KULON	35	Islam	ISTRI
149	NDOYO	Laki-laki	Desa	BAKARAN KULON	48	Islam	KK
150	SUNTARI	Perempuan	Desa	BAKARAN KULON	45	Islam	ISTRI

151	RIZKI WICAKSONO	Laki-laki	Kota	KALINEGORO	23	Islam	ANAK
152	ROMLAH UTAMI	Perempuan	Kota	KALINEGORO	48	Protestan	ISTRI
153	IMAM WIDODO	Laki-laki	Kota	KALINEGORO	62	Islam	KK
154	TRI SULISTYAWATI	Perempuan	Kota	KALINEGORO	33	Islam	ISTRI
155	SUGIONO	Laki-laki	Kota	KALINEGORO	36	Islam	KK
156	MUAWANAH	Perempuan	Kota	KALINEGORO	43	Islam	ISTRI
157	MUSTAKIM	Laki-laki	Kota	KALINEGORO	39	Islam	KK
158	KHUSNUL KHOTIMAH	Perempuan	Kota	KALINEGORO	36	Islam	ISTRI
159	BAMBANG RIYANTO	Laki-laki	Kota	KALINEGORO	56	Islam	KK
160	SRI MURYATI	Perempuan	Kota	KALINEGORO	51	Islam	ISTRI
161	EDI SUPRAYITNO	Laki-laki	Desa	BOLOH	57	Islam	KK
162	YUMI	Perempuan	Desa	BOLOH	48	Islam	KK
163	SUJOED	Laki-laki	Desa	BOLOH	42	Islam	KK
164	SRIAH	Perempuan	Desa	BOLOH	42	Islam	KK
165	SUJIYO	Laki-laki	Desa	BOLOH	60	Islam	KK
166	SUYATI	Perempuan	Desa	BOLOH	71	Islam	KK
167	DASIYO	Laki-laki	Desa	BOLOH	80	Islam	KK
168	SULISWATI	Perempuan	Desa	BOLOH	28	Islam	ISTRI
169	HARNO	Laki-laki	Desa	BOLOH	67	Islam	KK
170	SRI HARYANTI	Perempuan	Desa	BOLOH	25	Islam	ISTRI
171	MADENAN	Laki-laki	Kota	WONOSARI	60	Islam	KK
172	NUR AZIZAH	Perempuan	Kota	WONOSARI	17	Islam	ANAK
173	SANWIKARTO	Laki-laki	Kota	WONOSARI	50	Islam	KK
174	SURATMI	Perempuan	Kota	WONOSARI	35	Islam	ISTRI
175	KHAMID	Laki-laki	Kota	WONOSARI	36	Islam	KK
176	ISTINGANAH	Perempuan	Kota	WONOSARI	28	Islam	ISTRI
177	ADI RIYANTO	Laki-laki	Kota	WONOSARI	21	Islam	ANAK
178	SITI MAKMUROH	Perempuan	Kota	WONOSARI	32	Islam	ISTRI
179	PARWOTO	Laki-laki	Kota	WONOSARI	39	Islam	KK
180	PAWIT	Perempuan	Kota	WONOSARI	48	Islam	ISTRI
181	MASRUKIN	Laki-laki	Kota	GROBOGAN	74	Protestan	KK
182	SULISTYANINGSIH	Perempuan	Kota	GROBOGAN	24	Islam	ISTRI
183	SAELAN	Laki-laki	Kota	GROBOGAN	58	Islam	KK
184	PUJIATI	Perempuan	Kota	GROBOGAN	28	Islam	ISTRI
185	WARNADI	Laki-laki	Kota	GROBOGAN	60	Islam	KK
186	ENDANG SUPRAPTI	Perempuan	Kota	GROBOGAN	29	Islam	ISTRI
187	MUSTOFA	Laki-laki	Kota	GROBOGAN	35	Islam	KK
188	MARYATI	Perempuan	Kota	GROBOGAN	36	Islam	ISTRI
189	EDI	Laki-laki	Kota	GROBOGAN	33	Protestan	KK
190	KASIYEM	Perempuan	Kota	GROBOGAN	46	Islam	ISTRI
191	RUSMANI	Laki-laki	Desa	SIDAKATON	56	Islam	KK
192	KARMI	Perempuan	Desa	SIDAKATON	60	Islam	KK
193	TONI	Laki-laki	Desa	SIDAKATON	51	Islam	KK
194	SAINI	Perempuan	Desa	SIDAKATON	42	Islam	ISTRI
195	ALKOJAN	Laki-laki	Desa	SIDAKATON	38	Islam	KK
196	DUMI	Perempuan	Desa	SIDAKATON	43	Islam	ISTRI
197	RAJIN	Laki-laki	Desa	SIDAKATON	53	Islam	KK
198	DIAN J	Perempuan	Desa	SIDAKATON	20	Islam	ANAK
199	SUPIR	Laki-laki	Desa	SIDAKATON	25	Islam	KK
200	ERWI	Perempuan	Desa	SIDAKATON	28	Islam	ISTRI
201	MIFTAUSIN	Laki-laki	Desa	JENGGAWUR	35	Islam	KK
202	SUGIYAKTI	Perempuan	Desa	JENGGAWUR	33	Islam	ISTRI

203	UNTUNG S	Laki-laki	Desa	JENGGAWUR	32	Islam	KK
204	MAKKOYA	Perempuan	Desa	JENGGAWUR	29	Islam	ISTRI
205	SUTARTO	Laki-laki	Desa	JENGGAWUR	52	Islam	KK
206	SITI M	Perempuan	Desa	JENGGAWUR	45	Islam	ISTRI
207	BAHRUDIN	Laki-laki	Desa	JENGGAWUR	32	Islam	KK
208	ETIK	Perempuan	Desa	JENGGAWUR	31	Islam	ISTRI
209	SUWIRTO	Laki-laki	Desa	JENGGAWUR	51	Islam	KK
210	MUJANAH	Perempuan	Desa	JENGGAWUR	39	Islam	ISTRI
211	KASMUJI	Laki-laki	Desa	KEBUMEN	50	Islam	KK
212	SUKERI	Perempuan	Desa	KEBUMEN	48	Islam	ISTRI
213	SUARDI	Laki-laki	Desa	KEBUMEN	65	Islam	KK
214	CASMUTI	Perempuan	Desa	KEBUMEN	27	Islam	ISTRI
215	KUSAERI	Laki-laki	Desa	KEBUMEN	34	Islam	KK
216	NARTIYAH	Perempuan	Desa	KEBUMEN	45	Islam	ISTRI
217	SURONO	Laki-laki	Desa	KEBUMEN	37	Islam	KK
218	SIAM	Perempuan	Desa	KEBUMEN	36	Islam	ISTRI
219	KALER DENI	Laki-laki	Desa	KEBUMEN	42	Islam	KK
220	KASIAM	Perempuan	Desa	KEBUMEN	55	Islam	ISTRI
221	HARIYANTO	Laki-laki	Desa	NGADIROJOKIDUL	44	Islam	KK
222	ANTI	Perempuan	Desa	NGADIROJOKIDUL	25	Islam	ISTRI
223	SAJAN	Laki-laki	Desa	NGADIROJOKIDUL	65	Islam	KK
224	TINEM	Perempuan	Desa	NGADIROJOKIDUL	53	Islam	ISTRI
225	SUNARDI	Laki-laki	Desa	NGADIROJOKIDUL	36	Islam	KK
226	NGADINEM	Perempuan	Desa	NGADIROJOKIDUL	65	Islam	ISTRI
227	MULATO	Laki-laki	Desa	NGADIROJOKIDUL	60	Islam	KK
228	SAMSIATI	Perempuan	Desa	NGADIROJOKIDUL	38	Islam	ISTRI
229	DJARMADI	Laki-laki	Desa	NGADIROJOKIDUL	34	Islam	KK
230	SUMINI	Perempuan	Desa	NGADIROJOKIDUL	38	Islam	ISTRI
231	RAHYONO	Laki-laki	Kota	PAKEMBARAN	45	Islam	KK
232	HERI W	Perempuan	Kota	PAKEMBARAN	35	Islam	ISTRI
233	SUDIRMAN	Laki-laki	Kota	PAKEMBARAN	81	Islam	KK
234	TARMIDI	Perempuan	Kota	PAKEMBARAN	33	Islam	ISTRI
235	ABDUL USIR	Laki-laki	Kota	PAKEMBARAN	50	Islam	KK
236	NURLALILA	Perempuan	Kota	PAKEMBARAN	43	Islam	ISTRI
237	WARID	Laki-laki	Kota	PAKEMBARAN	33	Islam	KK
238	NAKBAROKAH	Perempuan	Kota	PAKEMBARAN	40	Islam	ISTRI
239	ELBUQIO	Laki-laki	Kota	PAKEMBARAN	51	Islam	KK
240	YANTI	Perempuan	Kota	PAKEMBARAN	31	Islam	ISTRI
241	KISMANTO	Laki-laki	Desa	LUMANSARI	69	Islam	KK
242	SENIRAH	Perempuan	Desa	LUMANSARI	37	Islam	ISTRI
243	SAPAWI EKO NUR AZIZATUN	Laki-laki	Desa	LUMANSARI	40	Islam	KK
244	MUSTAGHIROH	Perempuan	Desa	LUMANSARI	17	Islam	ANAK
245	RAWIN	Laki-laki	Desa	LUMANSARI	41	Islam	KK
246	SRI HARTINI	Perempuan	Desa	LUMANSARI	33	Islam	ISTRI
247	SIKWANTO	Laki-laki	Desa	LUMANSARI	39	Islam	KK
248	KOMSATUN	Perempuan	Desa	LUMANSARI	27	Islam	ANAK
249	DARTO	Laki-laki	Desa	LUMANSARI	60	Islam	KK
250	JUMINAH	Perempuan	Desa	LUMANSARI	50	Islam	ISTRI
251	AGUS	Laki-laki	Desa	TOBO	22	Islam	KK
252	SUYANTI	Perempuan	Desa	TOBO	28	Islam	ISTRI
253	SUGIARTO	Laki-laki	Desa	TOBO	29	Islam	KK
254	PURWATIK	Perempuan	Desa	TOBO	24	Islam	ISTRI

255	GIARTO	Laki-laki	Desa	TOBO	52	Islam	KK
256	MARYUNYANI	Perempuan	Desa	TOBO	24	Islam	ISTRI
257	TULIS	Laki-laki	Desa	TOBO	64	Islam	KK
258	SITI	Perempuan	Desa	TOBO	21	Islam	ISTRI
259	SUDIRMAN	Laki-laki	Desa	TOBO	23	Islam	KK
260	BASRI	Perempuan	Desa	TOBO	23	Islam	ISTRI
261	KHABIB BUROHMAN	Laki-laki	Kota	MAOS LOR	25	Islam	ANAK
262	SUDIYEM	Perempuan	Kota	MAOS LOR	54	Islam	ISTRI
263	MARKUM	Laki-laki	Kota	MAOS LOR	53	Islam	KK
264	EKA MARDIANNINGSIH	Perempuan	Kota	MAOS LOR	28	Islam	ISTRI
265	SADAM	Laki-laki	Kota	MAOS LOR	47	Islam	KK
266	YASMIATI	Perempuan	Kota	MAOS LOR	41	Islam	ISTRI
267	SUPARDI	Laki-laki	Kota	MAOS LOR	45	Islam	KK
268	RETNO PALUPI	Perempuan	Kota	MAOS LOR	37	Islam	ISTRI
269	MUSTAKIM	Laki-laki	Kota	MAOS LOR	48	Islam	KK
270	MUSIRAH	Perempuan	Kota	MAOS LOR	43	Islam	ISTRI
271	NUR SUWANDI	Laki-laki	Desa	WONOROTO	50	Islam	KK
272	SITI ROKHMAT	Perempuan	Desa	WONOROTO	31	Islam	ISTRI
273	SUBARI	Laki-laki	Desa	WONOROTO	65	Islam	KK
274	JUMINI	Perempuan	Desa	WONOROTO	30	Islam	ISTRI
275	TARSONO	Laki-laki	Desa	WONOROTO	45	Islam	KK
276	RONIYAH	Perempuan	Desa	WONOROTO	30	Islam	ISTRI
277	WIKARTO	Laki-laki	Desa	WONOROTO	41	Islam	KK
278	SUMINI	Perempuan	Desa	WONOROTO	32	Islam	ISTRI
279	SUHAMDI	Laki-laki	Desa	WONOROTO	52	Islam	KK
280	JUMINI	Perempuan	Desa	WONOROTO	45	Islam	ISTRI
281	MUJIONO	Laki-laki	Kota	JATIBARANG KIDUL	50	Islam	KK
282	SITI AMNAH	Perempuan	Kota	JATIBARANG KIDUL	41	Islam	ISTRI
283	KASARI	Laki-laki	Kota	JATIBARANG KIDUL	38	Islam	ISTRI
284	SUPARCOYO	Perempuan	Kota	JATIBARANG KIDUL	60	Islam	KK
285	SHOHEKH	Laki-laki	Kota	JATIBARANG KIDUL	56	Islam	KK
286	SOPUROH	Perempuan	Kota	JATIBARANG KIDUL	44	Islam	ISTRI
287	SLAMET	Laki-laki	Kota	JATIBARANG KIDUL	64	Islam	KK
288	KHOLIDAH	Perempuan	Kota	JATIBARANG KIDUL	30	Islam	KK
289	SUYONO	Laki-laki	Kota	JATIBARANG KIDUL	58	Islam	KK
290	DEWI P	Perempuan	Kota	JATIBARANG KIDUL	32	Islam	ISTRI
291	ROHMAD	Laki-laki	Kota	PRAMBATAN KIDUL	45	Islam	KK
292	ISROTUN	Perempuan	Kota	PRAMBATAN KIDUL	42	Islam	ISTRI
293	AHMAD YATIN	Laki-laki	Kota	PRAMBATAN KIDUL	45	Islam	KK
294	WIDYASTUTI	Perempuan	Kota	PRAMBATAN KIDUL	56	Islam	ISTRI
295	TUTUG	Laki-laki	Kota	PRAMBATAN KIDUL	64	Islam	KK
296	MASNI	Perempuan	Kota	PRAMBATAN KIDUL	60	Islam	KK
297	SUTRIMO	Laki-laki	Kota	PRAMBATAN KIDUL	62	Islam	KK
298	SUMILAH	Perempuan	Kota	PRAMBATAN KIDUL	48	Islam	ISTRI
299	ABD MUKID	Laki-laki	Kota	PRAMBATAN KIDUL	27	Islam	ANAK
300	SITI RAHMAWATI	Perempuan	Kota	PRAMBATAN KIDUL	23	Islam	ANAK
301	SUGIANTA	Laki-laki	Desa	GEMPOL	43	Islam	KK
302	YANI HARTATI	Perempuan	Desa	GEMPOL	33	Islam	KK
303	SETIYONO	Laki-laki	Desa	GEMPOL	33	Islam	KK
304	NURAINI	Perempuan	Desa	GEMPOL	45	Islam	ISTRI
305	DIRJO SUHARTO	Laki-laki	Desa	GEMPOL	57	Islam	KK
306	SITI ROHMAH	Perempuan	Desa	GEMPOL	33	Islam	ISTRI

307	UMARDANI	Laki-laki	Desa	GEMPOL	37	Islam	KK
308	SRI SUBEKTI	Perempuan	Desa	GEMPOL	47	Islam	ISTRI
309	SLAMET HARIYANTO	Laki-laki	Desa	GEMPOL	39	Islam	KK
310	SITI LESTARI	Perempuan	Desa	GEMPOL	36	Islam	ISTRI
311	JALIL	Laki-laki	Kota	TRIMULYO	65	Islam	KK
312	MARSIYAH	Perempuan	Kota	TRIMULYO	50	Islam	ISTRI
313	AMIN AHMAD	Laki-laki	Kota	TRIMULYO	54	Islam	KK
314	NARTI	Perempuan	Kota	TRIMULYO	44	Islam	ISTRI
315	MUTOK EFFENDI	Laki-laki	Kota	TRIMULYO	42	Islam	KK
316	SULASTRI	Perempuan	Kota	TRIMULYO	47	Islam	ISTRI
317	DJIMIN	Laki-laki	Kota	TRIMULYO	49	Islam	KK
318	HARNI	Perempuan	Kota	TRIMULYO	40	Islam	ISTRI
319	SUROTO	Laki-laki	Kota	TRIMULYO	38	Islam	KK
320	SUBIYADI	Perempuan	Kota	TRIMULYO	32	Islam	ISTRI
321	SLAMET	Laki-laki	Desa	PALUMBUNGAN WETAN	25	Islam	KK
322	SUSIATI	Perempuan	Desa	PALUMBUNGAN WETAN	30	Islam	ISTRI
323	MARYONO	Laki-laki	Desa	PALUMBUNGAN WETAN	46	Islam	KK
324	SONAH	Perempuan	Desa	PALUMBUNGAN WETAN	35	Islam	ISTRI
325	RASIMAN	Laki-laki	Desa	PALUMBUNGAN WETAN	30	Islam	KK
326	SITI PATOMAH	Perempuan	Desa	PALUMBUNGAN WETAN	50	Islam	ISTRI
327	SUDIARTO	Laki-laki	Desa	PALUMBUNGAN WETAN	52	Islam	KK
328	RUMINI	Perempuan	Desa	PALUMBUNGAN WETAN	30	Islam	ISTRI
329	BAGUS SUSWADI	Laki-laki	Desa	PALUMBUNGAN WETAN	35	Islam	KK
330	KISBANDIAH	Perempuan	Desa	PALUMBUNGAN WETAN	34	Islam	ISTRI
331	DARMO	Laki-laki	Desa	CILANGKAP	35	Islam	KK
332	TARSINAN	Perempuan	Desa	CILANGKAP	55	Islam	ISTRI
333	SUJIONO	Laki-laki	Desa	CILANGKAP	51	Islam	KK
334	RASILEM	Perempuan	Desa	CILANGKAP	50	Islam	ISTRI
335	KUSMIARDI	Laki-laki	Desa	CILANGKAP	55	Islam	KK
336	SUYATI	Perempuan	Desa	CILANGKAP	40	Islam	ISTRI
337	DAWUT EFENDI	Laki-laki	Desa	CILANGKAP	45	Islam	KK
338	ROSYIDAH	Perempuan	Desa	CILANGKAP	35	Islam	ISTRI
339	NGAWIARTO	Laki-laki	Desa	CILANGKAP	59	Islam	KK
340	NGUDIRAHAYU	Perempuan	Desa	CILANGKAP	41	Islam	ANAK
341	SUJARI	Laki-laki	Desa	SOLOWIRE	35	Islam	KK
342	SAADAH	Perempuan	Desa	SOLOWIRE	45	Islam	ISTRI
343	SUKARMAN	Laki-laki	Desa	SOLOWIRE	70	Islam	KK
344	SITI MAGFIROH	Perempuan	Desa	SOLOWIRE	21	Islam	ISTRI
345	SUKIRAN	Laki-laki	Desa	SOLOWIRE	40	Islam	KK
346	MUYASAROH	Perempuan	Desa	SOLOWIRE	48	Islam	ISTRI
347	SUKADI	Laki-laki	Desa	SOLOWIRE	26	Islam	KK
348	ISTIKOMAH	Perempuan	Desa	SOLOWIRE	35	Islam	ISTRI
349	M SUKARMAN	Laki-laki	Desa	SOLOWIRE	45	Islam	KK
350	MUNIROH	Perempuan	Desa	SOLOWIRE	37	Islam	ISTRI
351	SAIDUN	Laki-laki	Desa	TRAYU	40	Islam	KK
352	FATIMAH	Perempuan	Desa	TRAYU	29	Islam	ISTRI
353	SOFYANTO	Laki-laki	Desa	TRAYU	36	Islam	KK
354	NGATINI	Perempuan	Desa	TRAYU	69	Islam	ISTRI

355	TRISNO	Laki-laki	Desa	TRAYU	55	Islam	KK
356	TUMINI	Perempuan	Desa	TRAYU	49	Islam	ISTRI
357	MULYADI	Laki-laki	Desa	TRAYU	40	Islam	KK
358	SUYITNI	Perempuan	Desa	TRAYU	33	Katolik	ISTRI
359	SLAMET	Laki-laki	Desa	TRAYU	40	Islam	KK
360	MARMINAH	Perempuan	Desa	TRAYU	68	Islam	ISTRI
361	KUDI	Laki-laki	Kota	SUKOLILO	69	Islam	KK
362	SUTINAH	Perempuan	Kota	SUKOLILO	40	Islam	ISTRI
363	DIMAN	Laki-laki	Kota	SUKOLILO	60	Islam	KK
364	KORIAWATI	Perempuan	Kota	SUKOLILO	38	Islam	ISTRI
365	EDI SUSANTO	Laki-laki	Kota	SUKOLILO	32	Islam	KK
366	JARMI	Perempuan	Kota	SUKOLILO	32	Islam	
367	SENIN	Laki-laki	Kota	SUKOLILO	40	Islam	
368	PRIHATIN	Perempuan	Kota	SUKOLILO	30	Islam	ISTRI
369	TONI SETIAWAN	Laki-laki	Kota	SUKOLILO	23	Islam	ANAK
370	WINUAH	Perempuan	Kota	SUKOLILO	30	Islam	ISTRI
371	MARSONO	Laki-laki	Desa	WONOKERSO	48	Islam	KK
372	TITIS	Perempuan	Desa	WONOKERSO	25	Islam	ISTRI
373	DARIYO	Laki-laki	Desa	WONOKERSO	40	Islam	KK
374	DWI SUWARNI	Perempuan	Desa	WONOKERSO	46	Islam	ISTRI
375	ANWAR	Laki-laki	Desa	WONOKERSO	26	Islam	ANAK
376	ERNI RIANTI	Perempuan	Desa	WONOKERSO	17	Islam	ANAK
377	ASFIR HANI	Laki-laki	Desa	WONOKERSO	30	Islam	KK
378	SITI WIJAYANTI	Perempuan	Desa	WONOKERSO	55	Islam	ISTRI
379	JARWAN	Laki-laki	Desa	WONOKERSO	42	Islam	KK
380	SITI MARWIYAH	Perempuan	Desa	WONOKERSO	50	Islam	ISTRI
381	MARSUDI	Laki-laki	Desa	TLAGA	45	Islam	KK
382	TUWIRAH	Perempuan	Desa	TLAGA	33	Islam	ISTRI
383	RAMINTO	Laki-laki	Desa	TLAGA	31	Islam	KK
384	SAINI	Perempuan	Desa	TLAGA	30	Islam	ISTRI
385	MUHARI	Laki-laki	Desa	TLAGA	50	Islam	KK
386	PARNIAH	Perempuan	Desa	TLAGA	43	Islam	ISTRI
387	ARISMANTO	Laki-laki	Desa	TLAGA	37	Islam	KK
388	SURATEMI	Perempuan	Desa	TLAGA	36	Islam	ISTRI
389	MINARSO	Laki-laki	Desa	TLAGA	50	Islam	KK
390	TARNI	Perempuan	Desa	TLAGA	55	Islam	ISTRI
391	WASMID	Laki-laki	Desa	SINDANGWANGI	60	Islam	KK
392	RUSMINAH	Perempuan	Desa	SINDANGWANGI	55	Islam	ISTRI
393	WARYO	Laki-laki	Desa	SINDANGWANGI	90	Islam	KK
394	TASEM	Perempuan	Desa	SINDANGWANGI	40	Islam	ISTRI
395	HARTONO	Laki-laki	Desa	SINDANGWANGI	57	Islam	KK
396	MUTMAINAH	Perempuan	Desa	SINDANGWANGI	25	Islam	KK
397	RUSMITO	Laki-laki	Desa	SINDANGWANGI	60	Islam	KK
398	SAIRAH	Perempuan	Desa	SINDANGWANGI	40	Islam	ISTRI
399	RASBI	Laki-laki	Desa	SINDANGWANGI	36	Islam	KK
400	WATNI	Perempuan	Desa	SINDANGWANGI	30	Islam	ISTRI
401	KASNO	Laki-laki	Desa	HARDIMULYO	47	Islam	KK
402	MARIMAH	Perempuan	Desa	HARDIMULYO	52	Islam	ISTRI
403	BUDI NUGROHO	Laki-laki	Desa	HARDIMULYO	18	Islam	ANAK
404	SUTIRAH	Perempuan	Desa	HARDIMULYO	52	Islam	ANAK
405	TUMINO	Laki-laki	Desa	HARDIMULYO	42	Islam	KK
406	SUTIMAH	Perempuan	Desa	HARDIMULYO	51	Islam	KK

407	MUHTADI	Laki-laki	Desa	HARDIMULYO	35	Islam	KK
408	SANGADAH	Perempuan	Desa	HARDIMULYO	55	Islam	KK
409	MUHRODIN	Laki-laki	Desa	HARDIMULYO	62	Islam	KK
410	MUNTAMAH	Perempuan	Desa	HARDIMULYO	27	Islam	ISTRI
411	KADIS	Laki-laki	Desa	BANYUURIP	26	Islam	KK
412	FATONAH	Perempuan	Desa	BANYUURIP	65	Islam	ISTRI
413	MUSTAKIM	Laki-laki	Desa	BANYUURIP	34	Islam	KK
414	SRI MURIN	Perempuan	Desa	BANYUURIP	44	Islam	ISTRI
415	TARCU	Laki-laki	Desa	BANYUURIP	54	Islam	KK
416	SUGIANTI	Perempuan	Desa	BANYUURIP	34	Islam	ISTRI
417	TUKIN	Laki-laki	Desa	BANYUURIP	41	Islam	KK
418	SUMARLIK	Perempuan	Desa	BANYUURIP	36	Islam	ISTRI
419	MASHADI	Laki-laki	Desa	BANYUURIP	75	Islam	KK
420	KANA	Perempuan	Desa	BANYUURIP	50	Islam	ISTRI
421	SAMIJO	Laki-laki	Kota	BULAKREJO	50	Islam	KK
422	WAHYUNI	Perempuan	Kota	BULAKREJO	45	Islam	ISTRI
423	SAPRDI	Laki-laki	Kota	BULAKREJO	22	Islam	ANAK
424	LIDI	Perempuan	Kota	BULAKREJO	21	Islam	ANAK
425	JOYO SUPONO	Laki-laki	Kota	BULAKREJO	55	Islam	KK
426	PONIYEM	Perempuan	Kota	BULAKREJO	53	Islam	ISTRI
427	HARTONO	Laki-laki	Kota	BULAKREJO	31	Islam	ANAK
428	NDARI RUSTAMININGSIH	Perempuan	Kota	BULAKREJO	42	Islam	ISTRI
429	SURATMIN	Laki-laki	Kota	BULAKREJO	49	Islam	KK
430	PAINAH	Perempuan	Kota	BULAKREJO	32	Islam	ISTRI
431	RIFQI HARDIYANTO	Laki-laki	Kota	POTROYUDAN	17	Islam	ANAK
432	MUTIAH	Perempuan	Kota	POTROYUDAN	50	Islam	KK
433	SUGIHARTO	Laki-laki	Kota	POTROYUDAN	45	Islam	KK
434	LILIK PURWATI	Perempuan	Kota	POTROYUDAN	34	Islam	ISTRI
435	SUSANTO	Laki-laki	Kota	POTROYUDAN	39	Islam	KK
436	MUSAROFAH	Perempuan	Kota	POTROYUDAN	38	Islam	ISTRI
437	PURWANTO	Laki-laki	Kota	POTROYUDAN	50	Islam	KK
438	HAYATI	Perempuan	Kota	POTROYUDAN	30	Islam	ISTRI
439	AMIRUDIN	Laki-laki	Kota	POTROYUDAN	44	Islam	KK
440	SUPKHIYAH	Perempuan	Kota	POTROYUDAN	45	Islam	ISTRI

Lampiran 2 Uji Reliabilitas

CONVENTIONAL POLITICAL PARTICIPATION

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	CON_RPT	1.1162	.5344	439.0
2.	CON_CAM	1.0820	.4407	439.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	2.1982	.7392	.8598	2

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
CON_RPT	1.0820	.1942	.5509	.
CON_CAM	1.1162	.2856	.5509	.

Reliability Coefficients

N of Cases = 439.0 N of Items = 2

Alpha = .7020

(sambungan)

UNCONVENTIONAL POLITICAL PARTICIPATION

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis

—

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P
H A)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	UN_DKS	1.4041	1.0209	438.0
2.	UN_ADV	1.0274	.2516	438.0
3.	UN_BOY	1.0251	.2819	438.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	3.4566	1.2372	1.1123	3

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
UN_DKS	2.0525	.1414	.0698	-.0195
UN_ADV	2.4292	1.1014	.1373	-.0369
UN_BOY	2.4315	1.1795	-.0355	.1253

Reliability Coefficients

N of Cases = 438.0

N of Items = 3

Alpha = .0633

(sambungan)

KONSUMSI INFORMASI POLITIK

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	INF_KOR	1.5523	1.0913	440.0
2.	INF_TV	3.6182	1.5031	440.0
3.	INF_RAD	2.0659	1.4406	440.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	7.2364	7.1877	2.6810	3

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
INF_KOR	5.6841	5.0822	.1859	.2942
INF_TV	3.6182	3.5851	.2360	.1779
INF_RAD	5.1705	4.0460	.1840	.2945

Reliability Coefficients

N of Cases = 440.0

N of Items = 3

Alpha = .3469

(sambungan)

SUPPORT FOR GRADUAL REFORM

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	GRAD1	3.4875	.9342	361.0
2.	GRAD2	3.9474	.7379	361.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	7.4349	1.5020	1.2256	2

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
GRAD1	3.9474	.5444	.0615	.
GRAD2	3.4875	.8728	.0615	.

Reliability Coefficients

N of Cases = 361.0 N of Items = 2

Alpha = .1129

(sambungan)

POLITICAL TRUST

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis

—

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P
H A)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	POLTRST1	2.8430	1.2688	395.0
2.	POLTRST2	3.6076	1.0327	395.0
3.	POLTRST3	3.5620	1.0142	395.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	10.0127	6.2613	2.5023	3

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
POLTRST1	7.1696	2.9026	.4045	.5565
POLTRST2	6.4051	3.3685	.4818	.4335
POLTRST3	6.4506	3.6949	.3944	.5514

Reliability Coefficients

N of Cases = 395.0

N of Items = 3

Alpha = .6125

(sambungan)

CIVIC ENGAGEMENT

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis

—

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P
H A)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	CVC_ENG	3.6164	1.2003	438.0
2.	SOC_COP	2.6073	1.2497	438.0

Correlation Matrix

	CVC_ENG	SOC_COP
CVC_ENG	1.0000	
SOC_COP	.4059	1.0000

N of Cases = 438.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of
Scale	6.2237	4.2198	2.0542	Variables 2

Reliability Coefficients 2 items

Alpha = .5770 Standardized item alpha = .5774

Lampiran 3
Uji Validitas (Factor Analysis)

Political Participation

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.626
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	72.815
	df	10
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
Keaktifan menghadiri pertemuan yang diadakan partai politik	1.000	.662
Keaktifan mengikuti kegiatan kampanye partai politik/ tim sukses kandidat	1.000	.649
Keaktifan melakukan advokasi kepentingan publik	1.000	.352
Keaktifan berdiskusi/ bincang-bincang mengenai politik	1.000	.334
Keaktifan melakukan pemboikotan produk-produk tertentu	1.000	.964

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix(a)

	Component	
	1	2
Keaktifan menghadiri pertemuan yang diadakan partai politik	.813	.020
Keaktifan mengikuti kegiatan kampanye partai politik/ tim sukses kandidat	.801	.087
Keaktifan melakukan advokasi kepentingan publik	.590	.064
Keaktifan berdiskusi/ bincang-bincang mengenai politik	.551	-.173
Keaktifan melakukan pemboikotan produk-produk tertentu	-.029	.982

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

(sambungan)

Konsumsi Informasi Politik

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.557
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	30.177
	df	3
	Sig.	.000

Component Matrix(a)

	Component
	1
Keaktifan mengkonsumsi berita politik di surat kabar	.634
Keaktifan mengkonsumsi berita politik di televisi	.724
Keaktifan mengkonsumsi berita politik di radio?	.618

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

(sambungan)

Political Equality

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.500
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	44.672
	df	1
	Sig.	.000

Component Matrix(a)

	Component
	1
68. Seberapa Ibu / Bapak setuju dengan pernyataan ini? Seorang kandidat / calon yang berlatar belakang militer lebih memiliki kemampuan untuk memimpin dibanding calon dari kalangan sipil.	.816
69. Seberapa Ibu / Bapak setuju dengan pernyataan ini? Seorang kandidat / calon yang memiliki usia lebih tua akan lebih memiliki kemampuan untuk memimpin dibanding mereka yang lebih muda.	.816

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

(sambungan)

Support Gradual Reform

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.500
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1.359
	df	1
	Sig.	.244

Component Matrix(a)

	Componen t
	1
70. Seberapa Ibu / Bapak setuju dengan pernyataan ini? Perbaikan pada masyarakat hanya bisa dicapai melalui upaya perubahan yang revolusioner (misalnya mengganti orang-orang yang duduk di pemerintahan secara total, kalau perlu tanpa proses pemilu).	.729
71. Seberapa Ibu / Bapak setuju dengan pernyataan ini? Perbaikan pada masyarakat dapat terwujud dengan baik jika perubahan dilakukan bertahap (misalnya pergantian orang-orang yang duduk di kursi DPR maupun pemerintah melalui proses pemilu yang sah).	.729

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

(sambungan)

Political Trust

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.632
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	137.216
	df	3
	Sig.	.000

Component Matrix(a)

	Component
	1
72. Seberapa Ibu / Bapak percaya Partai politik selama ini telah bekerja keras untuk memperjuangkan kepentingan rakyat?	.732
73. Seberapa Ibu / Bapak percaya Pemerintah daerah selama ini telah bekerja keras untuk memperjuangkan kepentingan rakyat?	.800
74. Seberapa percayakah Ibu/ Bapak bahwa Pilkada Provinsi Jawa Tengah bisa membawa perubahan/ perbaikan kehidupan Ibu/ Bapak? Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?	.729

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

(sambungan)

Political Efficacy

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.500
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	29.508
	df	1
	Sig.	.000

Component Matrix(a)

	Component
	1
75. Bagaimana Ibu / Bapak menilai arti penting keikutsertaan Ibu / Bapak dalam politik (misalnya ikut memilih dalam Pemilu dsb)?	.797
76. Apakah menurut Ibu / Bapak pemerintah dan politisi mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat seperti Ibu / Bapak?	.797

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Lampuran 4
Uji Regresi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.377(a)	.142	.133	.5915

a Predictors: (Constant), Keaktifan berdiskusi/ bincang-bincang mengenai politik , Factor Political Trust, CVC_EGMN, Keaktifan mengkonsumsi berita politik di surat kabar

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.516	4	5.629	16.089	.000(a)
	Residual	135.745	388	.350		
	Total	158.261	392			

a Predictors: (Constant), Keaktifan berdiskusi/ bincang-bincang mengenai politik , Factor Political Trust, CVC_EGMN, Keaktifan mengkonsumsi berita politik di surat kabar

b Dependent Variable: Conventional Participation

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.424	.164		2.588	.010
	Political Trust	.051	.036	.067	1.416	.158
	Civic Engagement	.058	.031	.090	1.883	.060
	Keaktifan mengkonsumsi berita politik di surat kabar	.048	.029	.080	1.651	.100
	Keaktifan berdiskusi/ bincang-bincang mengenai politik	.197	.030	.319	6.536	.000

a Dependent Variable: Conventional Participation

Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara

TUNJUKAN KARTU BANTU UNTUK NO.

Dalam SATU BULAN terakhir, berapa kali Ibu / Bapak.....? Apakah tidak pernah, sekali, 2 kali, 3-5 kali atau lebih dari 5 kali?

	Tidak pernah	1 Kali	2 Kali	3- 5 kali	Lebih dari 5 kali	Tidak jawab
1. Mengikuti rapat-rapat, kegiatan, atau acara yang diadakan oleh sebuah partai politik	1	2	3	4	5	8
2. Mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh sebuah partai politik/ tim sukses kandidat seperti menghadiri kampanye, membagikan brosur/ selebaran, membujuk orang lain untuk memilih salah seorang kandidat tertentu, dan sebagainya	1	2	3	4	5	8

TUNJUKAN KARTU BANTU UNTUK NO.

Dalam SATU BULAN terakhir, berapa kali Ibu / Bapak.....? Apakah tidak pernah, sekali, 2 kali, 3-5 kali atau lebih dari 5 kali?

	Tidak pernah	1 Kali	2 Kali	3- 5 kali	Lebih dari 5 kali	Tidak jawab
3. Melakukan diskusi/ bincang-bincang mengenai politik dengan orang lain seperti teman-teman, tetangga, keluarga, atau kerabat-kerabat Anda	1	2	3	4	5	8
4. Ikut serta dalam aksi-aksi pembelaan hak warga/ kepentingan publik seperti dengan melakukan demonstrasi, membuat petisi, mengumpulkan tanda tangan dukungan untuk meminta realisasi pembangunan, dan sebagainya	1	2	3	4	5	8
5. Melakukan pemboikotan (menolak membeli) produk-produk tertentu (misalnya dari negara tertentu) karena alasan politik, seperti misalnya melakukan boikot terhadap produk-produk AS atau memboikot pembelian beras impor	1	2	3	4	5	8

TUNJUKAN KARTU BANTU UNTUK NO.

Dalam Tiga bulan terakhir, seberapa sering Ibu/Bapak mengikuti berita-berita yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau politik di Jawa Tengah melalui media massa berikut ini?

	Setiap hari atau hampir tiap hari	3-4 hari dalam seminggu	1-2 hari dalam seminggu	Jarang (tidak setiap minggu)	Tidak pernah	Tidak jawab
6. Koran	1	2	3	4	5	8
7. Televisi	1	2	3	4	5	8
8. Radio	1	2	3	4	5	8

9. TUNJUKKAN KARTU BANTU. Apakah Ibu / Bapak biasa mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti arisan, rapat-rapat RT/RW, kerja bakti, membantu korban musibah, dan lain sebagainya?

1. Tidak pernah
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Selalu
8. Tidak tahu / tidak jawab

10. TUNJUKKAN KARTU BANTU. Berapa banyak jumlah organisasi kemasyarakatan (seperti karang taruna, kelompok pengajian, perkumpulan olahraga, dan sebagainya) yang pernah Ibu / Bapak ikuti?

1. Tidak ada
2. 1 buah
3. 2 buah
4. 3 buah
5. Lebih dari 3 buah
8. Tidak tahu / tidak jawab

11. TUNJUKKAN KARTU BANTU. Seberapa Ibu / Bapak setuju dengan pernyataan ini? Pada umumnya kebanyakan orang bisa dipercaya

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Tidak setuju
4. Sangat tidak setuju
8. Tidak tahu / tidak jawab

12. TUNJUKKAN KARTU BANTU. Seberapa Ibu / Bapak setuju dengan pernyataan ini? Pada umumnya kebanyakan orang tidak memiliki kesediaan untuk membantu orang lain/ mereka hanya memikirkan diri sendiri.

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Tidak setuju
4. Sangat tidak setuju
8. Tidak tahu / tidak jawab

13. TUNJUKKAN KARTU BANTU. Seberapa Ibu / Bapak setuju dengan pernyataan ini? Saya cenderung tidak nyaman berbicara/ berbincang-bincang/ berdialog dengan orang lain yang keyakinan politiknya (pendapatnya tentang politik) berlawanan dengan saya.

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Tidak setuju
4. Sangat tidak setuju
8. Tidak tahu / tidak jawab

14. TUNJUKKAN KARTU BANTU. Seberapa Ibu / Bapak setuju dengan pernyataan ini? Seorang kandidat / calon yang berlatar belakang militer lebih memiliki kemampuan untuk memimpin dibanding calon dari kalangan sipil.

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Tidak setuju
4. Sangat tidak setuju
8. Tidak tahu / tidak jawab

15. TUNJUKKAN KARTU BANTU. Seberapa Ibu / Bapak setuju dengan pernyataan ini? Seorang kandidat / calon yang memiliki usia lebih tua akan lebih memiliki kemampuan untuk memimpin dibanding mereka yang lebih muda.

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Tidak setuju
4. Sangat tidak setuju
8. Tidak tahu / tidak jawab

TUNJUKKAN KARTU BANTU. Saya akan bacakan beberapa pernyataan. Kamni ingin mengetahui seberapa Ibu / Bapak setuju dengan pernyataan-pernyataan ini. Apakah Ibu / Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju bahwa.....

Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	Tidak tahu / tidak jawab
16. Perbaikan pada masyarakat hanya bisa dicapai melalui upaya-upaya perubahan yang revolusioner (misalnya mengganti orang-orang yang duduk di berbagai posisi pemerintahan secara total, kalau perlu tanpa proses pemilu)	1	2	3	4	8
17. Perbaikan pada masyarakat dapat terwujud dengan baik jika perubahan dilakukan secara bertahap (misalnya dengan pergantian orang-orang yang duduk di kursi DPR maupun pemerintah melalui proses pemilu yang sah)	1	2	3	4	8

TUNJUKKAN KARTU BANTU UNTUK PERTANYAAN NOMOR

Saya akan membacakan sejumlah lembaga atau individu. Seberapa Ibu / Bapak percaya lembaga atau individu berikut selama ini telah bekerja keras untuk memperjuangkan kepentingan rakyat? Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali?

Organisasi	Sangat percaya	Cukup Percaya	Kurang percaya	Tidak percaya sama sekali	Tidak tahu / tidak jawab
18. Partai politik	1	2	3	4	8
19. Pemerintah daerah	1	2	3	4	8

20. TUNJUKKAN KARTU BANTU. Seberapa percayakah Ibu/ Bapak bahwa Pilkada Provinsi Jawa Tengah bisa membawa perubahan/ perbaikan kehidupan Ibu/ Bapak? Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?

1. Sangat percaya
2. Cukup percaya
3. Kurang percaya
4. Tidak percaya sama sekali
8. Tidak tahu/Tidak jawab

21. TUNJUKKAN KARTU BANTU. Bagaimana Ibu / Bapak menilai arti penting keikutsertaan Ibu / Bapak dalam politik (misalnya ikut memilih dalam Pemilu dsb)?

1. Sama sekali tidak akan mempengaruhi apa-apa
2. Hampir tidak berpengaruh apa-apa/ kecil kemungkinannya akan berpengaruh
3. Mungkin berpengaruh, mungkin pula tidak
4. Ada pengaruhnya, walaupun sedikit
5. Sangat menentukan/ besar pengaruhnya terhadap keadaan
8. Tidak tahu / tidak jawab

22. TUNJUKKAN KARTU BANTU. Apakah menurut Ibu / Bapak pemerintah dan politisi mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat seperti Ibu / Bapak?

1. Sama sekali tidak
2. Sedikit sekali aspirasi yang didengarkan
3. Kadang didengarkan, kadang tidak
4. Cukup banyak aspirasi yang didengarkan
5. Banyak aspirasi yang didengarkan
8. Tidak tahu / tidak jawab